

MANAJEMEN STRATEGI

Studi Kasus Usaha Bersama
Tambak Udang Rakyat

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA

Dr. Budhi Waskito, M.Si.

Ir. Indriati Agustina Gultom, ST., MM

Ayu Kartika Puspa, S.Kom, MTI

MANAJEMEN STRATEGI

**Studi Kasus Usaha Bersama
Tambak Udang Rakyat**



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Manajemen Strategi
Studi Kasus Usaha Bersama Tambak Udang Rakyat

Penulis:

Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA

Dr. Budhi Waskito, M.Si.

Ir. Indriati Agustina Gultom, ST., MM

Ayu Kartika Puspa, S.Kom, MTI

Editor:

Appin Purisky Redaputri S.MB., M.M.

Desain Cover & Layout

Tim Aura Kreatif

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35142

xii + 155 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan Oktober 2018

ISBN: 978-602-60638-6-1

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



PRAKATA

Manajemen strategi merupakan hal yang sangat penting direncanakan oleh perusahaan atau organisasi. Baik dalam rangka mencari laba maupun organisasi sosial. Hal ini berkaitan dengan perubahan yang dinamis yang harus dihadapi suatu organisasi. Manajemen strategi merupakan suatu cara yang dilakukan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian yang pasti akan terjadi. Untuk itu perencanaan strategi yang berkaitan dengan kelembagaan suatu organisasi, merupakan perencanaan yang kompleks yang melibatkan banyak pihak dan banyak bagian didalamnya. Sehingga pemikiran yang tersistem juga diperlukan untuk pengelolaannya.

Buku ini merupakan buku yang membahas mengenai manajemen strategi suatu usaha bersama rakyat di Bumi Lampung. Yang merupakan hasil dari penelitian di usaha tambak udang rakyat di Bumi Dipasena Lampung. Buku ini mencakup mengenai manajemen strategi suatu ekonomi kelembagaan yang tersistem dan membutuhkan pemikiran yang tersistem, kemudian bagaimana melembagakan sistem ekonomi yang sudah berjalan serta penerapan pola usaha bersama masyarakat di tambak udang Bumi Dipasena. Hal

ini berkaitan dengan sejarah Bumi Dipasena yang mengalami konflik berkepanjangan.

Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai bahan diskusi dan referensi akademik guna pengembangan ilmu manajemen strategi di Indonesia. Selain itu, diharapkan buku ini bermanfaat bagi praktisi manajemen sebagai referensi dalam manajemen strategi, khususnya lembaga kerakyatan.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga terbitnya buku ini. Kami mengharapkan masukan terkait penyempurnaan buku ini untuk penerbitan berikutnya.

Bandar Lampung, 5 November 2017

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman M.B.A





DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I Manajemen Strategi dan Kelembagaan Ekonomi	1
1.1 Manajemen Strategi	2
1.1.1 Pembentukan Strategi	3
1.1.2 Perumusan Strategi.....	10
1.1.3 Implementasi Strategi	13
1.1.4 Tujuan Manajemen Strategi	13
1.2 Ekonomi Kelembagaan	14
1.2.1 Ekonomi Kelembagaan Baru	19
1.2.2 Ekonomi Kelembagaan dan Pertumbuhan Ekonomi.	21
1.2.3 Ekonomi Kelembagaan dan Strategi Pembangunan Ekonomi	22
1.2.4 Ekonomi Kelembagaan dan Sistem Ekonomi	24

1.3 <i>Systems Thinking</i> dan Kelembagaan	25
1.3.1 Mengapa Diperlukan Pendekatan Sistem	30
1.3.2 Apa Karakteristik Permasalahan yang Mengharuskan Menggunakan Pendekatan Sistem	32
1.3.3 Macam-Macam Pendekatan Sistem.....	32
1.4 Cara Berpikir Sistem (<i>Systems Thinking</i>)	36

BAB II Pelembagaan Ekonomi (Peraturan yang disepakati

Bersama)	41
2.1 Perusahaan.....	42
2.1.1 Badan Usaha dan Badan Hukum	42
2.1.2 Jenis Perusahaan	43
2.2 Koperasi	45
2.2.1 Jenis Koperasi.....	46
2.2.2 Koperasi di Indonesia.....	49
2.3 Ekonomi Kelembagaan dan Pembangunan Pedesaan.....	52
2.3.1 Industrialisasi Pedesaan	53
2.3.2 Sektor Tradisional dan Modern di Perekonomian Desa	54
2.3.3 Pembangunan Sektor Finansial Pedesaan	55
2.4 Pedesaan dan Pelembagaan Usahanya	57

BAB III Pengaruh Budaya Pada Pengembangan Pelembagaan

Ekonomi	62
3.1 Pengertian Budaya dan Kebudayaan	62
3.1.1 Pengertian Kebudayaan.....	63
3.1.2 Unsur-unsur Kebudayaan	64
3.1.3 Wujud dan Komponen Kebudayaan	65
3.2 Contoh Pelembagaan Ekonomi.....	69

BAB 4 Studi Kasus Dipasena

4.1 Profil Dipasena	71
4.2 Sejarah.....	74

BAB 5 Karakteristik Usaha Tambak Dipasena, Risiko dan	
Pengelolaannya	88
5.1 Karakteristik Kampung Bumi Dipasena	88
5.2 Aktor-Aktor yang Terlibat dan Perannya	93
5.3 Faktor Keberhasilan Usaha Tambak Udang Bumi Dipasena	103
5.4 Teknis Pola Budidaya Udang Vaname di Bumi Dipasena	108
5.5 Pengelolaan dan Risiko Usaha	113
5.5.1 Bagi Hasil	116
5.5.2 Konsep Cadangan Risiko Usaha (CRU)	118
5.5.2 Konsep Dana 1000 Rupiah dan Hutang Darurat	118
 BAB 6 Dampak Budaya Kebersamaan dan Perekonomian	
yang Meningkatkan	121
6.1 Sejarah Masa Lalu	121
6.2 Risiko yang Terjadi Dulu dan Saat Ini	130
 BAB 7 Kelembagaan Sistem CRU	132
7.1 CRU Sebagai Pengelolaan Risiko Usaha	132
 BAB 8 Pengembangan Pengelolaan Tambak Udang Bumi	
Dipasena	137
8.1 Kondisi Budidaya (Optimalisasi Produksi)	137
8.2 Fasilitas Budidaya	149
8.2.1 Perbaikan	152
8.2.2 Peran Stakeholder	152
8.3 Akses dan Infrastruktur	153
8.3.1 Perbaikan	154
8.3.2 Peran Stakeholder	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perbedaan Ekonomi Neoklasik dan Ekonomi Kelembagaan	17
Tabel 5.1 : Perbedaan Pola Kemitraan Inti-Plasma dengan Pola Kemitraan Usaha Bersama	92
Tabel 5.2 : Pola Bagi Hasil Usaha	116
Tabel 5.3 : Contoh Perhitungan Bagi Hasil.....	117
Tabel 7.1 : Cadangan Risiko Usaha	132
Tabel 7.2 : Saldo Cadangan Risiko Usaha (CRU) Desa Bumi Dipasena Jaya	135
Tabel 8.1 : Data Penggunaan Saprotam Sub Blok 7 Foxtrot Tahun 2017	139





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 :	Pembentukan Strategi.....	4
Gambar 1.2 :	<i>Strategic Planning Model</i>	5
Gambar 1.3 :	<i>Environmental Variabels</i>	5
Gambar 1.4 :	<i>Systems Thinking A New Orientation To Life</i>	38
Gambar 4.1 :	Wilayah Bumi Dipasena Beserta Pembagian 8 Desa di dalamnya	72
Gambar 4.2 :	Pembagian Kawasan di Bumi Dipasena	73
Gambar 4.3 :	Hamparan Tambak Udang Bumi Dipasena	73
Gambar 4.4 :	Peta Kampung Bumi Dipasena	74
Gambar 4.5 :	Demo Petambak Dipasena di Kantor DPR	75
Gambar 4.6 :	Nafian Faiz	77
Gambar 4.7 :	Tampak Luar Cold Storage atau Pabrik Udang Dipasena milik Perusahaan Inti yang sudah dihancurkan oleh petambak.....	77
Gambar 4.8 :	Kondisi di Dalam Pabrik Udang Dipasena milik Perusahaan Inti yang sudah dihancurkan oleh petambak	78
Gambar 4.9 :	Konflik Bumi Dipasena.....	79
Gambar 4.10:	Fase Revitalisasi Mandiri Bumi Dipasena	80
Gambar 4.11 :	Kronologis Tambak Udang Bumi Dipasena	86

Gambar 5.1 :	Contoh Kebersamaan dan Gotong Royong Petambak Bumi Dipasena Ketika Panen.....	89
Gambar 5.2 :	Budaya Gotong Royong dan Kebersamaan Petambak Bumi Dipasena	90
Gambar 5.3 :	Akses Menuju Kampung Petambak Bumi Dipasena	91
Gambar 5.4 :	Tampak Depan Jembatan Swadaya Masyarakat.....	91
Gambar 5.5 :	Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Organisasi Masyarakat	98
Gambar 5.6 :	Lokasi Pabrik di Tiga Kota Besar di Indonesia	102
Gambar 5.7 :	Lokasi Ekspor Hasil Udang Bumi Dipasena	103
Gambar 5.8 :	Proses Budidaya Udang Vaname di Bumi Dipasena	109
Gambar 5.9 :	Kantong Benur dan Proses Penebaran Benur	110
Gambar 5.10 :	Proses Pemberian Pakan Udang dan Contoh Kincir Tambak Udang.....	111
Gambar 5.11 :	Pengecekan Ukuran Udang	111
Gambar 5.12 :	Proses Panen Tambak Udang	112
Gambar 5.13 :	Proses Pengumpulan Hasil Panen Udang di Pengepul	113
Gambar 5.14 :	Proses Pemasukkan Hasil Panen Udang ke dalam Truk pengangkut hasil panen	113
Gambar 5.15 :	Bagan Kelembagaan Bumi Dipasena.....	114
Gambar 5.16 :	Revolusi Pola Usaha.....	116
Gambar 5.17 :	Alur Pelaksanaan Program Dana 1000 Rupiah.....	119
Gambar 5.18 :	Contoh Model Perhitungan Hasil Usaha	120
Gambar 6.1 :	Salah Satu Sekolah SMA di Bumi Dipasena.....	124
Gambar 6.2 :	SDN 01 Bumi Dipasena.....	124
Gambar 7.1 :	Strategi Pengelolaan Risiko sebesar 10%, sehingga tingkat risiko menurun	133
Gambar 8.1 :	Pelajar Bumi Dipasena yang Belajar Menggunakan Petromak.....	150
Gambar 8.2 :	Pengangkutan Air Bersih dari Luar Kawasan Bumi Dipasena.....	151
Gambar 8.3 :	Kondisi Jalan yang Rusak sebagai akses dari dan keluar Bumi Dipasena	154

BAB I

Manajemen Strategi & Kelembagaan Ekonomi

Visi, misi, tujuan dan strategi merupakan bagian penting suatu organisasi dalam menjalankan usahanya. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik untuk mewujudkannya. Dalam hal ini manajemen strategi memiliki peran dalam mengelola strategi perusahaan untuk, memberi arah jangka panjang yang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko, memotivasi dan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi serta meningkatkan kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa depan.

1.1 Manajemen Strategi

Jika berbicara mengenai manajemen strategi, maka berhubungan dengan bagaimana mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber daya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen Strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategi merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan terus-menerus berubah mengikuti perubahan dan perkembangan.

Menurut Thomas Wheelen et al (2010)¹, Manajemen strategi adalah serangkaian dari pada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan/perencanaan strategi, pelaksanaan/implementasi dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan dan pembentukannya manajemen strategi juga bisa diartikan sebagai aktivitas manajemen tertinggi yang biasanya disusun oleh dewan direksi dan dilaksanakan oleh CEO serta tim eksekutif organisasi tersebut. Manajemen strategi berfungsi memberikan arahan menyeluruh untuk perusahaan dan terkait erat dengan bidang perilaku organisasi.

Dalam penerapannya, terdapat dua elemen utama dari manajemen strategi. Pertama, manajemen strategis dalam sebuah perusahaan berkaitan dengan proses yang berjalan (*ongoing processes*). Manajemen strategi berkaitan dengan bagaimana manajemen menganalisis sasaran strategis (visi, misi, tujuan) serta kondisi internal dan eksternal yang sedang dihadapi perusahaan.

Selanjutnya, perusahaan harus menciptakan keputusan strategis. Keputusan ini harus mampu menjawab dua pertanyaan utama: (1) industri apa yang digeluti perusahaan dan (2) bagaimana perusahaan harus bersaing di industri tersebut. Serta, tindakan diambil untuk menjalankan keputusan tersebut.

Elemen kedua, manajemen strategi adalah studi tentang mengapa sebuah perusahaan mampu mengalahkan perusahaan lainnya. Manajer perlu menentukan bagaimana perusahaan bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak hanya unik dan berharga, tetapi juga sulit ditiru atau dicari substitusinya sehingga mampu bertahan lama. Keunggulan kompetitif yang mampu bertahan lama biasanya didapatkan dengan melakukan aktivitas berbeda dengan apa yang dilakukan pesaing, atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda. Ketchen (2009)²

Berdasarkan penjabaran mengenai manajemen strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan-keputusan antar bidang perusahaan, yang digunakan sebagai panduan tindakan bagi setiap fungsi perusahaan agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajemen strategi berkaitan dengan keunggulan kompetitif yang menjadi pembeda suatu perusahaan dengan pesaingnya. Sedangkan Dokumen rencana strategis organisasi merupakan dokumen yang harus terus diperbaharui sesuai dinamika perubahan kondisi lingkungan perusahaan.

1.1.1 Pembentukan Strategi

Konsep dasar manajemen strategi meliputi 4 elemen dasar, yaitu: Pengamatan lingkungan (Environmental Scanning), Perumusan strategi (strategy Formulation), Implementasi strategi (strategy implementation) dan evaluasi dan pengendalian (evaluation and control). (Wheelen et al, 2010)¹



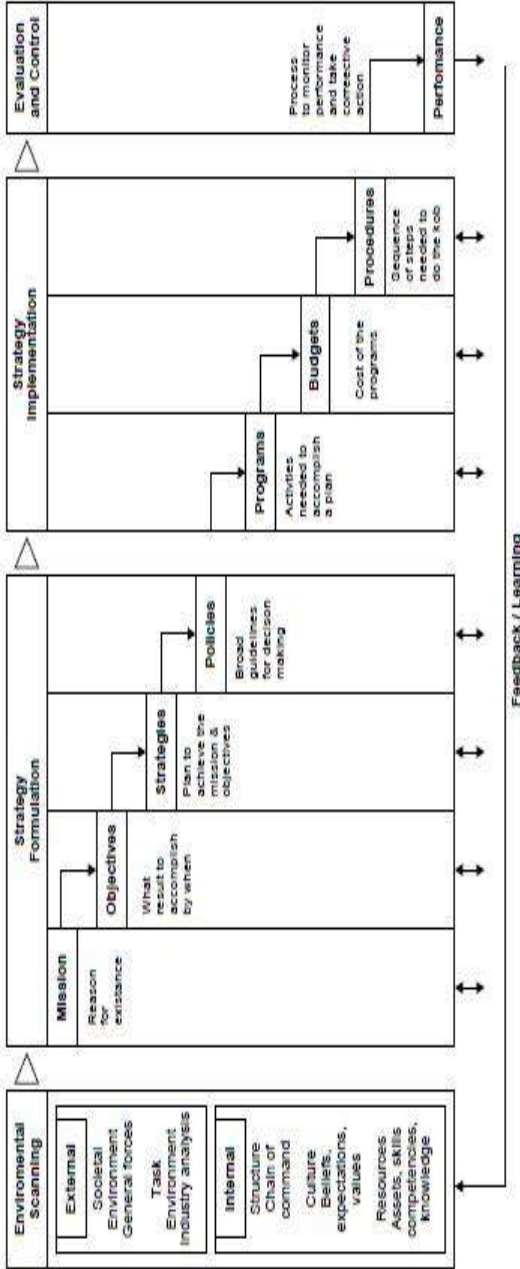
Gambar 1.1

Pembentukan Strategi

Sumber Data : Wheelen and Hunger (2010)¹

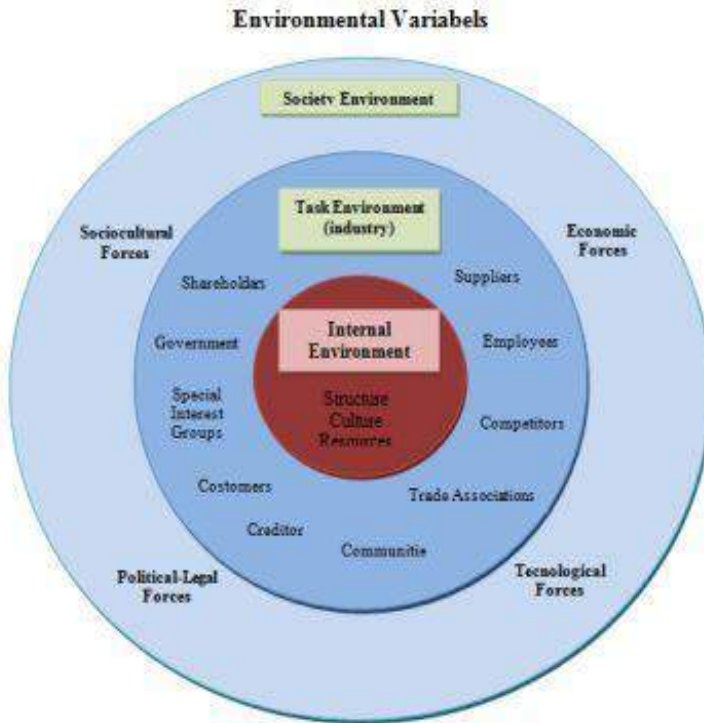
Pengamatan lingkungan dilakukan dengan menganalisa sisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Setelah mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal, perusahaan membuat formulasi strategi yang terdiri dari visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Kemudian, strategi yang telah diformulasikan, diimplementasikan dalam pelaksanaan program-program kegiatan, sesuai dengan anggaran yang ada dan prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah proses evaluasi dan pengendalian kinerja perusahaan. Dalam tahap ini, biasanya dilakukan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, baik perusahaan secara keseluruhan, maupun individu pegawai. Setelah pelaksanaan evaluasi dan pengendalian, didapatkan feedback yang dapat merubah proses formulasi strategi maupun implementasi strategi.

Adapun detail model perencanaan strategis menurut Wheelen and Hunger (2010)¹ adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2
Strategic Planning Model

Didalam merancang strategi, perusahaan membutuhkan dukungan analisis komprehensif seperti riset-riset, perspektif umum, dll sebagai data awal dasar penyusunan strategi, terutama kondisi dan audit lingkungan internal dan eksternal. Adapun environmental variable digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.3

Environmental Variabels

Sumber Data : Wheelen and Hunger (2010)¹

a. Analisa Lingkungan Eksternal

Kekuatan eksternal berhubungan dengan hampir seluruh stakeholder suatu perusahaan, sesuai dengan tren yang terjadi diberbagai bidang. Analisa lingkungan eksternal dimulai dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang dan ancaman eksternal

perusahaan, dengan mempertimbangkan lingkungan social perusahaan seperti perubahan ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum serta teknologi. Peluang dan ancaman tersebut dihubungkan dengan seluruh stakeholder perusahaan. Selanjutnya organisasi akan mengembangkan suatu misi yang jelas, merancang strategi guna mencapai tujuan jangka panjang, dan mengembangkan berbagai kebijakan untuk meraih tujuan tahunan. Dalam melakukan analisa lingkungan eksternal, penting bagi perusahaan untuk menyediakan tenaga-tenaga profesional untuk menjalankan proses analisa tersebut serta mendalami identifikasi lingkungan terkait faktor-faktor berikut :

1. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan industri adalah :
 - a. Penyedia/pemasok (supplier) dengan adanya pemasok faktor-faktor produksi, muncul kegiatan produksi, di samping itu pemasok juga menunjang kelangsungan hidup dunia usaha
 - b. Perantara adalah pihak-pihak yang berperan dalam penyebaran hasil-hasil produksi dari produsen ke tangan konsumen hingga siap dikonsumsi, misalnya distributor, pengecer dan sebagainya
 - c. Pasar dalam arti luas. Meskipun letaknya berada di luar kegiatan produksi, tetapi karena seluruh hasil produksi adalah untuk melayani (dijual ke) pasar, maka semua pihak yang terlibat dan berada di dalam pasar termasuk konsumen.
 - d. Pegawai adalah salah satu stakeholder perusahaan yang mempengaruhi kualitas hasil produksi barang dan jasa suatu perusahaan.
 - e. Pemerintah, Komunitas, Organisasi Perdagangan, dan pemegang saham.

2. faktor lingkungan sosial adalah sebagai berikut :
 - a. Keadaan alam
 - b. Politik dan hankam, keadaan politik dan pertahanan keamanan secara umum menciptakan iklim ketenangan usaha

- c. Hukum peraturan perundangan-undangan yang berlaku misalnya undang-undang perpajakan, perburuhan dan sebagainya
- d. Perekonomian, tingkat pendapatan, pola-pola pemenuhan kebutuhan masyarakat, tingkat investasi dan sebagainya
- e. Pendidikan dan teknologi tingkat kecerdasan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi pada umumnya
- f. Sosial dan kebudayaan: pandangan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat seperti terwujud dalam norma-norma etika dan social, kepercayaan, agama, kesenian, pola hubungan antar individu dan sistem kerja samanya, serta strata social
- g. Kependudukan jumlah tingkat kelahiran-kematian, penyebaran penduduk (misalnya urbanisasi dan transmigrasi), umur dan jenis kelamin
- h. Hubungan internasional : mencakup banyak hal seperti proteksi bahan barang dan jasa, nilai tukar mata uang teknologi, kebudayaan, dan sebagainya

b. Analisa Lingkungan Internal

Proses analisa lingkungan internal berhubungan dengan struktur internal organisasi, kebijakan, penentuan kekuatan-kelemahan, faktor-faktor pengorganisasian umum seperti pengendalian sumber daya yang dimiliki perusahaan serta perpaduan dan pengembangan informasi mengenai setiap fungsional perusahaan seperti manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, pemasaran/marketing, sistem informasi manajemen, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan (Litbang). Berikut adalah cakupan pertimbangan yang membawa pengaruh bagi analisa lingkungan internal perusahaan yaitu yang berkaitan dengan sumber daya yang ada didalamnya seperti:

- 1) Fungsi manajemen

Adalah fungsi yang terdiri atas lima aktivitas pokok, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penempatan staff dan pengontrolan. Aktivitas-aktivitas ini bertujuan untuk memastikan segala implementasi kebijakan dan tugas-tugas setiap fungsional dapat sinkron dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Aktivitas tersebutpun terkait dengan tahap proses manajemen strategi, yaitu perumusan strategi pada aktivitas perencanaan, penerapan strategi pada aktivitas pengorganisasian, pemotivasian dan penempatan staff, serta pevaluasian strategi pada aktivitas pengendalian.

2) Fungsi Pemasaran

Dimana fungsi yang memfokuskan pada proses pendefinisian, pengantisipasi dan pemenuhan kebutuhan konsumen akan produk dan jasa, Tujuh fungsi pemasaran yang diterapkan sebagai analisis pokok adalah analisis konsumen, penjualan produk dan jasa, perencanaan produk dan jasa, penetapan harga, distribusi, riset pemasaran, dan analisis peluang.

3) Fungsi Keuangan/Akuntansi

David (2010)³, fungsi akuntansi terdiri atas tiga keputusan, yaitu keputusan investasi, pembiayaan dan keputusan dividen. Dalam penentuan kinerja keuangan terkait kekuatan dan kelemahannya, sering digunakan perhitungan rasio yang terkait ketiga keputusan tersebut. Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan finansial perusahaan dibagi menjadi lima jenis yaitu (a) Rasio likuiditas, untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, (b) Rasio pengungkit, Sejauh mana perusahaan didanai oleh utang, (c) Rasio aktivitas, mengukur efektifitas pemanfaatan sumberdaya perusahaan, (d) Rasio profitabilitas, mengukur keefektifan manajemen dalam mengusahakan pengembalian yang diharapkan, dan (e) Rasio pertumbuhan, mengindikasikan

kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan ekonomi dan industri.

4) Fungsi Produksi/Operasi

Yaitu segala aktivitas perusahaan mengubah input menjadi output. Input dideskripsikan sebagai sumber daya produksi dan output sebagai barang/jasanya. Fungsional ini mengolah input, mentransformasikan, dan mengelola output yang beragam dari satu industri atau pasar ke industri atau pasar lainnya.

5) Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Dalam fungsional ini, litbang dibagi menjadi dua bentuk dasar yaitu, litbang internal yang mana organisasi menggunakan tenaga ahli dalam departemennya sendiri untuk menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangannya dan litbang eksternal atau litbang kontrak dimana perusahaan merekrut para peneliti, aliansi/lembaga independen untuk menjalankan tugasnya. Fokus utama litbang sangat beragam, tergantung dari objektif perusahaan dan strategi yang diimplementasikan.

6) Fungsi Sistem Informasi Manajemen

Merupakan fungsi yang menyediakan alternatif khusus bagi fungsi yang lain sebagai landasan yang akan mempermudah fungsi-fungsi tersebut dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kualitas dalam pengambilan keputusan manajerial. Bentuk operasi dan delegasi dari fungsional ini berupa kombinasi implementasi peranti lunak terhadap perencanaan strategi perusahaan.

1.1.2 Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang suatu perusahaan yang dilihat dari kesempatan dan ancaman lingkungan perusahaan serta kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Perumusan strategi dimulai dari penyusunan misi

organisasi. Misi organisasi merupakan tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi harus disusun dengan baik dan sedemikian rupa sehingga mampu mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain.

Setelah menentukan misinya, suatu perusahaan akan merumuskan tujuan perusahaan berdasarkan misi yang ada. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan diukur hasilnya jika memungkinkan. Dengan kata lain tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Maka pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi.

Setelah mengetahui misi dan tujuan perusahaan, dilanjutkan dengan perumusan strategi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Dalam menetapkan strategi yang baik, perusahaan harus memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.

Selain strategi perusahaan, ada juga kebijakan perusahaan yang menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu dimulai dari merumuskan:

a. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu mimpi atau cita-cita yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tentang keadaan di masa datang, yang ingin diwujudkan oleh seluruh personel perusahaan, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah, bahkan pesuruh sekalipun. Sedangkan Misi adalah penjabaran lebih rinci mengenai visi agar visi menjadi mudah dimengerti atau jelas bagi seluruh pegawai perusahaan.

b. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

Pemahaman perusahaan mengenai lingkungan eksternal dan internalnya merupakan bagian penting dari realisasi misi perusahaan. Pelaksanaan misi akan menjadi sulit dilakukan jika perusahaan tidak menghubungkannya dengan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, tindakan untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan eksternal perusahaan menjadi sangat penting, karena pada dasarnya kondisi lingkungan eksternal berada di luar kendali organisasi. Selain pemahaman kondisi lingkungan eksternal, perusahaan juga perlu memahami kondisi lingkungan internal secara luas dan mendalam. Strategi yang dibuat juga harus bersifat konsisten dan realistis dengan melihat kekuatan dan kelemahan sesuai dengan situasi dan kondisi internal perusahaan. Selain mengetahui kekuatan dan kelemahan, perusahaan perlu mencermati peluang yang ada dan memanfaatkannya agar perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Karena peluang yang tidak digunakan dapat berbalik menjadi ancaman untuk perusahaan, jika peluang tersebut dimanfaatkan oleh pesaing.

c. Analisis Pilihan Strategi

Penerapan strategi di perusahaan, memiliki bentuk yang berbeda-beda, bisa dilihat dari perbedaan industrinya, jenis dan ukuran perusahaannya dan bahkan situasinya. Namun secara umum ada sejumlah strategi yang dapat diterapkan pada berbagai bentuk industri dan ukuran perusahaan. Strategi-strategi ini dikelompokkan sebagai strategi generic. Dari bermacam-macam strategi dalam kelompok strategi generic ini akan dipilih salah satu atau kombinasi beberapa strategi induk (*grand strategy*) dengan menggunakan cara-cara tertentu.

d. Sasaran Jangka Panjang

Sasaran jangka panjang perusahaan, berarti merupakan tujuan perusahaan. Upaya pencapaian tujuan perusahaan merupakan

suatu proses berkesinambungan yang memerlukan pelaksanaan per tahapan. Untuk menentukan apakah suatu tahapan sudah dicapai atau belum diperlukan suatu tolak ukur, misalnya kurun waktu dan hasil yang ingin dicapai, yaitu penilaian kinerja perusahaan dengan angka-angka kuantitatif. Pembuatan sasaran jangka panjang ini mengacu kepada strategi induk yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.1.3 Implementasi Strategi

Implementasi strategis merupakan proses merubah beberapa strategi dan kebijakan menjadi tindakan melalui pengembangan program, penyesuaian anggaran dan penetapan prosedur. Implementasi strategi dipertimbangkan setelah dilakukan perumusan strategi. Implementasi Strategi merupakan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan dalam menjalankan perencanaan strategis dan menjadi kunci sukses dari tahapan manajemen strategi. Implementasi strategi erat kaitannya dengan pelaksanaan isu-isu strategi seperti keuangan, pemasaran, operational dan sebagainya.

1.1.4 Tujuan Manajemen Strategi

Menurut Suwandiyanto (2010)⁴, terdapat empat tujuan manajemen strategi, yaitu:

1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi/perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi/perusahaan. Karena, arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan.
2. Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Organisasi/perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan.

3. Mengantisipasi setiap perubahan. Manajemen strategi memungkinkan top manajemen untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas kerangka waktu/berpikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok.
4. Berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih baik dan efektif.

1.2 Ekonomi Kelembagaan

Banyak ahli ekonomi yang meyakini bahwa efisiensi dan kemajuan ekonomi bersumber dari kelembagaan (*institutions*). Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kelembagaan?.

Jika melihat sejarahnya, ahli teori dari kelembagaan dimulai dari *American Institutional Tradition* seperti Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, John R. Commons dan Clarence Ayres. Selain itu ada pula ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan John Stuart Mill, Karl Marx, serta tokoh Neoklasik seperti Marshall.

Terdapat beberapa periode pengenalan ilmu ekonomi, seperti *American Institutional Tradition* yang kemudian dikenal sebagai ilmu Ekonomi Kelembagaan Lama (*Old Institutional Economics*), sedangkan aliran-aliran selanjutnya seperti ekonomi klasik, neoklasik dan *Austrian Economics* disebut sebagai Ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics/NIE*).

Ekonomi Kelembagaan Lama, sebagian besar bersumber dari dua proyek penelitian, yakni penelitian pertama yang dilakukan oleh Thorstein Veblen, yang kemudian dimodifikasi oleh Clarence Ayres. Sedangkan penelitian kedua dilakukan oleh John R. Commons (Rutherford dalam Yustika 2012)⁵.

Thorstein memfokuskan penelitian kepada investigasi efek teknologi baru terhadap skema kelembagaan, serta mendeskripsikan

bagaimana kesepakatan-kesepakatan sosial dan kelompok kepentingan dimapankan untuk menolak perubahan. Sedangkan Commons lebih berkonsentrasi kepada hukum, hak kepemilikan dan organisasi yang memiliki implikasi terhadap kekuatan ekonomi, transaksi ekonomi dan distribusi pendapatan. Sehingga kelembagaan dimengerti sebagai apa pun yang bernilai tambah atau kritik terhadap ilmu ekonomi klasik atau *hedonic*. Kelembagaan juga dimaknai sebagai apa pun yang berhubungan dengan perilaku ekonomi.

Menurut Bardhan dalam Yustika (2012)⁵, kelembagaan akan lebih sesuai bila didefinisikan sebagai aturan-aturan sosial, kesepakatan dan elemen lain dari struktur kerangka kerja dalam suatu interaksi sosial. Selain itu, kelembagaan bisa juga diartikan sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang bisa diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar.

Kelembagaan memiliki tiga komponen yaitu aturan formal, informal dan mekanisme penegakkan. Aturan formal meliputi konstitusi, statuta, hukum dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi. Sedangkan komponen mekanisme penegakkan menganggap bahwa semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakkan.

Pendefinisian kelembagaan bisa dipilah menjadi dua klasifikasi. Pertama, berkaitan dengan proses, kelembagaan merupakan upaya untuk mendesain pola interaksi antar pelaku ekonomi, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Yang kedua, berhubungan dengan tujuan, bahwa kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik dan sosial antar pelakunya.

Challen dalam Yustika (2012)⁵ mengungkapkan beberapa karakteristik umum dari kelembagaan yaitu:

1. Kelembagaan secara sosial diorganisasi dan didukung, yang biasanya kelembagaan membedakan setiap rintangan-rintangan

atas perilaku manusia, misalnya halangan biologis dan rintangan fisik.

2. Kelembagaan adalah aturan-aturan formal dan konvensi informal, serta tata perilaku.
3. Kelembagaan secara perlahan-lahan berubah atas kegiatan kegiatan yang telah dipandu maupun dihalangi.
4. Kelembagaan juga mengatur larangan-larangan dan persyaratan-persyaratan.

Kapp dalam Yustika (2012)⁵ menjelaskan bahwa ciri-ciri ekonomi kelembagaan dapat dilihat dari tiga karakteristik yaitu:

1. Adanya kritik umum terhadap anggapan awal dan elemen normative yang tersembunyi dari analisis ekonomi tradisional.
2. Pandangan umum proses ekonomi sebagai sebuah sistem terbuka dan sebagai bagian dari jaringan sosio-kultural sebuah hubungan.
3. Penerimaan umum atas prinsip aliran sebab akibat sebagai hipotesis utama untuk menjelaskan dinamika proses ekonomi, termasuk proses keterbelakangan dan pembangunan.

Jika dibandingkan antara ekonomi kelembagaan dan ekonomi neoklasik, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan Ekonomi Neoklasik dan Ekonomi Kelembagaan

1	Pendekatan	Materialistik	Idealistik
2	Satuan observasi	Komoditas dan harga	Transaksi
3	Tujuan individu	Diri sendiri (self-interest)	Diri Sendiri dan orang lain
4	Hubungan dengan ilmu-ilmu sosial lain	Hanya ilmu ekonomi	Hampir Semua Ilmu Sosial
5	Konsep nilai	Nilai dalam pertukaran	Nilai dalam Penggunaan
6	Konsep ekonomi	Mirip ilmu-ilmu alam	Pendekatan Budaya
7	Falsafah	Pra-Dewey	Pasca-Dewey
8	Tingkah Laku Sosial	Percaya <i>free-will</i>	Behaviorist
9	Postulat	Keseimbangan	Ketidakseimbangan
10	Fokus	Sebagian (particularism)	Keseluruhan
11	Metode Ilmiah	Hampir pasti positif	Kebanyakan normative
12	Data	Kebanyakan kuantitatif	Kebanyakan kualitatif
13	Sistem	Tertutup	Terbuka
14	Ekonometrika	Dipakai secara baik	Tidak/ kadang dipakai
15	Visi Ekonomi	Mengarah ke statis	Lebih ke arah dinamis
16	Peranan	Memberikan pilihan	Merekomendasi pilihan
17	Sikap terhadap kegiatan kolektif	Melawan	Tidak dapat dihindari
18	Tokoh	Adam Smith. Alfred Marshall	Thorstein Veblen, John R. Commons

Samuels dalam Yustika (2012)⁵ menyimpulkan delapan aspek dari ekonomi kelembagaan:

1. Ekonomi Kelembagaan cenderung menekankan kepada proses evolusioner melalui penolakannya terhadap teori ekonomi klasik, yang percaya terhadap mekanisme penyesuaian otomatis lewat perubahan-perubahan dalam sistem harga.
2. Para ahli kelembagaan menolak pandangan neoklasik mengenai pasar bebas dan pasar yang efisien. Mereka mengutamakan pandangan tentang eksistensi kelembagaan yang mengandaikan adanya tindakan kolektif dari individu-individu di dalam masyarakat. Mereka juga berargumentasi bahwa sistem pasar itu sendiri merupakan hasil dari perbedaan kelembagaan yang telah eksis dalam kurun waktu tertentu.
3. Ide penting yang dibuat oleh ekonom kelembagaan adalah bahwa faktor teknologi tidaklah terjadi begitu saja. Teknologi merupakan proses perubahan yang berkesinambungan dan hal itu menyebabkan perubahan yang penting pula. Dengan pandangan itu teknologi bisa menentukan ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya fisik.
4. Ahli kelembagaan memiliki pandangan yang menyatakan bahwa sumber daya dialokasikan melalui struktur kelembagaan yang bermacam-macam dan dalam beragam hubungan kekuasaan yang hidup di masyarakat. Faktanya, di Negara-negara berkembang sebagian besar sumber daya hanya dipegang oleh elite lokal dan di dalam kantor-kantor pemerintahan. Bahkan sering kali terjadi kolusi antara elite usahawan lokal dan pemegang kekuasaan terhadap proses alokasi sumber daya Negara.
5. Menurut Samuels, teori kelembagaan merupakan nilai (value) yang tidak melihat harga-harga relative, namun nilai kepentingan terhadap kelembagaan, struktur sosial dan perilaku.
6. Kultur dan kekuasaan menentukan cara bagaimana individu berperilaku. Individu-individu diikat oleh masyarakat melalui

norma-norma dan nilai-nilai, sehingga mereka cenderung bertindak secara bersama-sama ketimbang secara pribadi. Pandangan ini tentu saja menurunkan keyakinan dalam ekonomi neoklasik tentang perilaku untuk memaksimalkan kepentingan pribadi.

7. Samuels berpandangan bahwa ahli ekonomi kelembagaan memiliki orientasi yang lebih pluralistik atau demokratis.
8. Ahli ekonomi kelembagaan melihat ekonomi merupakan suatu cara pandang yang menyeluruh dan mencoba untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dalam perspektif multidisipliner.

1.2.1 Ekonomi Kelembagaan Baru

Ekonomi Kelembagaan Baru" (*new institutional economics*/NIE) dikembangkan oleh para penulis mulai dekade 1930-an. Secara garis besar, NIE sendiri merupakan upaya "perlawanan" terhadap dan sekaligus pengembangan ide ekonomi neoklasik. Lebih dari itu, NIE sendiri memiliki para penyumbang pikiran dari beragam pengaruh politik (*political persuasions*).

NIE juga menambahkan beberapa poin penting tentang kegagalan kelembagaan (*institutional failures*) yang menjadi penyebab terjadinya keterbelakangan di banyak negara. Kegagalan kelembagaan tersebut merujuk kepada struktur kontrak dan hukum, serta regulasi dari penegakan pihak ketiga (*rules of third party enforcement*) yang lemah, padahal semua itu harus diperkuat untuk dapat menjalankan transaksi pasar.

Menurut Williamson, istilah NIE digunakan untuk memisahkan dengan istilah lain, yakni OIE (*old institutional economics*), yang dipelopori oleh Common dan Veblen. Mazhab OIE berargumentasi bahwa kelembagaan merupakan faktor kunci dalam menjelaskan dan memengaruhi perilaku ekonomi, namun dengan sedikit analisis dan tanpa kerangka teoritis yang mumpuni. Pendekatan ini murni beroperasi di luar pendekatan ekonomi neoklasik dan tanpa menggunakan teori kuantitatif, di mana dari pendekatan kuantitatif tersebut biasanya suatu generalisasi diambil atau pilihan-pilihan

kebijakan yang tepat dapat dibuat. Ahli ekonomi "neoklasik" sebaliknya- mengabaikan secara total peran kelembagaan; diasumsikan pelaku-pelaku ekonomi beroperasi dalam ruang yang bebas nilai (*vacuum*). Oleh karena itu, NIE mencoba memperkenalkan pentingnya peran dari kelembagaan, namun tetap berargumentasi bahwa pendekatan ini bisa dipakai dengan menggunakan kerangka ekonomi neoklasik. Dengan kata lain, di bawah NIE beberapa asumsi yang tidak realistis dari neoklasik (seperti informasi yang sempurna, tidak ada biaya transaksi/zero transaction costs, dan rasionalitas yang lengkap) diabaikan, tetapi asumsi individu yang berupaya untuk mencari keuntungan pribadi (*self-seeking individuals*) untuk memperoleh kepuasan maksimal tetap diterima. Terlebih, kelembagaan dimasukkan sebagai rintangan tambahan di bawah kerangka kerja NIE.

Kunci perbedaan antara OIE dan NIE adalah bahwa pendekatan yang pertama sangat memfokuskan kajiannya mengenai "kebiasaan" (*habit*), Bagi para ahli OIE, kebiasaan/perilaku dianggap sebagai faktor krusial yang akan menentukan formasi dan sustenance kelembagaan. Sebaliknya, di ujung spektrum lain yang berseberangan, NIE lebih memberikan perhatian kepada kendala yang menghalangi proses penciptaan/ pengondisian kelembagaan, dan utamanya memfokuskan kepada pentingnya kelembagaan sebagai kerangka interaksi antar individu. Karakteristik dari para ahli NIE adalah selalu mencoba menjelaskan pentingnya kelembagaan, seperti perusahaan atau negara, sebagai model referensi bagi perilaku individu yang rasional dan untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dalam interaksi manusia. Faktor penjelasnya adalah dari individu yang berada dalam aturan main tersebut (*from individuals of institutions*), dengan menganggap individu sebagai apa adanya (*given*). Pendekatan ini kemudian dideskripsikan sebagai "*methodological individualism*".

Pada akhirnya, NIE (dan ekonomi biaya transaksi) membangun gagasan bahwa kelembagaan dan organisasi berupaya mencapai efisiensi, meminimalisasikan biaya menyeluruh (bukan hanya ongkos produksi seperti yang disuarakan oleh pendekatan ekonomi neoklasik,

tetapi juga biaya transaksi). Sebuah perusahaan dengan struktur organisasi yang telah ada mungkin akan bekerja secara baik dan kemudian bertemu dengan kondisi baru yang menyulitkan bagi perusahaan tersebut untuk melakukan adaptasi.

NIE beroperasi pada dua level, yakni lingkungan kelembagaan/*institutional environment (macro level)* dan kesepakatan kelembagaan/*institutional arrangement (micro level)*. Williamson mendeskripsikan *institutional environment* ini sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan, dan hak-hak di dalam kontrak merupakan beberapa contoh dari kebijakan ekonomi. Sebaliknya, level analisis mikro berfokus dengan masalah tata kelola kelembagaan (*institutions of governance*). Singkatnya, *institutional arrangement* merupakan kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antarunit tersebut bisa berlangsung, baik lewat cara kerjasama maupun kompetisi. Sebuah kesepakatan kepemilikan merupakan *institutional arrangement*, karena di dalamnya mengalokasikan hak-hak kepemilikan kepada individu, kelompok, atau pemerintah. Dengan begitu, menurut Williamson, kesepakatan kelembagaan merujuk kepada cara untuk mengelola transaksi, baik melalui pasar, pasar bayangan (*quasi-market*), maupun model kontrak yang memakai hirarkhi. Jadi, fokusnya adalah transaksi individu dan pertanyaan berkaitan dengan bentuk organisasi (*integrasi vertikal versus out-contracting*) dianalisis pula. Bagi Williamson, kesepakatan kelembagaan mungkin istilah yang paling mendekati dengan istilah yang terpopuler disebut sebagai "kelembagaan".

1.2.2. Ekonomi Kelembagaan dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam tradisi ekonomi kelembagaan, sumber pertumbuhan ekonomi tidak harus bertumpu kepada investasi semata, meskipun disadari bahwa faktor tersebut juga penting. Bahkan jika teknologi dianggap tidak berubah, pertumbuhan ekonomi tetap bisa dilakukan.

Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya perubahan (peningkatan) teknologi inilah yang disebut sebagai pertumbuhan kasus statis. (Yeager dalam Yustika 2012)⁵.

Suatu kelembagaan yang efisien dalam lingkungan yang statis bisa dilihat dari Indikator tinggi/ rendahnya biaya transaksi. Semakin rendahnya biaya transaksi yang muncul dari kegiatan transaksi ekonomi, berarti menunjukkan kelembagaan yang efisien, dan demikian sebaliknya.

Jika diasumsikan perekonomian beroperasi secara efisien, maka terdapat dua jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertama meningkatkan jumlah sumber daya dalam proses produksi. Kedua, pertumbuhan ekonomi juga bisa datang dari proses peningkatan produktivitas sumber daya. Dengan sumber daya yang tepat dapat menghasilkan output yang lebih besar. Produktivitas yang tinggi tersebut tidak lain dihasilkan dari perbaikan teknologi. Pertumbuhan ekonomi seperti inilah yang disebut dengan pertumbuhan intensif. Pertumbuhan intensif inilah yang bisa dianggap sebagai nama lain dari 'new growth theory', yang menjadi kunci peningkatan standar hidup secara sistematis dan dari waktu ke waktu.

Peran terpenting dari kelembagaan adalah membuat aturan yang menjadikan perusahaan mempunyai insentif untuk melakukan proses creative destruction yang pada akhirnya berimplikasi kepada penemuan teknologi baru dan memicu pertumbuhan ekonomi. Di Negara berkembang, kesadaran meletakkan aspek penelitian dan pengembangan masih sangat rendah, sehingga komitmen untuk mengerjakan pada level perusahaan hampir tidak terlihat.

1.2.3. Ekonomi Kelembagaan dan Strategi Pembangunan Ekonomi

Pada level makro, fokus dari ekonomi kelembagaan adalah menyiapkan dasar produksi, pertukaran dan distribusi dari berbagai macam aspek, baik hukum, ekonomi, politik dan sosial. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, strategi pembangunan ekonomi

dianggap sebagai kunci yang akan menentukan kebijakan-kebijakan teknis untuk menggulirkan kegiatan ekonomi.

Strategi pembangunan ekonomi yang paling populer dijalani oleh semua negara di dunia tidak lain adalah mencoba mengomparasikan antara strategi pembangunan ekonomi berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif. Suatu negara memiliki keunggulan komparatif jika dalam kegiatan-kegiatan ekonominya banyak menggunakan faktor-faktor produksi yang relatif lebih tersedia atau murah terdapat di negara itu daripada negara-negara yang merupakan mitra perdagangannya.

Keunggulan kompetitif juga sering dimaknai sebagai proses di mana perusahaan mampu menggunakan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki dalam menciptakan keunikan dan derajat kesulitan bagi pelaku lain untuk mengikuti/ mengimitasi sehingga memberikan nilai tambah/ lebih bagi pelanggannya. (barney dalam yustika 2012)⁵. Pertama, faktor teknologi oleh sebagian analis dianggap merupakan variable penting yang membentuk keunggulan kompetitif suatu negara. Kedua, dalam pandangan makro, bukankah setelah suatu negara mempunyai kemampuan teknologi dengan sendirinya ia merupakan keunggulan komparatif (bukan kompetitif).

Selain itu, pemahaman terhadap keunggulan komparatif biasanya juga mempengaruhi pilihan pengambilan kebijakan ekonomi di suatu negara. Pilihan kebijakan tersebut bisa dipilah dalam dua kategori, yakni kebijakan industrialisasi yang bertumpu kepada orientasi ekspor/ promosi ekspor dan kebijakan yang menekankan orientasi ke dalam/ substitusi impor. Khusus untuk negara berkembang, pola yang biasa digunakan adalah terlebih dulu memakai orientasi substitusi impor dan baru kemudian merembet ke orientasi promosi ekspor setelah perekonomian dianggap cukup kuat.

Di negara maju, restrukturisasi perekonomian tersebut difokuskan kepada upaya membangun hubungan keuangan intrapemerintahan agar bisa mengimbangi perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin kompleks. Sementara itu, di negara yang sedang melakoni proses transisi ekonomi, seperti di Eropa Timur dan

Tengah, saat ini sedang giat-giatnya membenahi sistem keuangan pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di luar itu, banyak negara berkembang lainnya juga berpikir keras melakukan desentralisasi fiskal sebagai salah satu jalan meloloskan diri dari berbagai jebakan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan makro ekonomi dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi yang telah menyebabkan negara-negara itu jatuh terperosok akhir-akhir ini. Desentralisasi bisa didefinisikan sebagai proses penyerahan kekuasaan kepada wilayah atau pemerintahan lokal dengan menggeser struktur akuntabilitas dari level nasional ke subnasional.

1.2.4. Ekonomi Kelembagaan dan Sistem Ekonomi

Analisis ilmu ekonomi dapat dibagi dalam empat cakupan (Miller, 1988), yaitu alokasi sumber daya, tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan, produksi dan harga, distribusi pendapatan dan struktur kekuasaan.

Sistem ekonomi terdiri dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi kapitalis (kapitalisme) bisa dicirikan bahwa kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis digerakkan dan dikoordinasi oleh pasar (bebas) dengan instrumen harga sebagai penanda, kemudian dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap individu memiliki kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan (*property rights*) sebagai dasar melakukan transaksi, selanjutnya kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis dipisahkan oleh tiga pemilik factor produksi, yaitu modal, tenaga kerja dan pemilik lahan, dan tidak ada halangan bagi pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis untuk masuk dan keluar pasar.

Sedangkan di dalam sistem ekonomi sosialis, faktor-faktor produksi berada dibawah control Negara. Keputusan produksi dan investasi tidak dilakukan melalui pasar dan para kapitalis tetapi berdasarkan perencanaan terpusat. Ekonomi kelembagaan sistem ekonomi sosialis hanya didasarkan pada dua prinsip yaitu pertama, negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, seperti investasi, dari mulai proses

perencanaan, operasionalisasi, pengawasan, sampai ke evaluasi. Kedua, pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan pelaku ekonomi lainnya, tetapi setiap pelaku ekonomi membuat kontrak dengan Negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Bagaimana hubungan ekonomi kelembagaan dengan demokrasi?. Hanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat bisa meningkatkan pendapatan dan tidak kesejahteraannya secara signifikan, sehingga memungkinkan mereka bisa berpartisipasi secara efektif dalam politik dengan tingkat tanggungjawab yang sesuai. Dengan kata lain tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, sulit bagi suatu Negara menciptakan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Berarti dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat terbukanya peluang demokratisasi.

Berbeda dengan demokrasi dan ekonomi kelembagaan. Pembangunan ekonomi dan kelembagaan memiliki keeratan hubungan yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari kinerja perekonomian sebuah Negara dipengaruhi oleh kebijakan dan kelembagaan. Selain itu, kelembagaan juga harus selalu mengalami perkembangan dan perubahan karena kegiatan ekonomi yang semakin kompleks. Perubahan kelembagaan diperlukan mengingat proses perkembangan dan pembangunan ekonomi tidak dengan sendirinya menciptakan dasar-dasar kelembagaan.

1.3 Systems Thinking dan Kelembagaan

Kelembagaan juga memiliki kaitan yang erat dengan sistem. Menurut Eriyatno dalam Barusman (2017)⁶, sistem adalah totalitas himpunan elemen-elemen yang mempunyai struktur dalam nilai posisional serta dimensional terutama dimensi ruang dan waktu dalam upaya mencapai suatu tujuan (*goals*). Sebuah sistem adalah seperangkat komponen yang saling mempengaruhi atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang terpadu. Konsep sistem banyak dipengaruhi oleh pendapat teknis yaitu merupakan proses transformasi yang mengolah input menjadi output sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai. Selain itu sebuah sistem juga dapat diartikan sebagai seperangkat hal yang berjalan bersama sebagai bagian dari mekanisme atau jaringan interkoneksi.

Sedangkan kesisteman adalah suatu meta-konsep atau meta-disiplin, dimana formalitas dan proses dari keseluruhan disiplin ilmu dan pengetahuan sosial dapat dipadukan dengan berhasil (Gigh dan Carnavayal, dalam Barusman, 2017)⁶. Pemikiran sistem selalu mencari keterpaduan antar bagian melalui pemahaman yang utuh, maka diperlukan suatu kerangka pikir baru yang terkenal sebagai pendekatan sistem (*System Approach*).

Terdapat beberapa definisi pendekatan sistem, antara lain, pendekatan sistem adalah pendekatan terpadu yang memandang suatu objek atau masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai bagian dari suatu sistem. Pendekatan sistem mencoba menggali elemen-elemen terpenting yang memiliki kontribusi signifikan terhadap tujuan sistem. Hasil suatu sistem secara keseluruhan dapat ditingkatkan bila bagian-bagian komponennya dapat diintegrasikan. Dengan kata lain adalah adanya hubungan timbal balik antar bagian atau sub sistem, hirarki bagian-bagian sistem, umpan balik, kontrol, batasan, dan lingkungan sistem (Ikatinasari dalam Barusman, 2017)⁶.

Pendekatan sistem adalah dasar rekayasa sistem. Hal ini sangat penting untuk *System*, *Systems Thinking*, *Systems Methodology*, *Systems Design* dan *Systems Engineering*. Pendekatan sistem adalah paradigma pemecahan masalah. Artinya, pendekatan sistem menganggap bahwa atribut keseluruhan sistem digunakan untuk mencapai tujuan suatu sistem, yaitu untuk memecahkan masalah. Pendekatan sistem diperkenalkan pada tahun 1950an. Biasa digunakan dalam psikologi, sosiologi, Ilmu politik, ekologi, yurisprudensi, sistem pemikiran dan rekayasa sistem. Prinsip pendekatan sistem dapat diterapkan pada semua bidang tersebut. Pendekatan sistem berkaitan dengan Sistem Terbuka dan Tertutup. Aspek penting dari Sistem Terbuka adalah mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka dan dengan sistem lain dalam lingkungan hidupnya. Sedangkan Sistem

Tertutup hanya berinteraksi dengan lingkungannya saja (Jackson, dalam Barusman 2017)⁶.

Pendekatan sistem merupakan cara penyelesaian persoalan yang dimulai dengan dilakukannya identifikasi terhadap adanya sejumlah kebutuhan sehingga dapat menghasilkan suatu operasi dari sistem yang dianggap efektif (Eriyatno dalam Barusman, 2017)⁶. Pendekatan kesisteman mengutamakan kajian struktur sistem baik yang bersifat penjelasan maupun sebagai pendukung bagi penyelesaian persoalan.

Kajian sistem dimulai dengan identifikasi terhadap adanya sejumlah kebutuhan sehingga dapat dihasilkan suatu operasi dari sistem. Dalam pendekatan sistem umumnya telah ditandai dengan: (1) Pengkajian terhadap semua faktor yang berpengaruh dalam rangka mendapatkan solusi untuk mencapai tujuan, dan (2) Adanya model-model untuk membantu pengambilan keputusan lintas disiplin, sehingga permasalahan yang kompleks dapat diselesaikan secara komprehensif (Eriyatno dalam Barusman, 2017)⁶. Untuk dapat bekerja secara sempurna suatu pendekatan sistem mempunyai delapan unsur yang meliputi (1) metodologi untuk perencanaan dan pengelolaan, (2) suatu tim yang multidisipliner, (3) pengorganisasian, (4) disiplin untuk bidang yang non-kuantitatif, (5) teknik model matematik, (6) teknik simulasi, (7) teknik optimisasi dan (8) aplikasi komputer) (Eriyatno dalam Barusman, 2017)⁶.

Metode sistem pada prinsipnya melalui enam tahap analisis sebelum tahap sintesa (rekayasa), meliputi: (1) analisis kebutuhan, (2) identifikasi sistem, (3) formulasi masalah, (4) pembentukan alternatif sistem, (5) determinasi dari realisasi fisik, sosial dan politik, (6) penentuan kelayakan ekonomi dan keuangan (Ikatinasari dalam Barusman, 2017)⁶. Pendekatan sistem dicirikan oleh adanya suatu metodologi perencanaan atau pengelolaan, bersifat multi disiplin terorganisir, adanya penggunaan model matematik, berpikir secara kualitatif, optimasi serta dapat diaplikasikan dengan komputer. Pendekatan sistem menggunakan keadaan nyata ataupun penyederhanaan sistem nyata untuk pengkajian suatu masalah.

Aturan berikut ini merupakan elemen dari pendekatan sistem (Jackson, dalam Barusman 2017)⁶ yaitu:

a. Identifikasi Elemen Sistem

Kumpulan elemen yang saling berinteraksi merupakan *system of interest* (SOI). SOI ini bisa berinteraksi dengan sistem lainnya di lingkungannya. Ketika sebuah sistem berinteraksi dengan sistem lain, kombinasi sistem merupakan sistem dari sistem. Elemen sistem terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manusia, proses, gagasan konseptual, atau kombinasi dari keduanya.

b. Memisahkan Elemen menjadi Elemen yang Lebih Kecil

Elaborasi elemen menjadi elemen yang lebih kecil memungkinkan sistem dipandang sebagai hierarki. Meskipun sebuah sistem dapat dilihat dalam banyak hal, pandangan secara hierarki adalah salah satu yang lebih umum. Pengelompokan secara hierarki mengurangi persepsi komplikasi dan kompleksitas.

c. Pengelompokan Elemen

Pengelompokan elemen dalam sistem merupakan sub-sistem. Sub-sistem ini memposisikan diri pada tingkat yang sesuai dengan masalah yang dipecahkan. Setiap pengelompokan, atau sub-sistem, biasanya diidentifikasi oleh fungsi yang dilakukan sub-sistem ini.

d. Identifikasi Batasan Sistem

Batasan sistem sangat penting untuk menentukan sistem itu sendiri. Batas tersebut menggambarkan keterpusatan sistem yang diminati dari lingkungannya.

e. Identifikasi Fungsi Setiap Elemen

Setiap sistem buatan manusia memiliki tujuan dan tujuan ini tercermin dalam identifikasi fungsi sistem. Selanjutnya, setiap

elemen dari sistem juga memiliki fungsi. Sebuah sistem dan elemen-elemennya mungkin memiliki banyak fungsi dan beberapa elemen sehingga bisa melakukan fungsi tunggal secara bersamaan.

f. Identifikasi Interaksi antar Elemen

Pendekatan sistem memandang dunia sebagai sistem dan subsistem yang berinteraksi.

g. Definisi Lingkungan Sistem

Lingkungan sistem sangat penting bagi sistem terbuka karena sistem terbuka. Definisi lingkungan sistem memungkinkan perancang sistem memperhitungkan konteks dan situasi dinamis dan semua perubahan, pengaruh dan faktor lainnya.

h. Sintesis Sistem

Sintesis adalah konstruksi dari keseluruhan sistem. Sintesis memungkinkan pilihan alternatif pada setiap tingkat hirarki. Pada akhirnya, sintesis sistem kepentingan akan menghasilkan efektivitas sistem secara maksimal dengan solusi yang seimbang yang memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Sintesis menggunakan pengulangan sebagai alat penyempurnaan dan konvergensi. Sintesis mengarah pada solusi efektif dan hemat biaya. Pandangan holistik adalah dasar dari pendekatan sistem. Dengan pendekatan sistem titik awal adalah keseluruhan sistem. Holisme adalah filosofi bahwa sistem dapat dipahami secara keseluruhan secara keseluruhan. Metode holistik terdiri dari metode yang mempertimbangkan beberapa elemen sistem dan keterkaitannya dalam konteks keseluruhan. Metode ini digunakan, misalnya untuk membangun arsitektur dasar sistem. Holisme juga mencakup evaluasi lingkungan pada keseluruhan sistem dan dengan pertimbangan risiko sistem.

i. Membuktikan Sistem

Membuktikan adalah bagian penting dari pendekatan sistem. Membuktikan bahwa keseluruhan sistem solusi berjalan dengan efektifitas optimum di lingkungan operasionalnya, saat berinteraksi dengan sistem lain di lingkungan itu, untuk memecahkan masalah yang mendorong terciptanya. Ada dua bagian untuk membuktikan: verifikasi dan validasi.

j. Identifikasi Karakteristik yang Muncul dari Suatu Sistem

Karakteristik yang muncul adalah sifat keseluruhan yang tidak terkait secara eksklusif dengan bagian yang berinteraksi, dan tidak ada artinya dalam bahasa yang sesuai pada tingkat bagian yang berinteraksi tersebut. Karakteristik yang muncul diidentifikasi dengan mengevaluasi interaksi sistem dengan lingkungannya.

1.3.1 Mengapa diperlukan Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem awalnya muncul dikarenakan beberapa hal berikut ini yaitu adanya peningkatan masalah kompleksitas organisasi atau bisa dikatakan kelembagaan), adanya kemajuan dalam bidang manajemen, adanya kebutuhan metode baru untuk permasalahan rumit, munculnya permasalahan rumit dan tidak terstruktur, sehingga tidak ada pemecahan tunggal, sistem masyarakat terasa semakin rumit dan perilakunya sulit dimengerti, adanya kebutuhan pengendalian dan antisipasi perubahan, adanya perkembangan pendekatan sistem dari verbal (kualitatif) menjadi terstruktur (kuantitatif) dan dominasi sistem dalam kehidupan terutama dalam masyarakat industri.

Selain untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah, menurut Reed dalam Barusman (2017)⁶ pendekatan sistem juga digunakan untuk:

- a. Identifikasi sebuah sistem. Bagaimanapun, tidak semua hal adalah sistem. Beberapa sistem sederhana dan mudah ditebak, sementara yang lain bersifat kompleks dan dinamis.
- b. Menjelaskan perilaku atau sifat keseluruhan sistem. Fokus ini secara keseluruhan adalah proses sintesis.
- c. Menjelaskan perilaku atau sifat dari hal yang akan terjadi dijelaskan dalam hal peran atau fungsi dari keseluruhan.

Menurut Simatupang (1995); Eriyatno (1999) dan Hadiguna (2009) dalam (Barusman, 2017)⁶ terdapat beberapa alasan mengapa perlu melakukan pendekatan sistem dalam mengkaji suatu permasalahan, yaitu: 1) memastikan bahwa pandangan yang menyeluruh telah dilakukan, 2) mencegah analisis menyajikan secara dini definisi masalah yang spesifik, 3) mencegah analisis menerapkan secara dini model tertentu, 4) agar lingkungan masalah didefinisikan secara luas sehingga berbagai kebutuhan yang relevan dapat dikenali. Dalam menganalisa permasalahan ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu melihat masalah sebagai suatu sistem, mengenali sistem lingkungan, melakukan identifikasi sub sistem yang ada pada sistem, melakukan analisa bagian-bagian sistem secara berurutan yaitu dengan mengevaluasi tujuan, membandingkan keluaran dengan tujuan, mengevaluasi manajemen, mengevaluasi sistem pengolahan informasi, mengevaluasi sumber daya dan mengevaluasi proses transformasi. Dengan begitu permasalahan bisa diselesaikan secara menyeluruh atau didapatkan solusi yang menyeluruh untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Menurut Eriyatno dalam Barusman (2017)⁶, untuk mengerti, merancang dan atau mengembangkan operasi dari suatu sistem total, seorang analis harus mempunyai pengetahuan yang tidak saja bidang ilmunya, misalnya ekonomi, tapi juga ilmu lainnya. Lebih lanjut, untuk mengetahui dan mengembangkan sistem dengan cara menggunakan hubungan-hubungan yang terjadi bilamana komponen-komponen yang tersebar dikombinasikan, maka seorang analis harus mampu

mengikuti dan menelaah rantai aliran kerja, aliran informasi dan aliran bahan.

Pendekatan *Systems Thinking* merupakan kebutuhan mutlak untuk memahami dan berhasil di dunia yang kompleks saat ini. Salah satunya adalah penggunaan cara berpikir sistem dalam model kelembagaan.

1.3.2 Apa Apa Karakteristik Permasalahan yang Mengharuskan Penggunaan Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem diperlukan apabila kita menghadapi suatu masalah yang kompleks sehingga dan diperlukan analisa terhadap permasalahan tadi, untuk memahami hubungan bagian dengan bagian lain dalam masalah tersebut, serta kaitan antara masalah tersebut dengan masalah lainnya. Dengan kata lain masalah tersebut memiliki karakteristik: (1) kompleks; (2) dinamis; dan (3) probabilistik (Eriyatno dalam Barusman 2017)⁶. Sehingga dapat dirancang suatu solusi yang (1) Sibernetik (*cybernetic*), artinya berorientasi pada tujuan; (2) Holistik (*holistic*), yaitu cara pandang yang utuh terhadap kebutuhan sistem; dan (3) Efektif (*effective*), sehingga dapat dioperasionalkan.

1.3.3 Macam-Macam Pendekatan Sistem

Terdapat beberapa pendekatan untuk mengembangkan sistem, yaitu Pendekatan Klasik, Pendekatan Terstruktur, Pendekatan Dari Bawah Ke Atas, Pendekatan Dari Atas Ke Bawah.

a. Pendekatan Klasik

Pendekatan Klasik (*Classical Approach*) disebut juga dengan Pendekatan Tradisional (*Traditional Approach*) atau Pendekatan Konvensional (*Conventional Approach*). Metodologi Pendekatan Klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada **System Life Cycle**. Pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan akan berhasil bila mengikuti tahapan pada *System Life Cycle*. Permasalahan-permasalahan yang dapat timbul pada Pendekatan Klasik adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan perangkat lunak akan menjadi sulit
Pendekatan klasik kurang memberikan alat-alat dan teknik-teknik di dalam mengembangkan sistem dan sebagai akibatnya proses pengembangan perangkat lunak menjadi tidak terarah dan sulit untuk dikerjakan oleh pemrogram. Lain halnya dengan pendekatan terstruktur yang memberikan alat-alat seperti diagram arus data (*data flow diagram*), kamus data (*data dictionary*), tabel keputusan (*decision table*), diagram IPO, bagan terstruktur (*structured chart*) dan lain sebagainya yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak lebih terarah berdasarkan alat-alat dan teknik-teknik tersebut.
- b. Biaya perawatan atau pemeliharaan sistem akan menjadi mahal
Mahalnya biaya perawatan pada pendekatan sistem klasik disebabkan karena dokumentasi sistem yang dikembangkan kurang lengkap dan kurang terstruktur. Dokumentasi ini merupakan hasil dari alat-alat dan teknik-teknik yang digunakan. Karena pendekatan klasik kurang didukung oleh alat-alat dan teknik-teknik, maka dokumentasi menjadi tidak lengkap dan walaupun ada tetapi strukturnya kurang jelas, sehingga pada waktu pemeliharaan sistem menjadi kesulitan.
- c. Kemungkinan kesalahan sistem besar
Pendekatan klasik tidak menyediakan kepada analis sistem cara untuk melakukan pengetesan sistem, sehingga kemungkinan kesalahan-kesalahan sistem akan menjadi lebih besar.
- d. Keberhasilan sistem kurang terjamin
Penekanan dari pendekatan klasik adalah kerja dari personil-personil pengembang sistem, bukan pada pemakai sistem, padahal sekarang sudah disadari bahwa dukungan dan pemahaman dari pemakai sistem terhadap sistem yang sedang dikembangkan merupakan hal yang vital untuk keberhasilan proyek pengembangan sistem pada akhirnya.
Mulai awal tahun 1970 muncul suatu pendekatan baru disebut dengan Pendekatan Terstruktur. Pendekatan ini pada dasarnya mencoba menyediakan kepada analis sistem dengan alat-alat

dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem disamping tetap mengikuti ide dari *system life cycle*.

b. Pendekatan terstruktur (*Structured Approach*)

Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat (*tools*) dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Beberapa metodologi pengembangan sistem yang terstruktur telah banyak yang diperkenalkan baik dalam buku-buku, maupun oleh perusahaan-perusahaan konsultan pengembang sistem. Metodologi ini memperkenalkan penggunaan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem yang terstruktur.

Konsep pengembangan sistem terstruktur bukan merupakan konsep yang baru. Teknik perakitan di pabrik-pabrik dan perancangan sirkuit untuk alat-alat elektronik adalah dua contoh baru konsep ini yang banyak digunakan di industri-industri. Konsep ini memang relatif masih baru digunakan dalam mengembangkan sistem informasi untuk dihasilkan produk sistem yang memuaskan pemakainya. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan-permasalahan yang kompleks dalam organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat pada waktunya, sesuai dengan anggaran biayanya, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik (bebas kesalahan).

c. Pendekatan Dari Bawah Ke Atas (*Bottom-Up Approach*)

Pendekatan ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional dimana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Pendekatan ini ciri-ciri dari pendekatan klasik. Pendekatan dari bawah ke atas bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan istilah *data analysis*,

karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan diolah terlebih dahulu, informasi yang akan dihasilkan menyusul mengikuti datanya.

d. Pendekatan Dari Atas Ke Bawah (*Top-Down Approach*)

Pendekatan Dari Atas Ke Bawah (*Top-Down Approach*) dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah dilakukannya analisis kebutuhan informasi. Setelah kebutuhan informasi ditentukan, maka proses turun ke pemrosesan transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data, prosedur-prosedur operasi dan kontrol. Pendekatan ini juga merupakan ciri-ciri pendekatan terstruktur. Pendekatan atas-turun bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan istilah *decision analysis*, karena yang menjadi tekanan adalah informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen terlebih dahulu, kemudian data yang perlu diolah didefinisikan menyusul mengikuti informasi yang dibutuhkan.

e. Pendekatan Sepotong (*Piecemeal Approach*)

Pengembangan yang menekankan pada suatu kegiatan/ aplikasi tertentu tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tidak memperhatikan sasaran organisasi secara global (memperhatikan sasaran dari kegiatan atau aplikasi itu saja).

f. Pendekatan Sistem (*Systems Approach*)

Memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan/aplikasinya dan menekankan sasaran organisasi secara global.

g. Pendekatan Sistem menyeluruh (*Total-System Approach*)

Pendekatan pengembangan sistem serentak secara menyeluruh, sehingga menjadi sulit untuk dikembangkan (ciri klasik).

h. Pendekatan Modular (*Modular Approach*)

Pendekatan dengan memecah sistem kompleks menjadi modul yang sederhana, sehingga sistem lebih mudah dipahami dan dikembangkan, tepat waktu, mudah dipelihara (ciri terstruktur)

i. Lompatan jauh (*Great Loop Approach*)

Pendekatan yang menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih, sehingga mengandung resiko tinggi, terlalu mahal, sulit dikembangkan karena terlalu kompleks.

j. Pendekatan Berkembang (*Evolutionary Approach*)

Pendekatan yang menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja dan terus dikembangkan untuk periode berikutnya mengikuti kebutuhan dan teknologi yang ada.

1.4 Cara Berpikir Sistem (*Systems Thinking*)

Sistem telah berkembang menjadi semakin kompleks, dinamis, saling terhubung, dan terotomatisasi. Dengan adanya *systems thinking*, akan tersedia suatu filosofi *holistic* dengan kemampuan membuka struktur sistem yang *critical* seperti batasan (*boundaries*), input, output, *spatial orientation*, struktur proses, dan interaksi yang kompleks antara sistem dengan lingkungannya. Pemahaman mengenai struktur sistem tersebut akan memudahkan *system engineers* dalam mendesain serta menghasilkan sistem yang menekankan pada kapabilitas yang tinggi bagi konsumennya (Parnell dalam Barusman, 2017)⁶. *Systems thinking* dapat dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu, dengan berbagai pendekatan, metode, dan tools. Menurut Rubenstein-Montano dkk dalam Barusman (2017)⁶, *systems thinking* diartikan sebagai suatu kerangka konseptual untuk menyelesaikan problem dengan memandang problem secara utuh. Jika diformulasikan, menurut Dorner dalam Barusman (2017)⁶:

Systems Thinking = Systemic, Complex Situation + Situation-Adequate Thinking

Systems Thinking merupakan suatu paradigma pandangan dunia yang menggarisbawahi sebuah teori dan methodology dari subjek ilmiah tertentu. *Systems Thinking* lebih cenderung mengajak untuk berpikir secara sintesis dan holistic. *Systems Thinking* juga merupakan pandangan dunia dan sebuah proses yang dapat digunakan baik untuk pengembangan dan pemahaman suatu sistem dan untuk pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Pertama, pemikiran sistem adalah pandangan bahwa sistem dan situasi masalah tidak dapat diatasi dengan mengurangi komponen dari sistem itu sendiri. Keunikan dan perilaku sistem hanya hadir saat sistem digabungkan bukan terdiri dari komponen individual. Perilaku sistem muncul sebagai hasil interaksi dan hubungan antar bagian. Sebagai tambahan, *Systems Thinking* mengakui interaksi yang kuat antara komponen sistem, dan perilaku yang muncul dan konsekuensi yang tidak diinginkan yang mungkin timbul dari interaksi ini.

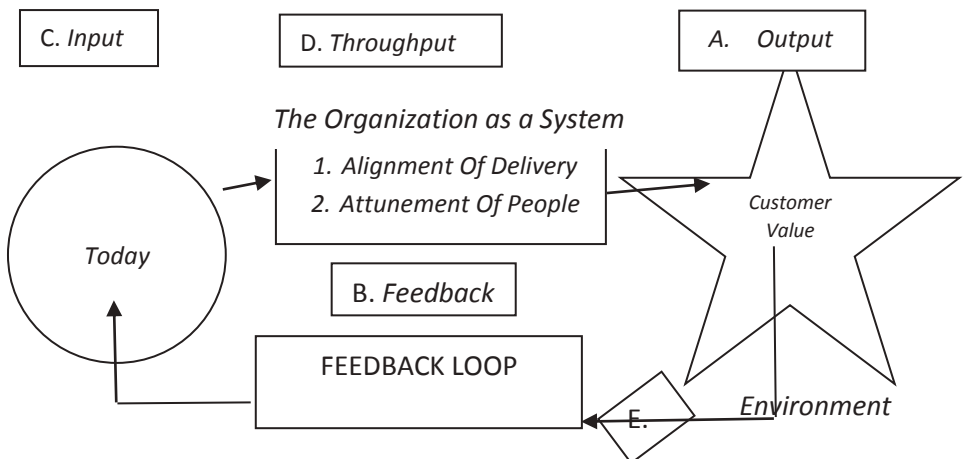
Kedua, *Systems Thinking* adalah sebuah proses metode pendekatan yang berurut untuk memahami situasi masalah dan mengidentifikasi solusi untuk masalah ini. Proses ini mencakup penilaian sistem di lingkungannya, mempertimbangkan konteks eksternal (Senge dalam Barusman, 2017)⁶. Di tengah kompleksitas dan kebingungan dalam menghadapi situasi masalah, *Systems Thinking* memajukan pemahaman bahwa solusi dapat diperoleh melalui sistem pembelajaran (Checkland 1993; Senge 2006 dalam Barusman, 2017)⁶. Adapun *outcome* dari *Systems Thinking* sangat bergantung pada pendefinisian sistem yang diamati, karena *Systems Thinking* memeriksa hubungan antar berbagai bagian pada sistem yang didefinisikan tersebut. Ketiga adalah *Inquiry* atau penyelidikan, yaitu bagaimana membangun solusi berdasarkan penyelidikan sistemik. *Systems Thinking* muncul dari keterlibatan banyak disiplin (multidisiplin) dalam system sehingga terbentuk transdisiplin (Jackson dalam Barusman, 2017)⁶.

Inti dari *Systems Thinking* adalah bawah kompleksitas yang ada pada dunia nyata dapat kita pahami dan sederhanakan jika kita melihat segala sesuatu secara menyeluruh (Sherwood dalam Barusman, 2017)⁶. Salah satu tantangan dalam *Systems Thinking* adalah memahami sistem itu sendiri. Sistem adalah satu set dari dua atau lebih elemen yang memenuhi tiga kondisi berikut.

1. Perilaku setiap elemen berpengaruh terhadap perilaku keseluruhan.
2. Perilaku elemen dan pengaruhnya terhadap keseluruhan saling bergantung satu sama lain.
3. Elemen dari sebuah sistem sangat terhubung sehingga subkelompok independennya tidak dapat terbentuk.

Sebuah sistem adalah keseluruhan yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian independen. Dari sini, dua sifat terpentingnya berasal: setiap bagian dari sebuah sistem memiliki sifat yang hilang saat dipisahkan dari sistem, dan setiap sistem memiliki beberapa sifat yang penting yang tidak bisa digantikan (Ackoff dalam Barusman 2017)⁶.

Menurut Haines dalam Barusman (2017)⁶, *Systems Thinking* merupakan *A New Orientation To Life, From Complexity To Simplicity*. Dengan ilustrasi sebagai berikut:



Gambar 1.4 *Systems Thinking A New Orientation To Life*

Sumber: Haines dalam Barusman (2017)⁶

Ilustrasi tersebut merupakan kunci untuk menciptakan “*The Learning Organization*”.

Contoh *Systems Thinking* di dalam pelaksanaan manajerial terdapat unsur kepemimpinan atau *leadership*. Kepemimpinan dan *Systems Thinking* sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada zaman sekarang ini, perubahan terjadi disetiap waktu dan di belahan dunia manapun. Sehingga semua pemimpin akan menghadapi tantangan bagaimana memimpin pada dunia yang dinamis. Jika diumpamakan satu sistem yaitu organisasi. Di dalam organisasi pasti banyak terdapat pemimpin yang memimpin bidangnya masing-masing. Pemimpin yang baik harus mengetahui bagaimana seharusnya pemimpin mengkomunikasikan strategi perusahaan? Bagaimana mereka menyelaraskan seluruh organisasi dan meminimalkan aktivitas yang kurang bermanfaat sehingga semua karyawan bekerja secara efisien untuk menuju visi bersama? Bagaimana mereka mengukur keefektifan organisasi? Bagaimana mereka menyebarkan budaya kecekatan untuk merespon dengan cepat mengubah iklim bisnis yang mereka hadapi? Sebagian besar pemimpin mempertanyakan hal ini setiap hari. Dan agar berhasil mereka perlu memikirkan setiap hal secara keseluruhan dan tersistem.

Seluruh sistem perusahaan dapat berhasil hanya jika para pemimpin berkolaborasi dan bekerjasama dengan seluruh departemen fungsional yang juga dikategorikan sebagai subsistem. Keseluruhan sistem bisa gagal jika kepemimpinan pada top manajemen gagal. Dengan menggunakan *Systems Thinking*, seorang pemimpin harus mengevaluasi tidak hanya konsekuensi taktis setiap keputusan yang diambil, tapi juga konsekuensi strategisnya. (Homsy et al dalam Barusman, 2017)⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sistem dalam suatu perusahaan juga terdiri dari sub-sub sistem yang saling terkait. Hubungan antar sub sistem yang saling terkait ini bisa dikatakan sebagai pola kelembagaan. Pola kelembagaan juga melibatkan kompleksitas hubungan antara aktor yang terlibat didalamnya. Kemudian bagaimana dengan ekonomi kelembagaan?

Ekonomi kelembagaan hanya fokus pada penyelesaian persoalan ekonomi yang spesifik sehingga dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan. Ekonomi kelembagaan mencakup dua arus hubungan yaitu, antara ekonomi dan kelembagaan dan sebaliknya. Hubungan antara ekonomi dan kelembagaan berarti mencari tahu dampak dari kelembagaan terhadap ekonomi. Sebaliknya hubungan antara kelembagaan dengan ekonomi berarti, pengembangan kelembagaan merespon pengalaman-pengalaman ekonomi.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa ekonomi kelembagaan secara umum lebih memilih pendekatan induktif dibandingkan deduktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan dari khusus ke umum, yang mencoba untuk menjelaskan dan mengembangkan teori, meskipun mereka tidak ada teori umum yang dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan ekonomi.

Referensi

1. David, Fred R. 2010. *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta : PT. Prenhallindo [3]
2. Ketchen Jr. D. et all. 2009. "Strategy 2008-2009". New York: McGraw-Hill.[2]
3. Wheelen, Thomas L., Hunger, J. David. 2010. *Strategic Management and Business Policy Achieving Sustainability*. Twelfth Edition. Pearson.[1]
4. Suwandiyanto, M. 2010. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Online.[4]
5. Yustika, A.E. 2012. *Ekonomi Kelembagaan, Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Erlangga [5]
6. Barusman, M.Y.S. 2017. *Soft Systems Methodology, Solusi Untuk Kompleksitas Manajemen*. UBL Press. Universitas Bandar Lampung. [6]

BAB II

Pelebagaan Ekonomi (Peraturan yang disepakati bersama)

Lembaga merupakan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu usaha atau merupakan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sedangkan ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Lingkungan Ekonomi adalah kondisi ekonomi di Negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut.

Kemudian bagaimana dengan ekonomi kelembagaan?. Ekonomi kelembagaan merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun tataran mikro. Sedangkan pelembagaan ekonomi mengandung arti

membentuk sebuah lembaga yang mengkoordinir dan mengendalikan jalannya perekonomian dalam suatu lingkungan ekonomi.

Penerapan pelembagaan ekonomi bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari yang paling formal sampai yang tidak begitu formal. Mulai dari bentuk perusahaan maupun koperasi.

2.1 Perusahaan

Perusahaan menurut UU No. 8 Pasal 1 ayat 1 tahun 1997¹ merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Ricky W Griffin dan Ronald J Ebert (2007)² Perusahaan adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba (selisih antara penerimaan dengan biaya-biaya bisnis). Selain itu perusahaan juga merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.

Sehingga pengertian perusahaan adalah organisasi yang melakukan kegiatan usaha dan menyediakan barang dan jasa untuk memperoleh laba atau keuntungan. Perusahaan bisa dibagi jenisnya berdasarkan badannya. Ada perusahaan yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

2.1.1 Badan Usaha dan Badan Hukum

Membentuk badan usaha merupakan dasar penting yang harus dilakukan apabila kita akan membangun suatu bisnis sendiri. Keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan baik perusahaan kecil, menengah atau besar akan

melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Meskipun begitu, dalam menjalankan suatu usaha tidak diwajibkan bagi seorang pengusaha untuk mendirikan sebuah badan hukum. Hal tersebut merupakan suatu pilihan bagi pengusaha untuk menentukan bentuk dari penyelenggaraan usaha yang cocok untuk kegiatan usaha yang dijalankannya. Namun, untuk beberapa jenis usaha tertentu yang memang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan harus berbentuk badan usaha yang merupakan badan hukum seperti Bank, Rumah Sakit, penyelenggara satuan pendidikan formal.

Badan usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi. Sebuah usaha /bisnis sendiri dapat dikatakan berbadan hukum apabila memiliki “Akta Pendirian” yang disahkan oleh notaris disertai dengan tanda tangan di atas meterai dan segel.

Maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan dengan status badan hukum memiliki kepemilikan yang lebih rumit dibandingkan perusahaan perseorangan / tunggal dan diduga memiliki beragam permasalahan yang timbul dari efek kepemilikan. Perusahaan yang bersifat go public memiliki karakteristik keuntungan berupa sifat informasi terbuka yang dapat membantu investor dalam mempertimbangkan jenis investasi yang menguntungkan.

2.1.2 Jenis Perusahaan

Jenis-jenis Perusahaan dapat diklasifikasikan dari beberapa bentuk. Salah satunya yaitu klasifikasi perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya yaitu:

2.1.2.1 Perusahaan Badan Hukum

Merupakan perusahaan yang dapat dimiliki oleh swasta maupun negara, dapat berupa perusahaan persekutuan. Jenis perusahaan ini didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha baik swasta maupun negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum.

Jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di semua bidang perekonomian (Perindustrian, perdagangan, Perjasaan, dan pembiayaan). Contohnya: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan (Persero).

2.1.2.2 Perusahaan Bukan badan Hukum

Merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan swasta, dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan. Contohnya : Perusahaan Perseorangan, Perskutuan Perdata, Firma, CV. Perusahaan bukan badan hukum merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama, jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, dan perjasaan).

Salah satu contoh perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, apabila bisnis mengalami kerugian, pemilik lah yang harus menanggung seluruh kerugian itu.

Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat perdagangan bentuk perusahaan perseorangan diterima masyarakat. Dalam praktik, sebagian perusahaan persorangan pendiriannya menggunakan akta otentik. Beberapa karakteristik dari Perusahaan Perseorangan adalah:

- Aset perusahaan hanya dimiliki satu orang.
- Bertanggungjawab sendiri atas seluruh hutang perusahaan
- Pekerja yang ada merupakan wakil atau pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan pemberian kuasa atau perjanjian kerja
- Contoh perusahaan perseorangan adalah Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).

Perusahaan perseorangan termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali (pasal6 UU WDP):

- Diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga.
- Tidak wajib memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan instansi yang berwenang.
- Benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- Bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Contoh perusahaan perorangan adalah usaha kecil atau UKM (Usaha Kecil Menengah) seperti bengkel, binatu (laundry), salon kecantikan, rumah makan, persewaan komputer dan internet, toko kelontong, tukang bakso keliling, dan pedagang asongan.

Jika dibagi berdasarkan kepemilikannya, maka perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Perusahaan milik negara, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh negara.
- Koperasi, yakni perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh anggotanya.
- Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh sekelompok orang luar (di luar negara).

2.2 Koperasi

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama (O' Sullivan, 2003)³. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama (Hnas, 1980)⁴. Prinsip koperasi terbaru yang

dikembangkan *International Cooperative Alliance* (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah

- Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
- Pengelolaan yang demokratis,
- Partisipasi anggota dalam ekonomi,
- Kebebasan dan otonomi,
- Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi Hendar et al (2005)⁵.

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- Kemandirian
- Pendidikan perkoperasian
- Kerjasama antar koperasi

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012⁶, yaitu:

- Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK)

2.2.1 Jenis Koperasi

2.2.1.1 Koperasi pekerja

Koperasi pekerja atau koperasi produsen merupakan koperasi yang dimiliki dan secara demokratis dikontrol oleh "pekerja-pemiliknya". Tidak ada pemilik luar dalam koperasi pekerja "murni", hanya pekerja yang memiliki bagian (Saham) kepemilikan bisnis tersebut. Biasanya anggota masyarakat atau Investor kapitalis juga memiliki bagian (saham) kepemilikan. Dalam praktiknya, kontrol oleh pekerja-pemilik dapat dilaksanakan melalui kepemilikan individual,

kolektif, atau mayoritas; atau penggunaan hak pilih individu, kolektif, atau mayoritas (melalui prinsip satu anggota satu suara). Bagaimanapun, koperasi pekerja memiliki karakteristik mayoritas tenaga kerjanya memiliki saham kepemilikan, dan mayoritas saham kepemilikan dimiliki oleh tenaga kerja. Keanggotaan tidak selalu bersifat wajib bagi pekerjanya, tapi secara umum hanya pekerja yang dapat menjadi anggota baik secara langsung (sebagai pemegang saham) atau tidak langsung melalui keanggotaan perwalian yang memiliki perusahaan.

Dampak ideologi politik dalam praktik koperasi akan membatasi perkembangan koperasi di berbagai negara. Di India, terdapat bentuk koperasi pekerja yang menuntut kewajiban keanggotaan bagi semua pekerjanya dan kewajiban bekerja bagi semua anggota. Bentuk tersebut terdapat dalam Rumah Kopi India. Di tempat seperti Britania Raya, kepemilikan umum (kepemilikan kolektif tak terpisahkan) populer pada 1970-an. Perkumpulan Koperasi baru menjadi legal di Britania setelah disahkannya Stanley's Act pada 1852. Pada 1865 terdapat 651 perkumpulan terdaftar dengan total keanggotaan mencapai 200.000 orang. Sekarang, terdapat lebih dari 400 koperasi pekerja di Britania, Suma (Wholefoods) menjadi adalah koperasi pekerja terbesar disana dengan omset sebesar £24 juta Pound sterling.

2.2.1.2. Jenis Koperasi menurut fungsinya

- Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
- Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

- Koperasi Produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
- Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*).

2.2.1.3 Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

- Koperasi Primer
Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.
- Koperasi Sekunder
Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
 - koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
 - gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
 - induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya

- Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.

- Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

2.2.2 Koperasi di Indonesia

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵ Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.⁵ Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).⁵

2.2.2.1 Sejarah koperasi di Indonesia

Gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya (Djagh, 1980)⁷. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak.⁷ Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.⁷

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi).⁷ Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang

memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.⁷ Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman.⁷ Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolff van Westerrode, seorang asisten residen Belanda.⁷ De Wolff van Westerrode sewaktu cuti berhasil

mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabunganyang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.⁷ Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon.⁷ Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi.⁷ Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik.⁷ Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi.^[7] Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank – bank Desa , rumah gadaian *Centrale Kas* yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).⁷ Semua itu adalah badan usaha Pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.⁷

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:⁷

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian untuk mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan berkoperasi (Khoiril, 2013)⁸.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Soetomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging*, dan pada tahun 1927 *Regeling Inlandsche Cooperatieve*. Pada tahun 1927 dibentuk Sarekat Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha Pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.⁷ Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi *kumiyai*. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.⁷

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.⁷ Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda)⁸.

2.2.2.2 Fungsi dan peran koperasi Indonesia

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.⁴

2.3 Ekonomi Kelembagaan dan Pembangunan Pedesaan

Jika berbicara mengenai pembangunan, khususnya di Negara berkembang, tidak mungkin lepas dari wilayah pedesaan. Bahkan pembangunan di Negara berkembang harus melihat wilayah pedesaan sebagai fokus dan target pembangunan. Karena sebagian besar penduduk di Negara berkembang bermukim di daerah pedesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin.

Setiap desa memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang social misalnya, tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator social di desa yang bisa dipastikan masih rendah. Selain pendidikan, tingkat kesehatan juga bisa dikategorikan rendah. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya balai pengobatan di banyak desa, serta akses yang cukup sulit dijangkau. Oleh karena itu tingkat kematian di desa masih tinggi akibat kurangnya akses pengobatan dan penyembuhan.

Kemudian, di desa, budaya serta adat istiadatnya masih sangat kental. Pola hidup masyarakat di desa yang tertinggal masih mewarisi tradisi nenek moyangnya.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, karakter ekonomi desa, diindikasikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, sedikitnya kesempatan kerja di luar pertanian dan jauh dari pasar. Dan dari sudut pandang budaya. Sejalan dengan Indonesia, masyarakat di desa umumnya memiliki semangat berwirausaha, memiliki etos kerja yang tinggi, serta perilaku yang baik dalam sehari-harinya.

Dalam pembangunannya, menurut Yustika (2015)⁹, terdapat lima fase utama yang wajib dilakukan agar suatu desa bisa setara dengan daerah lainnya. Pertama yaitu memproduksi barang dan jasa yang beranekaragam, agar terjadi transaksi antar penduduk di desa tersebut. Kedua, adanya penciptaan dan penguatan pasar. Banyaknya variasi produksi di suatu daerah, tidak akan bermakna jika tidak dapat diserap oleh pasar. Oleh karena itu, penciptaan produk dan jasa yang bervariasi harus disertai dengan penciptaan pasar yang baru. Ketiga, penciptaan usaha pengolahan. Seringkali nilai tambah atas suatu produk di suatu daerah yang tidak terlihat karena produk dijual dalam bentuk bahan baku atau bahan mentah. Keempat, penguatan peranan organisasi desa, baik yang bersifat formal maupun informal. Kelima, pembangunan infrastruktur.

2.3.1 Industrialisasi Pedesaan

Usaha yang ada di wilayah pedesaan, biasanya berkaitan dengan pertanian, peternakan dan perikanan. Maka, jika pembangunan dimaksudkan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat, maka dalam konteks Negara Indonesia pembangunan harus ditekankan pada wilayah pedesaan. Karena pertama, pertanian, peternakan dan perikanan merupakan sektor yang bertanggungjawab menyediakan kebutuhan pangan masyarakat sehingga eksistensinya mutlak diperlukan. Kedua, sektor pertanian, peternakan dan perikanan ikut menyediakan bahan baku bagi sektor industri sehingga proses produksi aktivitas industri dapat terus berlangsung. Ketiga, sektor pertanian, peternakan dan perikanan turut memberi kontribusi meningkatkan besarnya devisa Negara dengan komoditas yang dapat diekspor. Keempat, pertanian, peternakan dan perikanan merupakan sektor yang menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan, 51% dari seluruh angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian.

Boeke dalam Yustika (2015)⁹, menjelaskan bahwa wilayah pedesaan biasanya dideskripsikan sebagai tempat bagi orang-orang untuk bekerja di sektor pertanian, Kemudian lebih sempit lagi, desa

adalah suatu masyarakat petani yang mencukupi hidup sendiri (swasembada). Rumah tangga petani sebagian besar hidupnya tergantung dari keberadaan lahan yang dimiliki.

Pentingnya perekonomian mandiri suatu desa akan berdampak pada pembangunan desa. Untuk itu diperlukan industrialisasi pedesaan. Agar keuntungan ekonomi baik sektor pertanian, peternakan dan perikanan di desa, tidak lebih banyak jatuh kepada pemilik modal atau pedagang, tetapi kepada pelaku tani, ternak dan perikanan.

Scott dalam Yustika (2015)⁹, menyatakan bahwa pertumbuhan komersialisasi di desa khususnya sektor pertanian, peternakan dan perikanan menjadi rumit karena beberapa hal, yaitu;(i) sektor kaum tani menjadi tidak terlindungi dari ketidakpastian baru yang disebabkan oleh ekonomi pasar yang memperbesar variasi penghasilannya, (ii) bagi sebagian kaum tani, nilai desa dan kekerabatan sebagai pemberi perlindungan dan pemikul risiko secara bersama-sama, (iii) berbagai pekerjaan tambahan untuk menyambung hidup menjadi berkurang atau hilang sama sekali, (iv) pemilik tanah yang sebelumnya memikul sebagian risiko pertanian dapat mengutip lebih banyak lagi dari petani lewat sewa dan memungut bagian penghasilan penggarap, dan (v) Negara sering menaikkan penerimaan pajak melalui pungutan dari kegiatan pertanian.

2.3.2 Sektor Tradisional dan Modern di Perekonomian Desa

Boeke dalam Yustika (2015)⁹, menyatakan bahwa perekonomian di Indonesia, terbagi dalam dua sektor tradisional dan modern yang saling tidak berhubungan. Namun secara umum, sektor pertanian di Indonesia bisa dikategorikan tradisional. Karena pengerjaan operasional pertaniannya tidak memakai manajemen modern dengan mempertimbangkan factor biaya dan keuntungan.

Lima karakteristik umum dari pertanian tradisional menurut Norton dan Alwang dalam Yustika (2015)⁹, yaitu; pertama, pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pertanian dicampurkan dengan keputusan keluarga. Kedua, pemanfaatan

tenaga kerja dan lahan. Lahan untu petani tradisional biasanya tidak luas, sekitar 1-3 hektar. Ketiga sifatnya musiman, siklus pertanian berdasarkan variasi musim yang ada. Keempat, produktivitas dan efisiensi. Dan Kelima, sangat menjunjung rasionalitas dan memperhatikan risiko . Dengan ciri-ciri tersebut, maka sulit untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia, karena keadaanya yang serba sempit.

Namun, industrialisasi pedesaan sangat mungkin untuk dikembangkan, karena adanya dua karakteristik penting. Pertama, luas lahan pertanian yang sempit membuat rasionalisasi pengolahan produk menjadi alternative terbaik untuk meningkatkan pendapatan petani, yaitu dengan pembuatan sentra-sentra usaha pertanian kecil atau home industry. Kedua, memperkaya kegiatan pertanian pedesaan bukan hanya memproduksi barang-barang primer, tetapi mendiversifikasi kegiatan non-pertanian, walaupun inputnya masih bersumber dari produk pertanian.

Dengan dua ciri tersebut, pengembangan industrialisasi pedesaan akan memiliki nilai positif bagi sektor pertanian dengan munculnya nilai tambah dan bagi wilayah pedesaan berguna dalam emmberi variasi kegiatan per-ekonomian yang lebih beragam, sehingga penduduk desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan.

2.3.3 Pembangunan Sektor Finansial Pedesaan

Dalam setiap aktivitas ekonomi, pasti akan berhubungan dengan lembaga keuangan. Bagaimana dengan aktivitas ekonomi di desa?. Lembaga keuangan di desa dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Lembaga Keuangan Formal
- b. Lembaga Keuangan Semi-Formal
- c. Lembaga Keuangan Informal.

Di suatu Negara, lembaga keuangan formal biasanya secara operasional diatur dalam undang-undang (UU) perbankan dan diawasi oleh bank sentral. Lembaga keuangan tersebut bisa berupa bank pemerintah maupun bank swasta. Sedangkan Bank Semi-Formal

adalah perbankan yang tidak diatur dalam UU, tetapi diawasi dan dibuatkan suatu regulasi oleh lembaga pemerintah selain bank sentral. Lembaga keuangan formal dan informal memiliki ciri penting yang sama, yaitu tipe kesepakatan yang dibuat dalam bentuk sistem kontrak. Kontrak tersebut berisi tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Contoh lembaga keuangan formal yang sudah teruji di Indonesia terutama yang menjangkau wilayah pedesaan adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan lembaga keuangan semi-formal terdapat banyak sekali lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya BKD (Bank Kredit Desa), LDKP (Lembaga Dana Kredit Desa), dan KUD (Koperasi Unit Desa) (Holloh dalam Yustika (2015)⁹).

Lembaga keuangan informal, beroperasi di luar regulasi dan pengawasan lembaga pemerintah (Negara). Lembaga ini berisi kegiatan-kegiatan yang benar-benar di luar kelembagaan keuangan resmi dan sering tidak tercatat. Tidak hanya dalam bentuk uang, transaksi pada lembaga keuangan informal juga kadang dalam bentuk barang. Sehingga dengan karakternya yang fleksibel, membuat lembaga keuangan informal ini mampu bertahan di wilayah pedesaan.

Berbeda dengan lembaga keuangan formal dan semi-formal, lembaga keuangan informal sangat fleksibel. Misalnya hubungan antara kreditur dan debitur bersifat personal dan tidak ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Bahkan sistem kredit tidak membutuhkan kontrak sama sekali. Karena alasan tersebut juga, biasanya lembaga keuangan informal lebih mudah diterima oleh masyarakat pedesaan. Kasryno dalam Yustika (2015)⁹ menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga sumber kredit informal di wilayah pedesaan yaitu pemilik lahan, pelaku usaha (petani/nelayan/petambak,dll) dan pelepas pinjaman pedesaan (tengkulak).

Selain berbagai lembaga keuangan desa yang telah dijelaskan sebelumnya. Di Pedesaan juga terdapat satu lembaga keuangan lain yang kerap disebut sebagai lembaga keuangan swadaya. Prinsip

lembaga keuangan ini adalah adanya rotasi tabungan dan asosiasi kredit, dimana anggota kelompok berkontribusi secara reguler memberikan dana kepada salah satu atau ke beberapa anggota berdasarkan kesepakatan perputaran atau tabungan dan kelompok kredit, yang berguna untuk membangun kerja sama dana pinjaman melalui pembagian modal, tabungan dan pendapatan bersih dari intermediasi keuangan, intermediasi antara penabung dan peminjam, dan menyediakan pinjaman berdasarkan tingkat bunga eksplisit dan permintaan eksplisit dari semua anggota (Holloh dalam yustika, 2015)⁹.

2.4 Pedesaan dan Pelembagaan Usahanya

Suatu desa pasti memiliki hasil bumi yang menjadi komoditas utama penduduk setempat. Baik komoditas yang berasal dari usaha tani, kebun, ternak, nelayan bahkan pertambakkan. Komoditas tersebut ada yang dikelola secara mandiri oleh penduduk desa setempat, ada pula yang bekerjasama dengan organisasi tertentu atau disebut sebagai pola kemitraan, Peran pemerintah dalam mengatur dan menjembatani pola kemitraaan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 yang menyebutkan tentang: “Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.” Dari definisi kemitraan sebagaimana tersebut di atas, mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah/besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya dari definisi tersebut dapat diketahui unsurunsur penting dari kemitraan, yaitu:

1. Kerjasama usaha, yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang

bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usaha tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta saling berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.

2. Antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil, diharapkan usaha besar atau menengah dapat bekerjasama saling menguntungkan dengan pelaku ekonomi lain (usaha kecil) untuk mencapai kesejahteraan bersama. 3 Penjelasan Undang-undang No. 9 tahun 1995 12
3. Pembinaan dan pengembangan, yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah terhadap usaha kecil, yang dapat berupa pembinaan mutu produksi, peningkatan kemampuan SDM, pembinaan manajemen produksi, dan lain-lain.
4. Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, yang akan terjalin karena para mitra akan dan saling mengenal posisi keunggulan dan kelemahan masing-masing yang akan berdampak pada efisiensi dan turunnnya biaya produksi. Karena kemitraan didasarkan pada prinsip winwin solution partnership, maka para mitra akan mempunyai posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

Ciri dari kemitraan adalah kesejajaran kedudukan, tidak ada pihak yang dirugikan dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersama melalui kerjasama tanpa saling mengeksploitasi satu dan yang lain dan tumbuhnya rasa saling percaya diantara mereka. Selanjutnya Ian Linton mengartikan kemitraan sebagai: sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Berdasarkan motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat didasarkan atas saling memperkuat. Dalam situasi dan kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Jika suatu desa mengelola komoditasnya secara mandiri, disebut juga sebagai desa swasembada. Desa swasembada ini sifatnya individualis. Kebanyakan penduduk di desa tersebut mengelola hasil buminya untuk konsumsi pribadi atau dengan kata lain, cukup digunakan untuk kebutuhan pribadi. Biasanya luas lahannya sempit dan sedikit. Contohnya petani padi yang mengelola secara mandiri sawahnya, akan menggunakan sebagian hasil panennya untuk kebutuhan makan keluarganya sendiri.

Sedangkan desa yang penduduknya bekerjasama dengan organisasi tertentu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah desa yang bekerjasama dengan perusahaan. Pola kemitraan yang digunakan untuk desa yang seperti ini adalah pola kemitraan inti-plasma.

Dalam pedoman pola hubungan kemitraan, mitra dapat bertindak sebagai perusahaan inti atau perusahaan pembina atau perusahaan pengelola atau perusahaan penghela, sedangkan plasma disini adalah petani/peternak. Konsep kemitraan tersebut secara lebih rinci diuraikan dalam Pasal 27 Peraturan pemerintah RI Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, disebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan antara lain dengan pola:

1. Inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha. Program inti-plasma ini, diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pihak usaha kecil sebagai pihak yang mendapat bantuan untuk dapat mengembangkan usahanya, maupun pihak usaha besar yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha dalam jangka panjang.
2. Sub konkraktor adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil/menengah, di

mana usaha besar sebagai perusahaan induk (parent firm) meminta kepada usaha kecil/menengah (selaku subkontraktor) untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk.

3. Dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar dan atau usaha menengah yang bersangkutan.
4. Waralaba (franchise) adalah suatu system yang menggambarkan hubungan antara Usaha Besar (franchisor) dengan Usaha Kecil (franchisee), di mana franchisee diberikan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha, dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak franchisor dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan atau jasa.
5. Keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak principal memproduksi/memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.
6. Bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana yang tertulis di atas, yang satu ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan atau pola-pola baru yang timbul dimasa yang akan datang.

Dalam praktiknya, pola-pola kemitraan yang dijalankan secara benar dan sesuai aturan yang berlaku, akan menciptakan hubungan pola kemitraan yang solid dan saling menguntungkan. Namun beberapa kasus pola kemitraan, terutama kemitraan inti-plasma, banyak merugikan pelaku usaha kecil yang merupakan penduduk desa. Hal ini terjadi karena ketidaktransparanan pengelolaan pola kemitraan tersebut. Masyarakat desa dibuat menjadi sangat bergantung pada perusahaan inti bahkan berhutang. Sehingga tidak

bisa lepas dan mandiri dari perusahaan inti yang menaunginya. Contohnya adalah ketika petani di desa yang diberikan modal berupa lahan dan saprotan dari perusahaan inti, mengalami gagal panen dan belum bisa mengembalikan modal yang diberikan. Maka modal yang belum dikembalikan beserta presentase keuntungan yang seharusnya dibagi dengan perusahaan inti, dianggap sebagai hutang petani kepada perusahaan inti.

Untuk itu, terdapat pola kemitraan yang lain yang lebih bersahabat dengan masyarakat desa. Seperti pola kemitraan yang terjadi antara penduduk desa dengan koperasi pedesaan atau BUMDes. Di dalam pola kemitraan ini, peran koperasi pedesaan adalah mensejahterakan anggotanya yang merupakan penduduk desa.

Referensi

1. Annonymous. 1997. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN [1]
2. Annonymous. 2012. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN [6]
3. Djazh, Dahlan. 1980. *Pengetahuan Koperasi*. Jakarta: PN Balai Pustaka. [7]
4. Griffin, Ricky W. dan Ronald J. Ebert. Alih bahasa oleh Sita, W. (2007). *Bisnis jilid 1 (edisi 8)*. Jakarta : Erlangga. [2]
5. Hans. 1980. Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi, [4]
6. Hendar dan Kusnadi . 2005. *Ekonomi Koperasi*, Lembaga Penerbit FEUI. [5]
7. Khoiril. 2013. Komitmen Pak Harto Terhadap Koperasi. <http://soeharto.co/komitmen-pak-harto-terhadap-koperasi>. [8]
8. O'Sullivan, Arthur (2003). *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. hlm. 202. ISBN 0-13-063085-3. [3]
9. Yustika E.A dan Baks R. 2015. *Konsep Ekonomi Kelembagaan, Perdesaan, Pertanian dan Keadulatan Pangan*. Empat Dua. Malang [9]

BAB III

Pengaruh Budaya pada Pengembangan Pelembagaan Ekonomi

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budia atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

3.1 Pengertian Budaya dan Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana

juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari (Tubss et al, 2005)¹.

Selain itu budaya juga bisa diartikan sebagai suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia (Mulyana et al, 2006)².

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaan sendiri. "Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Tiongkok.

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka.

3.1.1 Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski (1997)³ mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink

(2013)⁴, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual, dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward Burnett Tylor (1887)⁵, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat..Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak.

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

3.1.2 Unsur-unsur Kebudayaan

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Melville J. Herskovits (1997)³ menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:
 - alat-alat teknologi
 - sistem ekonomi
 - keluarga
 - kekuasaan politik
2. Bronislaw Malinowski³ mengatakan 4 unsur pokok kebudayaan meliputi:
 - sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya
 - organisasi ekonomi

- alat-alat, dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama)
 - organisasi kekuatan (politik)
3. C. Kluckhohn mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal (universal categories of culture) yaitu:
- bahasa
 - sistem pengetahuan
 - sistem teknologi, dan peralatan
 - sistem kesenian
 - sistem mata pencarian hidup
 - sistem religi
 - sistem kekerabatan, dan organisasi kemasyarakatan

3.1.3 Wujud dan Komponen Kebudayaan

3.1.3.1 Wujud Kebudayaan

Menurut J.J. Hoenigman (2008)⁶, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak.

- Gagasan (Wujud ideal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak yaitu tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan, dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.

- Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan

kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati, dan didokumentasikan.

- **Artefak (karya)**

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur, dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, wujud kebudayaan dibagi menjadi nilai budaya, sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik.

- **Nilai-nilai Budaya**

Istilah ini, merujuk kepada penyebutan unsur-unsur kebudayaan yang merupakan pusat dari semua unsur yang lain. Nilai-nilai kebudayaan yaitu gagasan-gagasan yang telah dipelajari oleh warga sejak usia dini, sehingga sukar diubah. Gagasan inilah yang kemudian menghasilkan berbagai benda yang diciptakan oleh manusia berdasarkan nilai-nilai, pikiran, dan tingkah lakunya.

- **Sistem Budaya**

Dalam wujud ini, kebudayaan bersifat abstrak sehingga hanya dapat diketahui dan dipahami. Kebudayaan dalam wujud ini juga berpola dan berdasarkan sistem-sistem tertentu.

- **Sistem Sosial**
Sistem sosial merupakan pola-pola tingkah laku manusia yang menggambarkan wujud tingkah laku manusia yang dilakukan berdasarkan sistem. Kebudayaan dalam wujud ini bersifat konkret sehingga dapat diabadikan.
- **Kebudayaan Fisik**
Kebudayaan fisik ini merupakan wujud terbesar dan juga bersifat konkret. Misalnya bangunan megah seperti candi Borobudur, benda-benda bergerak seperti kapal tangki, komputer, piring, gelas, kancing baju, dan lain-lain

3.1.3.2 Komponen Kebudayaan

Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan memiliki beberapa elemen atau komponen, menurut ahli antropologi Cateora, yaitu :

- **Kebudayaan material**
Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhisalan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci.
- **Kebudayaan nonmaterial**
Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.
- **Lembaga sosial**
Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran banyak dalam konteks berhubungan dan berkomunikasi di alam masyarakat. Sistem sosial yang terbentuk dalam suatu negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada tatanan sosial masyarakat.

Contoh di Indonesia pada kota, dan desa di beberapa wilayah, wanita tidak perlu sekolah yang tinggi apalagi bekerja pada suatu instansi atau perusahaan. Tetapi di kota – kota besar hal tersebut terbalik, wajar jika seorang wanita memiliki karier.

- **Sistem kepercayaan**

Bagaimana masyarakat mengembangkan, dan membangun sistem kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu akan mempengaruhi sistem penilaian yang ada dalam masyarakat. Sistem kepercayaan ini akan mempengaruhi kebiasaan, pandangan hidup, cara makan, sampai dengan cara berkomunikasi.

- **Estetika**

Berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita, dongeng, hikayat, drama, dan tari-tarian, yang berlaku, dan berkembang dalam masyarakat. Seperti di Indonesia setiap masyarakatnya memiliki nilai estetika sendiri. Nilai estetika ini perlu dipahami dalam segala peran agar pesan yang akan disampaikan dapat mencapai tujuan dan efektif. Misalkan di beberapa wilayah, dan bersifat kedaerahan, setiap akan membangun bangunan jenis apa saja harus meletakkan janur kuning, dan buah-buahan sebagai simbol, dimana simbol tersebut memiliki arti berbeda di setiap daerah. Tetapi di kota besar seperti Jakarta jarang, mungkin, terlihat masyarakatnya menggunakan cara tersebut.

- **Bahasa**

Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi, bahasa untuk setiap wilayah, bagian, dan negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki sifat unik dan kompleks yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi keunikan, dan kekompleksan bahasa ini harus

dipelajari, dan dipahami agar komunikasi lebih baik serta efektif dengan memperoleh nilai empati dan simpati dari orang lain.

Budaya memiliki peran penting dalam upaya pelebagaan ekonomi. Karena pelebagaan ekonomi dimulai dari suatu komunitas masyarakat yang memiliki cara pandang yang sama. Sehingga nilai-nilai yang dianut oleh komunitas masyarakat tersebut akan menentukan berhasil tidaknya dan seperti apa suatu pelebagaan perekonomian yang terbentuk.

3.2 Contoh Pelebagaan Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelebagaan ekonomi mengandung arti membentuk sebuah lembaga yang mengkoordinir dan mengendalikan jalannya perekonomian dalam suatu lingkungan ekonomi

Penerapan pelebagaan ekonomi salah satunya terjadi di daerah pedesaan. Di Kampung Bumi Dipasena, Rawajitu Timur, Tulang Bawang Lampung misalnya. Kampung ini merupakan kampung dengan komoditas utama udang dan 90% masyarakatnya mencari nafkah menjadi petambak udang. Awalnya pelebagaan perekonomian di Bumi Dipasena dimulai dari adanya perusahaan yang memang dengan sengaja menyulap desa tersebut menjadi tambak udang, serta merekrut karyawan untuk mengelola tambak dan sekaligus tinggal disana.

Pada kala itu kerjasama antara perusahaan dan para karyawan petambak menggunakan pola kerjasama kemitraan inti-plasma. Namun pola kemitraan inti-plasma yang diterapkan di sana merugikan para petambaknya. Salah satu permasalahannya adalah mengenai modal dan pengaruhnya terhadap kegagalan panen udang. Ketika petambak menerima modal untuk pengelolaan budidaya tambak udang pada setiap periodenya, maka keuntungan hasil panen udang akan dibagi berdasarkan presentase tertentu dengan perusahaan. Namun ketika terjadi gagal panen, nilai keuntungan yang seharusnya milik perusahaan menjadi tanggung jawab petambak. Dengan kondisi tersebut, maka petambak menjadi terlilit hutang dengan perusahaan. Lama kelamaan petambak menginginkan keadilan. Masyarakat petambak melakukan

tuntutan dengan berbagai cara kepada perusahaan, mulai dari tahun 1998 sampai dengan 2010. Sampai dengan pada bulan Januari 2011, masyarakat petambak di Bumi Dipasena memutuskan kerjasama dengan perusahaan dan memilih untuk mandiri.

Ada tiga kesamaan dari seluruh masyarakat petambak di Bumi Dipasena yang memicu keinginan untuk mandiri dan dapat maju tanpa perusahaan yang memonopoli usaha tambak udang mereka. Yang pertama adalah rasa senasib. Seluruh masyarakat petambak di Kampung Bumi Dipasena merasa ada ketidakadilan yang terjadi dalam kerjasama usaha tambak yang mereka jalankan dengan perusahaan yang menaungi. Selain itu, rasa ingin maju dan berhasil menimbulkan suatu visi bersama dari para petambak. Dengan tujuan yang sama, pada akhirnya para petambak melepaskan diri dari perusahaan yang sebelumnya menaungi dan memilih untuk mandiri. Kemandirian para petambak ini tidak akan berhasil tanpa didukung adanya semangat gotong royong diantara mereka. Sehingga kampung dipasena bisa merangkak naik sampai saat ini.

Referensi

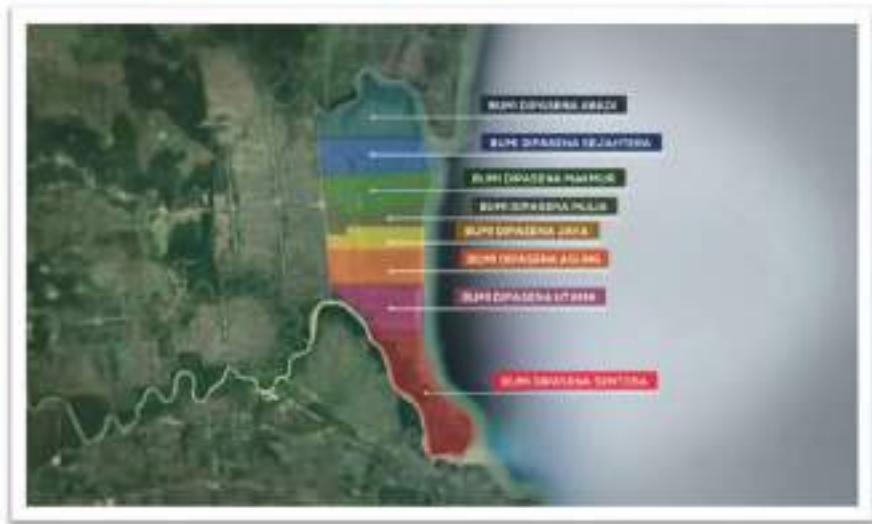
1. Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat. 2006. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. [2]
2. Eppink, Andreas. 2013. *The Eppink Model and the Psychological Analysis of a Culture* [4]
3. Edward B. Taylor. 1887. *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*, New York: Henry Holt. [5]
4. J.J Hoenigman (Wikipedia, 2008) *Kebudayaan Menganyam*. [6]
5. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski, 1997, *The Symbolic Construction of Community*. Routledge: New York. [3]
6. Tubbs, Stewart L & Sylvia Moss. 2005. *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi*, Editor Deddy Mulyana, Remaja Rosdakarya, Bandung. [1]

BAB IV

Studi Kasus Dipasena

4.1 Profil Dipasena

Bumi Dipasena adalah kampung di kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Indonesia. Daerah ini adalah hamparan lahan yang tadinya hutan rawa rawa bertanah gambut dan sunyi. Area ini diubah oleh pengusaha dijadikan ribuan hektar lahan tambak udang lengkap dengan sarana penunjang budidaya udang pola intensif dengan pembagian desa yaitu 8 desa yang terdiri dari Bumi Dipasena Sentosa, Utama, Agung, Jaya, Mulya, Makmur, Sejahtera dan Abadi (Profil Bumi Dipasena, 2016)¹.



Gambar 4.1

Wilayah Bumi Dipasena beserta Pembagian 8 Desa di dalamnya
 Sumber : KIARA²

Bukan hanya jumlah petak tambak yang banyak saja, tapi disana juga berdiri power house, coldstorage, pabrik pakan udang, workshop, pelabuhan export, medical, perkantoran yang elit, dan masih banyak lagi sarana sosial dan ekonomi yang lengkap.

Bumi Dipasena memiliki Total Luas Lahan 16.250 HA, terbagi atas lahan pertambakan mandiri (*ex plasma*) jenis SHM : 6.800 Ha (3,613 Ha *cultivation area*, 3,187 Ha *supporting infrastructure area*) dan lahan ex CPP Group (*ex inti*) jenis HGU seluas 9.450 Ha. Jumlah total tambak sebanyak 17. 139 petak yang terdiri dari tambak produktif sebanyak 14.609 petak dan tambak kurang produktif (dimanfaatkan warga tambak-tambakini adalah kegagalan sistem tandon CPP group) sebanyak 3070 petak dan terdapat saluran air inlet dan outlet sepanjang 1.300 KM (Profil Bumi Dipasena, 2016)¹.



Gambar 4.2

Pembagian Kawasan di Bumi Dipasena

Ket: Kawasan inti merupakan bekas kawasan inti (perusahaan), dan kawasan plasma merupakan kawasan petambak

Sumber: Kompas TV³



Gambar 4.3

Hamparan Tambak Udang Bumi Dipasena

Adapun gambaran Geografis dan Demografis Bumi Dipasena adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4

Peta Kampung Bumi Dipasena

Sumber: (Profil Bumi Dipasena, 2016)¹

Kerjasama antara para petambak atau masyarakat dengan sistem kemitraan. PT. Dipasena Citra Darmaja berhasil menghasilkan produksi udang dengan berat diatas 10 Gram per ekor pada tahun 2014 sebanyak 4,171 ton dengan potensi produksi per tahun sebanyak 40.000 ton. Dengan Jenis udang yang dibudidayakan yaitu udang *vannamei* atau udang windu.Salah satu desa yang dibangun berdasarkan pembuatan salah satu pertambakan udang terbesar di dunia PT. Dipasena Citra Darmaja yaitu Bumi Dipasena Utama. (Profil Bumi Dipasena, 2016)¹

4.2 Sejarah

Pada awal berdirinya, Desa Bumi Dipasena merupakan desa dengan komoditas tambak udang terbesar di dunia. Kejayaan PT. Dipasena Citra Darmaja (PT DCD) tersebut tidak bertahan lama. Sekitar Tahun 1990-1999, krisis ekonomi yang melanda Indonesia

menyebabkan PT DCD mengalami masalah. Selain itu permasalahan internal yang muncul antara masyarakat penambak dengan perusahaan inti juga menimbulkan gejolak untuk keberlangsungan bisnis PT DCD ini. PT DCD dinilai tidak transparan dan adanya perjanjian kerja sama yang tidak adil selama kemitraan berjalan berujung pada sikap masyarakat Petambak Plasma tidak bersedia lagi bermitra dengan perusahaan. Hal ini menyebabkan adanya pergerakan dari Masyarakat Dipasena. Para petambak Bumi Dipasena melakukan protes ke kantor DPR, pada Oktober Tahun 2000.



Gambar 4.5

Demo Petambak Dipasena di Kantor DPR

Sumber: Kompas TV³

Setelah PT DCD dinyatakan pailit dan dilikuidasi oleh pemerintah, tambak udang dipasena beberapa kali berpindah tangan dan mengalami pasang surut. Pada tahun 2002–2003 Dipasena group diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bagian dari sebagai bagian dari Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Pada tanggal 7 dan 16 September 2004, digelar Rapat Dengar

Pendapat (RDP) di DPR terkait pembiayaan program revitalisasi tambak udang Dipasena. Tahun 2005 berdasarkan arahan Menteri Keuangan kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk mencari pembiayaan revitalisasi di luar APBN bagi plasma dan inti, terpilihlah PT. RECAPITAL sebagai Kreditur baru Dipasena. PT. PPA dan PT. RECAPITAL mengubah komposisi manajemen lama dengan manajemen baru.

Di tahun 2010 terjadi penangkapan pada empat tokoh Dipasena yang juga merupakan petambak Bumi Dipasena, karena dianggap sebagai aktor intelektual yang memicu konflik di Dipasena, yaitu Nafian Faiz, Anul Muklis, Sigit Winardi, dan Abdurrahman.

Tahun 2007 PT. PPA berhasil menjual Aset Kredit dan Saham Group Dipasena yang bernilai +/- 19 Triliun kepada Konsorsium Neptune (CPP Group/PT AWS) hanya dengan harga US\$ 53,5 juta US (Rp. 448 miliar). Melalui beberapa upaya strategis, akhirnya pihak Inti, PT Aruna Wijaya Saksi, anak perusahaan PT Central Proteina Prima Tbk (Charoen Pokphand Group) berhasil mengajak beberapa perwakilan Plasma melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Naskah PKS) secara simbolis. Tahun 2008, petambak menegur perusahaan (CPP Group/PT AWS) karena pelaksanaan 'Rehabilitasi' tidak berjalan sesuai jadwal. Tahun 2009 CPP Group/PT AWS secara sepihak kembali merubah 'Rencana Rehabilitasi Revisi Ke-1' menjadi Rencana Rehabilitasi Revisi Ke-2 (April 2008~September 2011). CPP Group/PT AWS secara sepihak kembali merubah 'Rencana Rehabilitasi Revisi Ke-2' menjadi Rencana Rehabilitasi Revisi Ke-3. Perhimpunan Petambak Pengusaha Udang Windu (P3UW), bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Lampung untuk meminta bantuan dan solusi (Profil Bumi Dipasena, 2016)¹ .



Gambar 4.6

Nafian Faiz

Ketua P3UW Lampung, sekaligus Tokoh Pemersatu Petambak Bumi
Dipasena yang pernah di penjara pada Tahun 2010

Sumber: KIARA²

Sampai dengan terjadinya perusakan asset fisik perusahaan oleh masyarakat petambak Dipasena di Tahun 2011 dan pada 1 Juni 2011, permasalahan tambak udang Dipasena masuk PTUN. Pemda Tuba menerima surat gugatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempermasalahkan pencopotan 5 Kepala Kampung di Dipasena.



Gambar 4.7

Tampak Luar Cold Storage atau Pabrik Udang Dipasena milik
Perusahaan Inti yang sudah dihancurkan oleh petambak

Sumber : KIARA²



Gambar 4.8

Kondisi di Dalam Pabrik Udang Dipasena milik Perusahaan Inti yang sudah dihancurkan oleh petambak

Sumber : Kompas TV³

Tahun 2012, terjadi proses mediasi yang difasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk penyelesaian polemik kredit. Mediasi ini dihadiri oleh perwakilan Petambak, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemkab Tulang Bawang, BNI,

BRI, Jamkrindo, dan PT. AWS/ CPP. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk merestrukturisasi hutang-hutang petambak kepada bank. 21 Juni 2012, surat rekomendasi Komnas HAM No. 039/R/TUA/Mediasi/VI/2012 menyatakan bahwa CPP Group/ PT AWS telah gagal melaksanakan Program Revitalisasi yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya para petambak.



Gambar 4.9

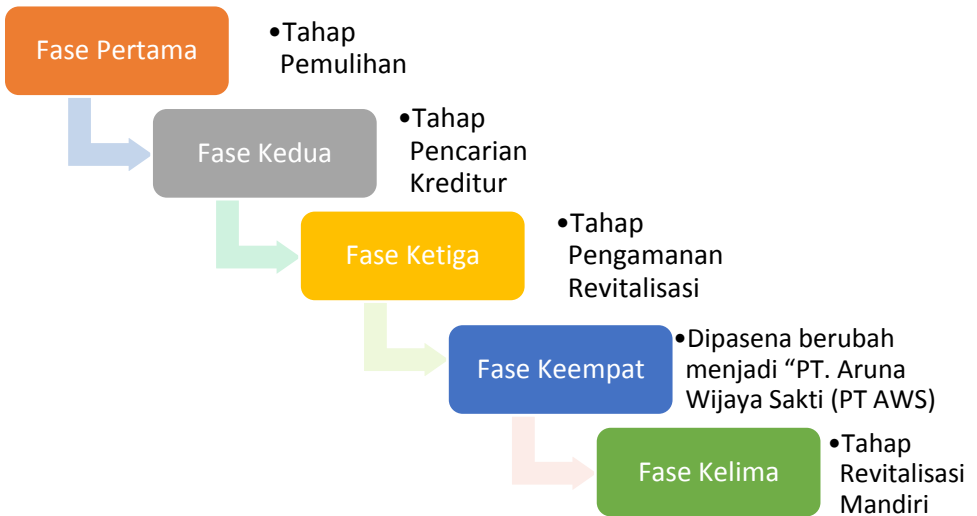
Konflik Bumi Dipasena

Sumber: <http://bumidipasenasejahtera.desa.id>

Tahun 2013, Pengadilan Negeri Menggala menolak gugatan perdata PT. Aruna Wijaya Sakti (AWS) terhadap 400 petambak plasma di Dipasena Kecamatan Rawajitu Timur Tulang Bawang. Kemudian P3UW mendeklarasikan pelaksanaan “Program Revitalisasi Mandiri”. “Revitalisasi Mandiri” dimulai dengan petambak berkomitmen melanjutkan budidaya udang dengan membuat sistem kemitraan baru yang lebih adil dan transparan melalui wadah ekonomi bernama Koperasi Petambak Bumi Dipasena (KPBD). Dan berkembang menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (Profil Bumi Dipasena, 2016)¹

4.2.1 Perkembangan Revitalisasi Dipasena

Revitalisasi secara umum dipahami sebagai sebagai kegiatan untuk mengembalikan pertambakan eks Dipasena pada kondisi awalnya, yaitu budidaya udang Windu secara intensif. Sejak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengambil alih aset Group Dipasena dari pemilik lamanya (Sjamsul Nursalim) pada tahun 2002, Pemerintah dan DPR sudah menyadari bahwa Pertambakan Dipasena merupakan aset nasional yang perlu di revitalisasi. Pada saat diambil alih kondisi kemitraan Inti dan Plasma tidak terjalin dan Petambak melakukan budidaya secara mandiri. Hal itu disebabkan karena adanya polemik kemitraan dan nilai hutang Plasma. Untuk memahami proses revitalisasi dipasena, terdapat lima fase penting yang saling berhubungan.



Gambar 4.10
Fase Revitalisasi Mandiri Bumi Dipasena

Fase Pertama, pada fase ini disebut sebagai “Tahap Pemulihan”. Pada tahap ini, BPPN sebagai kuasa pemerintah meminta manajemen eksisting berinisiatif untuk membentuk “Tim Khusus” untuk memulihkan hubungan kemitraan antara Petambak dan Perusahaan agar dapat layak dilakukan revitalisasi. Usaha tersebut membuahkan

hasil, hingga akhirnya pada tahun 2003 hubungan Petambak dan Perusahaan akhirnya dapat dipulihkan kembali setelah Petambak menerima komitmen pemerintah untuk:

- Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang adil.
- Mencarikan pendanaan untuk rehabilitasi sarana prasarana, Modal Investasi dan Modal kerja yang cukup agar mereka dapat kembali berbudidaya “Intensif”.

Selanjutnya sambil menunggu pemerintah mewujudkan janjinya, maka Petambak dan perusahaan bersepakat untuk mengawali hubungan kemitraan dengan pola budidaya “Pra intensif” Pada bulan September 2004, dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI yang mengamanatkan agar Pemerintah segera melaksanakan revitalisasi pertambakan udang eks Dipasena.

Amanat revitalisasi dilandasi oleh tiga pertimbangan: Pertama, untuk mencegah gangguan sosial keamanan yang lebih besar. Kedua, menyelamatkan hajat hidup 120.000 orang yang menerima manfaat dari kegiatan budidaya pertambakan udang di Dipasena. Ketiga, untuk meningkatkan devisa negara dari ekspor udang.

Dengan demikian, “Amanat Program Revitalisasi” ialah kegiatan untuk mengembalikan pertambakan eks Dipasena pada kondisi awalnya agar mensejahterakan pembudidaya dan masyarakat serta berkontribusi pada peningkatan devisa negara.

Berdasarkan Amanat tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan serangkaian kegiatan berikut untuk mendukung dan mempermudah berjalannya Program Revitalisasi Dipasena, yaitu:

- Pada bulan Oktober 2004, menetapkan bahwa program revitalisasi dimasukan dalam Program kerja 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.
- Pada tahun 2005, Menteri Keuangan menyampaikan kebijakan nilai aset ex Group Dipasena dari + 19 triliun menjadi hanya sebesar 53,5 juta dollar AS dan nilai hak tagih (hutang Plasma)

dari rata-rata Rp 100 juta menjadi Rp 20 juta rata rata / Plasma.

- Pada Maret 2005, Menteri Keuangan memberikan arahan kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT. PPA) untuk mencari pembiayaan revitalisasi diluar APBN bagi Plasma dan inti yang diterjemahkan oleh PT. PPA untuk mencari pembiayaan dari kreditur.
- Pada 4 Juli 2005 Wakil Presiden mempertegas dukungannya dengan cara memberikan arahan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri BUMN agar mendukung revitalisasi hingga tuntas;
- Pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Tulang Bawang membentuk Kecamatan Rawa Jitu Timur, khusus untuk area Dipasena agar Inti dan Plasma dapat lebih mudah mengkoordinasikan dirinya.

Fase Kedua, yang disebut sebagai “Tahap Pencarian Kreditur”. Pada tahap ini BPPN dan PT. PPA mengeluarkan dana sekitar Rp 15 miliar untuk membiayai konsultan asing Ferrier Hogdson dan Konsultan lokal Wiriadinata & Wiriawan untuk merancang strategi yang tepat untuk pelaksanaan program revitalisasi, kebijakan strategis yang ditetapkan ialah sebagai berikut:

1. Memperbaiki pola kemitraan; agar terwujud pola kemitraan yang adil dan setara dengan cara Membuat PKS (Perjanian Kerja Sama) untuk Inti dan Plasma.
2. Mencarikan Pembiayaan; untuk biaya rehabilitasi sarana prasarana dan permodalan budidaya bagi Inti dan Plasma dengan cara mencarikan Kreditur.

Menteri Kelautan dan Perikanan (Bapak Fredy Numberry) mendukung ajakan PT. PPA dengan membentuk Tim Revitalisasi (yang diketuai oleh Bapak Made L. Nurjana). Dukungan juga diberikan dari Bupati Tulang Bawang dengan mengirimkan stafnya untuk turut mendampingi proses penyusunan PKS.

Selanjutnya tim Departemen Perikanan dan Kelautan bersama dengan Pemda Tulang Bawang mengawal dan mengarahkan manajemen Inti dan perwakilan Plasma untuk menyusun PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang mengacu pada pola kemitraan yang adil dan setara. Maka pada bulan Juni 2005 PKS dapat diselesaikan dan direncanakan untuk budidaya “udang windu dengan pola Intensif”. Saat ini Plasma menyebutnya dengan nama “PKS Pemerintah”.

Setelah PKS selesai, PT. PPA selanjutnya melakukan proses seleksi calon kreditur. Akhirnya, pada bulan Oktober 2005 PT. PPA menetapkan PT. RECAPITAL sebagai kreditur program revitalisasi. Untuk dapat menempatkan perwakilan dari PT. Recapital maka Komposisi Manajemen pun diubah dengan menunjuk Sdr. Rudyan Kopot yang sebelumnya bekerja sebagai Direktur PT. Centra Pertiwi Bahari milik PT. CPP Group sebagai Direktur Utama Dipasena Group yang baru.

Langkah awal manajemen baru ialah menggunakan PKS yang biasa digunakannya di pertambakan tempat mereka bekerja sebelumnya (PKS PT. CPB). Kebijakan ini mendapat penolakan Plasma sehingga menyebabkan proses negosiasi yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, karena Plasma tetap memilih untuk menggunakan “PKS Pemerintah”.

Polemik Inti-Plasma mengenai penggunaan PKS ini disikapi oleh pihak Pemerintah Daerah Tulang Bawang yang mengawal proses negosiasi, dengan mengirimkan surat secara resmi pada bulan Maret 2006 perihal anjuran kepada PT. PPA agar dapat mengarahkan Manajemen baru menggunakan PKS Pemerintah, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan. Pada akhir 2006, proses negosiasi penyusunan PKS yang isinya mengatur tehnik budidaya “Vannamei” dengan pola Intensif akhirnya dapat diselesaikan. Saat ini Plasma menyebutnya dengan nama “PKS 2006”

Proses negosiasi PKS yang terlalu panjang berdampak terhadap kacaunya rencana keuangan PT. Recapital sehingga dukungan dana operasional tersendat. Dan akhirnya pada bulan maret 2007 PT. Recapital secara resmi dinyatakan default.

Fase Ketiga, fase ini disebut oleh PT PPA sebagai “Tahap Pengamanan Revitalisasi.” Pada tahap ini menteri keuangan dan PT. PPA mengubah strategi pencarian kreditur menjadi langkah Penjualan Aset dan hak tagih yang dikemas dengan nama “Program penjualan aset dan hak tagih group Dipasena dengan pengamanan Revitalisasi”.

Langkah ini diawali dengan undangan tender di beberapa media cetak sampai dengan penjelasan dalam Info Memo serta ketentuan di dalam TOR (Terms Of Reference), PT. PPA berupaya menjaring Investor yang diharapkannya.

PT. PPA juga membentuk ‘Tim Independen’ yang terdiri dari individu yang dianggap memahami hukum, ekonomi dan tehnik budidaya yang dilibatkan untuk mendukung keabsahan proses seleksi Investor.

Pihak Plasma, Pemda Tulang Bawang dan Menteri Kelautan dan Perikanan kembali melakukan desakan dan memberikan saran secara tertulis kepada PT. PPA agar mensyaratkan kepada calon investor menggunakan PKS Pemerintah. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil membuat PT. PPA mensyaratkan PKS Pemerintah sebagai PKS yang harus digunakan oleh calon Investor. Pada bulan Mei 2007 melalui proses seleksi maka terpilihlah Konsorsium NEPTUNE, yang terdiri dari PT. Blue Lion Grup, PT. Central Proteina Prima (CPP) dan PT. Pertiwi Indonesia. Sebagai pemenang tender, Konsorsium Neptune membeli Aset Group Dipasena dan membayar hak tagih Plasma Dipasena dengan total nilai sekitar Rp 668 milyar.

Dalam skenario program pengamanan revitalisasi versi PT PPA yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penjualan aset Dipasena, Konsorsium Neptune (pemenang tender) diwajibkan untuk melaksanakan dua hal: 1) membayar saham PT. Dipasena Citra Darmaja sebesar 53,5 juta US dolar dan membayar Hak Tagih Plasma (hutang Plasma) sebesar Rp 220 miliar. 2) melaksanakan kewajiban dengan menyediakan pembiayaan untuk melakukan revitalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana milik Inti dan menyediakan pembiayaan untuk Modal Kerja dan Modal Investasi bagi Petambak.

Fase Keempat, pada fase ini Dipasena berubah menjadi “PT. Aruna Wijaya Sakti (PT AWS),” yang merupakan anak perusahaan PT. Central Proteina Prima (CPP) yang tidak lain adalah grup perusahaan milik Charoen Pokphand dari Thailand. Pihak perusahaan kembali menegosiasikan PKS model baru (versi CPP) kepada Plasma. Meskipun pada awalnya Plasma menolak usulan ini, tetapi karena mereka tidak mampu lagi mempertahankan keinginannya oleh karena kondisi yang sudah sangat melelahkan dan desakan kebutuhan ekonomi akhirnya Plasma terpaksa menerima PKS baru dengan perjanjian revitalisasi dan rehabilitasi pertambakan dalam waktu yang secepatnya.

Pada tahun 2009, hubungan kemitraan Inti-Plasma semakin memburuk, karena PT AWS/CPP berulang kali mengubah rencana jadwal revitalisasi yang sudah disepakati sejak tahun 2007 ditambah beban hutang yang semakin menumpuk. Hal ini menimbulkan keresahan hingga akhirnya Petambak melakukan protes dan menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk meminta keadilan.

Terhadap hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bupati Tulang Bawang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegur pihak perusahaan agar melaksanakan janjinya untuk melaksanakan revitalisasi agar tercipta suasana yang kondusif untuk berbudidaya dan memenuhi hak-hak petambak. Atas dukungan berbagai LSM di Jakarta, petambak juga melakukan audiensi dengan sejumlah pihak (DPR dan Pemerintah) untuk meminta dukungan. Intensitas dan bobot konflik Inti-Plasma semakin meningkat sejak 2009, merosotnya volume produksi dan ekspor udang Indonesia mulai tahun 2007 disertai banyaknya kelemahan dalam kemitraan Inti-Plasma yang saat ini berjalan, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban maupun metode transaksi. Hal ini menjadi dasar kesimpulan akan terjadinya kegagalan Program Pengamanan Revitalisasi yang dilakukan oleh PT AWS/CPP.

Tekanan berbagai pihak dijawab oleh perusahaan dengan menghentikan seluruh aktifitas produksinya termasuk menghentikan aliran listrik ke seluruh perkampungan Bumi Dipasena. Dalam

perjalanannya secara berangsur-angsur, PT AWS memindahkan seluruh mesin, gardu listrik, dan sarana produksi lainnya ke luar Bumi Dipasena.

Fase Kelima, fase ini disebut sebagai “Tahap Revitalisasi Mandiri.” Pada fase ini petambak berkomitmen melanjutkan budidaya udang dengan membuat sistem kemitraan baru yang lebih adil dan transparan melalui wadah ekonomi bernama Koperasi Petambak Bumi Dipasena (KPBD). Pada tahun 2013, di bawah koordinasi organisasi petambak Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) mendeklarasikan program “Revitalisasi Mandiri.” Yang merupakan bentuk gotong royong seluruh petambak Bumi Dipasena untuk melakukan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pertambakan udang miliknya secara swadaya (Profil Bumi Dipasena, 2016)¹.

Berikut ini adalah kronologi singkat sejarah terbentuknya tambak udang Bumi Dipasena:



Gambar 4.11

Kronologis Tambak Udang Bumi Dipasena

Sumber: (Profil Bumi Dipasena, 2016)¹

Saat ini Bumi Dipasena bersama-sama dengan masyarakatnya, dibawah pengawasan Perhimpunan Petambak Pengusaha Udang Windu (P3UW) sedang menerapkan Usaha Bersama Masyarakat dengan Pola Kemitraan dan Pola Keuangan yang unik atau berbeda. Seperti pola keuangan yang diterapkan, seluruh masyarakat adalah pemegang saham sekaligus petambak. Dengan sistem bagi hasil yaitu terdapat sistem pembagian risiko, sistem pembagian untuk infaq dan sistem pembagian infrastruktur. Dibawah 8 BUMKAM, pada masing-masing kampung, usaha tambak udang di Bumi Dipasena saat ini sudah semakin baik. Dalam sekali panen untuk 1 lot atau 2 petak tambak udang, hasil panen yang didapat 1.100 sampai 1.200 kg udang dengan ukuran yang berbeda. Sehingga omset yang didapat bisa mencapai enam puluh sampai tujuh puluh juta.

Referensi

1. Anonimous, 2016. Profil Usaha Bumi Dipasena. Rawa Jitu, Tulang Bawang. [1]
2. Eep Saefullah. 2018. Catatan Pribadi Eep Saefulloh Fatah di Harian Republika. <http://bumidipasenasejahtera.desa.id>[4]
3. KIARA. 2018. Dokumentasi KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) untuk Dipasena. [2]
4. Kompas Indonesia. Dokumentasi Kompas TV. [3]

BAB V

Karakteristik usaha Tambak Dipasena, Risiko dan Pengelolaannya

5.1 Karakteristik Kampung Bumi Dipasena

Terdapat beberapa karakteristik desa yang tercermin pada Kampung Bumi Dipasena. Menurut Drs.Sapari Imam Asy'ari (1993)¹ karakteristik desa meliputi beberapa aspek sebagai berikut: Dilihat dari aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan. Kampung Bumi Dipasena merupakan desa dengan penduduk yang bermata pencaharian pokok sebagai petambak udang. Dengan demikian komoditas di Kampung Bumi Dipasena pun sama yaitu udang.

Dari aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogeny, serta bergotong

royong. Berdasarkan latar belakang sejarah Kampung Bumi Dipasena yang sempat mengalami konflik hampir belasan tahun, membentuk karakter penduduknya yang sangat kekeluargaan, penuh dengan kebersamaan, gotong-royong, disiplin dan saling percaya.



Gambar 5.1

Contoh Kebersamaan dan Gotong Royong Petambak Bumi Dipasena ketika Panen

Keterangan:

Ketika satu kolam milik satu petambak panen, maka petambak lain dalam satu jalur tambak akan ikut membantu proses panen.

Sumber: KIARA²





Gambar 5.2

Budaya Gotong Royong dan Kebersamaan Petambak Bumi Dipasena
Keterangan:

Gambar 1, ibu-ibu petambak menyiapkan makanan untuk konsumsi proses panen udang

Gambar 2, para petambak sedang istirahat makan setelah menyelesaikan proses panen

Sumber: KIARA²

Selanjutnya dari aspek morfologi, menurut Smith dan Zopf (1970) Smith dan Zopf dalam “Sosiologi Pedesaan (suatu pengantar)” Sugihen Bahrein T (1997)³ adalah terdiri dari lingkungan fisik desa dan pola pemukiman. Pola pemukiman berkaitan dengan hubungan-hubungan keruangan (*spatial*) pemukiman (petani) antara satu dengan yang lain dan dengan lahan pertanian mereka. Di Kampung Bumi Dipasena, secara keruangan terdiri dari petak tambak, rumah penduduk, kantor-kantor dan fasilitas kampung, kanal dan jembatan-jembatan penghubung.



Gambar 5.3

Akses menuju Kampung petambak Bumi Dipasena

Keterangan: Jembatan dan Dermaga Kapal



Gambar 5.4

Tampak Depan Jembatan Swadaya Masyarakat

Untuk rumah penduduk, berada di setiap 2 petak tambak. Karena satu petambak mengelola 1 lot atau dua petak tambak. Bumi Dipasena merupakan suatu desa atau kampung dengan komoditas utama yaitu tambak udang. Penduduk desanya sebagian besar bekerja sebagai petambak udang. Menurut sejarah perkembangannya,

Kampung Bumi Dipasena dulunya dikelola oleh satu perusahaan inti dengan pola kemitraan inti-plasma yang merugikan sebagian besar masyarakat petambak. Saat ini Bumi Dipasena mulai bangkit dengan pengelolaan pola kemitraan yang baru yang tujuan dasarnya mendorong perekonomian desa.

Seluruh proses yang dijelaskan sebelumnya mengenai Pola Kemitraan Usaha Bersama, jelas berbeda dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma yang dilaksanakan sebelumnya di Bumi Dipasena. Adapun perbedaannya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.1

Perbedaan Pola Kemitraan Inti-Plasma dengan Pola Kemitraan Usaha Bersama

No	Perbedaan	Pola Kemitraan Inti-Plasma	Pola Kemitraan Usaha Bersama
1.	Posisi Petambak	Sebagai Buruh yang Melakukan proses budidaya udang yang diatur oleh Perusahaan inti	Sebagai Pelaku Bisnis yang mandiri
2.	Posisi Lembaga	Perusahaan inti sebagai perusahaan yang mengelola dan mengatur seluruh kegiatan bisnis tambak udang	Badan Usaha Unit Bisnis sebagai koordinator yang membantu para petambak dalam mengelola bisnis tambak udang pada setiap desa
3.	Penentuan Supplier,	Supplier ditentukan dan melalui perusahaan inti	Petambak dibebaskan memilih siapa supplier yang akan menyuplai berbagai kebutuhan saprotam tambak udang. Dengan batasan tidak merugikan petambak
4.	Penentuan Harga Acuan Hasil Panen	Harga diatur oleh perusahaan inti	Harga dilihat berdasarkan harga global yang diorganisir oleh BUSB. Harga udang

			yang diambil adalah harga udang tertinggi yang sedang berlaku disaat itu
5.	Proses penjualan hasil panen tambak udang	Hasil panen disalurkan kepada perusahaan inti untuk dijual	Petambak boleh menentukan buyernya masing-masing dengan ketentuan harga tertinggi yang tidak merugikan petambak
6.	Perlakuan Gagal Panen	Kegagalan panen dianggap sebagai hutang dari petambak kepada perusahaan inti	Kegagalan panen merupakan risiko yang harus ditanggung bersama. Nominal rupiah kegagalan panen bisa ditutupi dengan penggunaan CRU
7.	Pembagian Hasil Panen Udang	Petambak mendapatkan hasil sesuai yang telah diatur oleh perusahaan inti	Terdapat aturan dan presentase pembagian untuk bagi hasil tambak udang

Jadi bisa disimpulkan bahwa Pola Kemitraan Usaha Bersama merupakan pola kemitraan yang mengedepankan kemauan untuk bebas dari hutang atau maju, kebersamaan, kepercayaan dan kedisiplinan dengan adanya kebebasan dari pelaku bisnis untuk menentukan pihak-pihak yang berkaitan dengan bisnisnya namun tetap memiliki batasan tertentu yang menjadi batasan dalam menjaga kestabilan usaha yang ada.

5.2 Aktor-aktor yang terlibat dan perannya

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses bisnis tambak udang vaname di Bumi Dipasena dibagi menjadi aktor internal dan eksternal. Aktor internal merupakan pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan budidaya udang vaname. Dimulai dari proses budidaya udang vaname selama kurang lebih 2,5 bulan sampai dengan pengelolaan

administrasi, operasional dan keuangan sampai hasil tambak terjual. Petambak dan Badan Usaha Sub Blok (BUSB) merupakan dua aktor internal yang ada pada bisnis budidaya udang vaname di Kampung Bumi Dipasena.

Petambak merupakan aktor utama dalam pengelolaan budidaya dan bisnis udang vaname. Karena semua proses budidaya, mulai dari persiapan lahan, penebaran benih, pengelolaan sampai dengan panen dilakukan oleh petambak sendiri. Para petambak di Bumi Dipasena mulai bertambak pada tahun 1990-1991. Awalnya para petambak merupakan pendatang yang mencari lapangan pekerjaan di Dipasena. Dimulai dari proses mendaftar, mengikuti training, magang sampai dengan penempatan sebagai petambak plasma.

Jumlah keseluruhan kampung di bumi dipasena mulai dari setelah konflik sampai sekarang, terdapat 8 kampung. Dengan total petambak sebanyak 9.027 petambak. Sebelumnya para petambak terikat kemitraan inti-plasma dengan perusahaan, namun dengan berbagai kerugian yang dirasakan, pada petambak melakukan gerilya tanah mulai tahun 1997, dengan melakukan pertemuan antar petambak di malam hari. Perjuangan tersebut berhasil dilakukan sampai dengan sekarang.

Dalam pelaksanaannya, satu petambak mengolah 2, 4 sampai 6 lot tambak. Namun idealnya masing-masing petambak hanya mengelola 1 lot atau 2 petak tambak. Setiap kegiatan pertambakkan diorganisir oleh koperasi yang disebut BUSB (badan usaha sub blok) yang ada dibawah BUMKam. Contohnya disalah satu kampung di Bumi Dipasena yaitu Bumi Dipasena Jaya, pembagian sub blok terdiri dari, 12 Sub Blok, yaitu 6 dan 7 Alfa -Foxtrot. Masing-masing memiliki BUSB yang menerapkan pola kemitraan usaha bersama dalam wadah BUMKam.

Selain petambak, aktor internal yang terlibat dalam bisnis tambak udang vaname adalah Badan Usaha Sub Blok (BUSB). Badan usaha sub blok merupakan sebuah badan usaha yang bertanggungjawab dalam pengelolaan bisnis tambak udang dalam setiap satu sub blok atau Rukun Warga (RW). Pengurus Badan Usaha

Sub Blok adalah orang-orang yang dipilih dari beberapa anggota yang bergabung dalam Badan Usaha Sub Blok dengan status domisili sebagai warga di Sub Blok atau RW tersebut. Pemilihan dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah bersama seluruh anggota. Pengurus Badan Usaha Sub Blok bertanggungjawab langsung kepada musyawarah anggota. Tugas dan kewajibannya adalah mengelola Badan Usaha Sub Blok serta mewakili di muka dan di luar lingkup Sub Blok sesuai dengan keputusan-keputusan musyawarah bersama anggotanya. Pengurus Badan Usaha Sub Blok antara lain penanggung jawab program, penanggung jawab keuangan, penanggung jawab dana sosial (Infak), penanggung jawab pengadaan barang, penanggung jawab pengadaan benih dan layanan panen, dan pengawas administrasi. Selain pengurus, terdapat juga karyawan BUSB. Karyawan Badan Usaha Sub Blok adalah orang-orang yang dipilih dari beberapa warga dengan status domisili sebagai warga di Sub Blok atau RW tersebut. Karyawan Badan Usaha Sub Blok diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Badan usaha Sub Blok. Karyawan Badan Usaha Sub Blok bertanggungjawab langsung kepada Pengurus Badan Usaha Sub Blok. Karyawan Badan Usaha Sub Blok terdiri dari petugas lapangan, petugas gudang, administrator.

Selanjutnya adalah aktor eksternal. Di dalam bisnis tambak udang vaname, terdapat banyak aktor eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung kepada bisnis tersebut. Adapun beberapa aktor eksternal yang ada dalam bisnis tambak udang vaname adalah P3UW (Perhimpunan Petambak Udang Wilayah), investor, suplier benih, suplier saprotam, Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), infra, pemerintah, media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, buyer, pengepul dan pabrik.

a. P3UW

P3UW merupakan sebuah organisasi Perhimpunan Petambak Plasma Udang Wilayah yang membawahi petambak udang vaname di delapan kampung di Bumi Dipasena. Sampai dengan tahun 2018 ini, kepengurusan sudah memasuki tahun ke tiga. Jumlah kepengurusan

minimal 20 orang di pusat P3UW. Selain pusat terdapat pengurus wilayah/ kampung, sub blok (RW), dan RT. Pemilihan kepengurusan dilakukan dengan pemilihan langsung, yang merupakan perwakilan dari masing-masing sub blok. Dari setiap kampung diambil sebanyak 3 terbaik dari perwakilan yang ada. Kemudian didapatkan 1 wakil terbaik dari setiap kampung. Sehingga terpilih 8 calon dari masing-masing kampung. Warga memilih langsung secara serentak dari 8 calon ketua dan terpilih 1 ketua. Selanjutnya kepengurusan dipilih dan dibentuk oleh ketua yang sudah terpilih (formatur).

Dalam pengelolaan bisnis tambak udang, laporan keuangan dilaporkan setiap bulan kepada pengurus kampung dari masing-masing unit bisnis, dan kemudian disosialisasikan bersama ke petambak lewat acara perkumpulan bersama. Sedangkan P3UW lebih fokus pada pembangunan perkenonomian pertambakan. Sehingga keberhasilan bukan hanya berdasarkan penghasilan petambak, tetapi diukur dari gerak ekonomi pertambakan.

P3UW sendiri selain merupakan perhimpunan petambak plasma udang, juga memiliki usaha sendiri di level unit usaha yaitu berupa koperasi dan menjadi wadah untuk pengepul udang. Jadi pada dasarnya P3UW tidak mengambil keuntungan dari para petambak, tetapi memiliki usaha sendiri yang berkaitan dengan budidaya udang. Secara bisnis P3UW perannya mengorganisir budidaya dan bisnis tambak udang.

Rapat koordinasi pengurus P3UW dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu. Kemudian rapat tahunan dilakukan setiap 1 kali dalam setahun. Selain rapat rutin pengurus, komunikasi antar level dilakukan secara insidental. Namun tetap dilakukan rapat pengambilan keputusan dalam 3 atau 6 bulan sekali. Selain melalui rapat, komunikasi antar anggota dilakukan melalui grup whats-app dan radio komunitas untuk penyebaran informasi.

Visi Misi dari P3UW yaitu:

1. **KESADARAN** : Artinya setiap langkah perhimpunan atau anggota pengurus perhimpunan harus berdasarkan kesadaran, semata-

mata dilandasi akan hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawab masing-masing tidak ada paksaan dan ancaman serta bersifat sosial. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama/kepercayaan masing-masing serta mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran itu pengurus rela melakukan sesuatu yang berguna dalam mewujudkan karya nyata untuk perhimpunan dan kesejahteraan seluruh anggota serta menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

2. **PERSATUAN** : Artinya setiap tindakan yang diambil oleh perhimpunan harus memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang bulat, jiwa pengabdian yang utuh kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang harmonis serta mengembangkan kesetiaan pada perhimpunan.
3. **KOORDINASI** : Artinya dalam memikirkan atau pengambilan tindakan dan keputusan untuk dan atas nama perhimpunan, para pengurus dan anggota harus selalu berkoordinasi secara baik, transparan sesuai dengan batas kewenangannya.

Berikut ini adalah bukti Surat Keterangan Terdaftar P3UW sebagai Organisasi Kemasyarakatan:



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jl. Cemas Komplek Perumahan Perula Kabupaten Tegal Bawang
Telp. (0726) 21348 Fax. (0726) 21348

MENGGA LA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 01-01-01 / 1 / V-2015

Menyebutkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Surat Permohonan Registrasi dari Organisasi Kemasyarakatan (P3OW) Lirisung Kabupaten Tegal Nomor A / 022/BPP-P3OW / V/2015 Tanggal 01 Mei 2015 tentang Permohonan Registrasi Organisasi Kemasyarakatan P3OW Lirisung, sesuai struktur peraturan yang berlaku administrasi organisasi, dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tegal Bawang menyatakan :

Nama Organisasi	: Perkumpulan Botabab Pengusaha Lirisung Welayat Lirisung (P3LW)
Tanggal Berdiri	: 09 September 1998
Botang Kegiatan	: Menghimpun, Mempertahankan, Mempertahankan dan Mempertahankan serta Memperkuat dan Keselamatan Anggota dan Keresmi Anggota Sekeloa Anggota di Tegal Sebel Kabupaten
NPWP	: 71.702.7770.020000
Piside Keperguruan	: 1014 60 2010
Kewi	: NAFIAN PAEZ
Sekretaria	: ANIL MUKHLIS
Berdikara	: AFRENDI HARMAH
Nama Organisasi	: Jln Bana Himpunan Milya (S. WU TATA KOTA) Rt/Ba 012 JDI Kecamatan Kana dan Tegal Kabupaten Tegal Bawang HP 0815 4110 0004 / 0811 7227 199

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam pengisian kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya sampai dengan Tanggal 09 September 2020 dengan ketentuan wajib terdaftar ulang setiap tahun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tegal Bawang. Apabila dikemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekefektifan diurusai terlah penyalahgunaan akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan wajib terdaftar ulang

Menggala, 21 Mei 2015
AN. SUPATI TULANG-BAWANG
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
 Kabupaten Tegal Bawang



DR. H. H. SAMBIL, M.Si
 Sekretaris Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Tegal Bawang
2. Wakil Bupati Tegal Bawang

Gambar 5.5

Surat Keterangan Terdaftar sebagai Organisasi Masyarakat

b. Investor

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal dalam suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan dikemudian hari. Orang yang berinvestasi ini disebut sebagai investor. Dalam usaha tambak udang

di Kampung Bumi Dipasena, terdiri dari investor perorangan dan lembaga. Investor lembaga contohnya adalah Koperasi yang ikut bermodal, P3UW yang ikut bermodal, PT Setiga Sukses Bersama (PT SSB), dan juga divisi alat berat P3UW yang memberikan modal berupa penggunaan alat berat. Sedangkan untuk investor perorangan bisa dari dalam maupun dari luar daerah Bumi Dipasena. Dari dalam Bumi Dipasena misalnya adalah petambaknya sendiri. Sedangkan investor perorangan yang berasal dari luar adalah siapa saja yang ingin menanamkan modalnya di Bumi Dipasena. Dalam proses pembagian hasil, investor mendapatkan porsi sebesar 15% dari keuntungan bersih.

c. Suplier benih

Suplier benih udang merupakan usaha manapun yang menyediakan benih udang untuk pertambakan. Petambak diberikan kebebasan untuk memilih dari mana akan mengambil benih udang. Petambak akan memilih supplier benih udang sesuai dengan efisiensi dan optimalisasinya. Seperti misalnya kemudahan untuk mendapatkannya, harganya dan kualitas benih nya. Karena kualitas benih udang akan mempengaruhi ketahanan udang dan kualitas hasil panen udangnya.

Selama ini, sebagian petambak Bumi Dipasena, terutama yang berada di Bumi Dipasena Jaya mengambil benih udang dari kalianda, Lampung Selatan. Daerah ini termasuk daerah yang jauh dari jangkauan jika dikirimkan dengan jalan darat. Lain halnya jika diantarkan melalui jalur laut.

d. Suplier saprotam

Saprotam merupakan sarana produksi pertambakan. Saprotam sendiri terdiri dari pupuk dan obat untuk mengkondisikan suhu dan kandungan di dalam tambak udang. Selain pupuk dan obat, pakan udang juga termasuk dalam jenis saprotam. Dalam hal pembelian saprotam, petambak diberikan pilihan untuk membeli saprotam di koperasi unit bisnis maupun dari luar. Petambak juga mempunyai hak

untuk membeli saprotam yang cocok dengan kondisi petak tambaknya.

e. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) merupakan suatu badan usaha yang tujuannya sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat kampung. BUMKam juga disebut sebagai BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dari 8 Kampung yang ada di Bumi Dipasena, terdapat juga 8 BUMKam yang mengelola pertambakan di masing-masing kampung. Seluruh BUMKam ini terkoordinir kepada BUMAKam (Badan Usaha Masyarakat Antar Kampung).

f. Infra

Infra dalam pertambakan di Bumi Dipasena, bisa merupakan suatu daerah dan juga merupakan golongan sebagian penduduk. Penduduk kampung Bumi Dipasena yang kepala keluarganya bukan berprofesi sebagai petambak disebut sebagai infra. Para penduduk infra ini bertempat tinggal di wilayah infra, yaitu diluar daerah petak tambak, tetapi masih di dalam kampung Bumi Dipasena. Infra juga memiliki Badan Pengurus Infra (BPI). Rata-rata penduduk infra bekerja sebagai supplier bahan untuk budidaya udang, misalnya supplier bahan bakar untuk pengoperasian kincir tambak.

g. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung. Peran yang paling terlihat adalah peran dari pemerintah kampung pada masing-masing kampung yang ada di Kampung Bumi

Dipasena. Karena sebagian besar pengurus di pemerintah kampung merupakan orang-orang yang juga pernah dan masih berkecimpung langsung dalam dunia tambak udang vaname.

h. Media

Media adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada audience. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “Medium” yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver) (Heinich, dkk dalam Hermawan, 2007)¹⁵. Dalam bisnis budidaya udang vanamei, media digunakan sebagai tempat untuk mencari informasi dan juga untuk menyampaikan informasi. Harga pasaran udang biasanya diambil dari rata-rata harga tertinggi pasar global yang bisa dilihat di website tertentu. Sedangkan untuk menyampaikan informasi, mereka biasa menggunakan media online dan media elektronik. Contohnya untuk komunikasi antar anggota dilakukan melalui grup whats-app, kemudian Bumi Dipasena juga memiliki radio komunitas untuk penyebaran informasi. Selain itu website Kampung Bumi Dipasena juga cukup aktif untuk mengupdate artikel atau berita terkini yang terjadi di Kampung Bumi Dipasena.

i. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)

Ormas dan LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial (Herdiansah, 2016)¹⁶. Peran ormas dan LSM sendiri lebih terlihat ketika para petambak Bumi Dipasena masih berjuang untuk mendapatkan keadilan.

j. Perguruan tinggi

Perguruan tinggi di dalam bisnis tambak udang di Bumi Dipasena memiliki fungsi sebagai partner dalam upaya peningkatan dan pengembangan bisnis tambak udang. Dengan melakukan berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi.

k. Buyer

Buyer atau pembeli merupakan pihak yang membeli langsung hasil panen udang vaname dari petambak. Kemudian akan dikirimkan kepada pengepul.

l. Pengepul

Pengepul merupakan bagian dari pasar udang vaname yang membeli hasil panen udang dari buyer dan nantinya hasil panen tersebut akan dikirimkan ke pabrik yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Palembang, dan Lampung. DI Bumi Dipasena sendiri, jumlah pengepul yang aktif tidak lebih dari 3 pengepul.



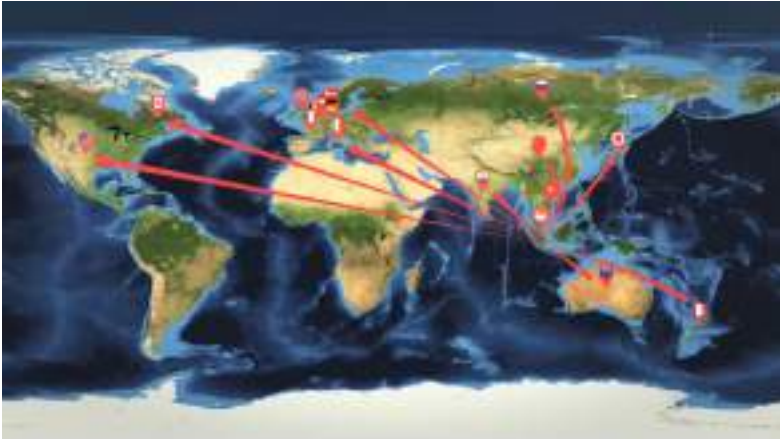
Gambar 5.6

Lokasi Pabrik di tiga Kota Besar di Indonesia

Sumber: KIARA²

m. Pabrik

Pabrik dalam hal ini merupakan pabrik pengolah udang. Pabrik yang menerima hasil tambak udang vaname yang dikirimkan oleh pengepul. Hasil olahan udang dari pabrik akan dipasarkan baik di dalam negeri maupun di export keluar negeri.



Gambar 5.7

Lokasi Ekspor Hasil Udang Bumi Dipasena

Sumber : KIARA²

5.3 Faktor Keberhasilan Usaha Tambak Udang Bumi Dipasena

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion dengan para stakeholder dan petambak di Bumi Dipasena, maka didapatkan faktor internal dan eksternal dalam mencapai keberhasilan usaha tambak udang Bumi Dipasena. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

5.3.1 Internal

- Keahlian budidaya udang

Tanpa adanya keahlian budidaya udang yang memadai, petambak tidak akan bisa secara optimal mengelola petak tambak dengan baik hingga menghasilkan panen udang dengan kualitas baik pula.

- **Motivasi senasib**
Sejarah terbentuknya Bumi Dipasena saat ini tidak lepas dari kondisi masa lampau yang menyadarkan masyarakat Bumi Dipasena untuk keluar dari kondisi tersebut. Rasa senasib ini menjadi motivasi bagi mereka untuk tidak kembali kepada kondisi buruk yang sudah terlewati.
- **Kerjasama dan Gotong Royong**
Pola bisnis tambak udang vaname saat ini tidak terlepas dari kerjasama dan gotong royong yang kuat. Dengan sistem bagi hasil dan model cadangan risiko usaha (CRU) yang diterapkan, membuat para petambak harus bekerjasama dan bergotongroyong agar tidak terjadi kerugian atau gagal panen.
- **Kedisiplinan**
Kedisiplinan dalam pengelolaan budidaya udang dan penerapan bisnis tambak udang juga menjadi faktor keberhasilan bisnis tambak udang vaname. Tanpa adanya kedisiplinan, petambak tidak akan mampu membudidayakan udang vaname dengan benar. Serta sistem keuangan bagi hasil dan model CRU tidak bisa diterapkan.
- **Komitmen**
Sama halnya dengan kedisiplinan, komitmen juga penting dalam pengelolaan budidaya udang dan penerapan bisnis tambak udang. Karena tanpa ada komitmen dari masing-masing petambak dan pihak lainnya, maka alur usaha tambak udang tidak akan berjalan semestinya.
- **Sistem Keuangan/ Bagi Hasil, Model Cadangan Risiko Usaha (CRU)** Sistem bagi hasil dan penerapan model CRU merupakan hal yang unik yang terjadi di pengelolaan bisnis tambak udang di Bumi Dipasena.

Yang berbeda dari sistem bagi hasil yang diterapkan di Bumi Dipasena adalah adanya sistem Infaq dan CRU. Infaq merupakan bentuk sedekah sebesar 2,5% dari pendapatan kotor dari para petambak yang digunakan untuk membantu pembangunan desa.

Misalnya membantu masjid yang ada di desa tersebut. Selain itu ada yang disebut sebagai CRU. CRU juga bisa dikatakan sebagai jaminan / asuransi, yang berfungsi membantu petambak gagal dan mengamankan investasi pemodal dengan melakukan kesepakatan bersama. Jika ada salah satu petambak yang gagal panen, maka petambak tersebut akan menutupi kerugiannya dari dana CRU. Kontrol CRU dapat dilihat dari hasil pelaporan keuangan yang dishare dalam forum pelaporan perbulan. Petambak yang telah mengambil dana CRU akan melakukan usaha lebih untuk mengembalikan dana CRU (10% perbulan) karena merasa malu. Jika terjadi kegagalan panen yang terus menerus oleh petambak, maka akan dilakukan pendampingan oleh P3UW. Hal ini mengapa kerjasama, gotongroyong, kedisiplinan dan komitmen sangat penting dalam berlangsungnya bisnis tambak udang vaname ini.

Adapun manfaat yang didapat dalam menerapkan keuangan model CRU yaitu;

1. Adanya pengurangan risiko (bahwa petambak tidak jadi berhutang jika terjadi gagal panen)
2. Adanya perbaikan infrastruktur dari dana CRU
3. Memupuk rasa kekompakan, karena permasalahan ditanggung bersama
4. Adanya sistem pengawasan satu sama lain yang timbul karena sistem CRU
5. Petambak bisa menjadi pemodal
6. Adanya peluang pengembangan usaha kembali

5.3.2 Eksternal

- Anggaran atau modal investasi
Anggaran atau modal merupakan bekal pertama yang dimiliki petambak untuk bisa mengolah tambak udang. Tanpa adanya modal awal, petambak tentu tidak bisa memulai usaha. Untuk itu peran investor menjadi hal yang sangat penting, terutama di awal proses pengolahan tambak udang.

- **Kualitas benih udang**
Kualitas benih udang atau benur tentu akan mempengaruhi ketahanan hidup udang dan kualitas udang siap panen yang akan dipasarkan. Dengan kualitas benih yang baik dan pengelolaan tambak udang yang baik, maka akan menghasilkan udang panen yang bernilai jual tinggi.
- **Teknologi Obat Penyakit**
Teknologi obat untuk mencegah dan mengobati penyakit udang perlu diperhatikan lebih serius. Karena sampai dengan saat ini, udang yang sudah terkena penyakit maka kemungkinan terbesar akan mati. Sehingga menyebabkan petambak gagal panen. Selain itu belum ditemukan obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit udang, yang ada hanya mencegah. Sampai saat ini salah satu hambatan yang sering dikeluhkan para petambak udang di Bumi Dipasena adalah munculnya penyakit udang seperti bintik putih/ White Spot Syndrome (WSS) yang belum ada obatnya. Untuk itu perlu dilakukan inovasi untuk menanggulangi masalah ini, agar bisnis tambak udang vaname semakin berkembang.
- **Teknologi Tambak**
Teknologi tambak dalam hal ini berhubungan dengan kincir dan teknologi lainnya yang mempermudah petambak mengelola tambak udangnya. Teknologi tambak juga berhubungan dengan listrik yang memadai. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan pengembangan mengenai teknologi tambak.
- **Listrik**
Listrik di Bumi Dipasena sampai saat ini masih sangat terbatas. Terdapat dua cara untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bumi Dipasena, yaitu dengan diesel dan tenaga surya. Untuk pengelolaan tambaknya sendiri, seperti pemutaran kincir, petambak menggunakan diesel untuk pengoperasiannya. Sehingga biaya untuk solar juga cukup besar. Sedangkan untuk

keperluan sehari-hari, masyarakat Bumi Dipasena menggunakan tenaga surya dan sebagian juga diesel untuk penerangan di rumah mereka. Listrik dari PT. PLN belum masuk di daerah Bumi Dipasena. Untuk itu perlu dilakukan inovasi untuk menanggulangi masalah ini, agar listrik bukan menjadi hambatan untuk bisnis tambak udang vaname di Bumi Dipasena.

- Akses

Jalan menuju dan keluar dari lokasi tambak udang Bumi Dipasena, merupakan faktor penting dalam pendistribusian berbagai keperluan dan hasil tambak udang. Saat ini, kondisi jalan menuju Bumi Dipasena masih sangat rusak dan memprihatinkan. Untuk itu, pemerintah wajib mengambil andil dalam perbaikan infrastruktur jalan menuju dan keluar lokasi tambak. Selain jalan darat, jalur laut juga sebaiknya dikembangkan untuk mempermudah dan mempercepat pendistribusian udang hasil panen.

- Fasilitas Desa

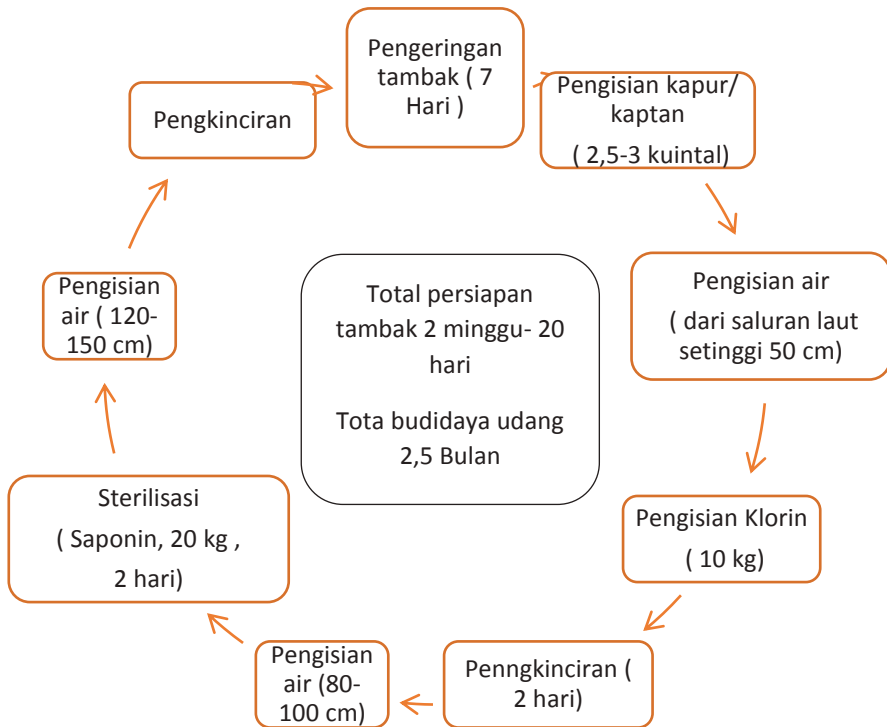
Fasilitas desa berupa jalan, kanal, jembatan dan pertambakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan tambak udang di Bumi Dipasena. Sampai dengan saat ini, daerah Bumi Dipasena hanya bisa dilalui sepeda motor, sepeda, pejalan kaki dan kapal untuk di kanal. Untuk kanal sendiri, terdapat kanal untuk kapal bergerak. Kendala yang dialami adalah pasang surut air di kanal yang membuat tidak setiap waktu kapal bisa bergerak di daerah tertentu. Terutama ketika sedang musim panen udang. Jembatan di Kampung Bumi Dipasena sebagian besar terbuat dari besi dan kayu. Banyak jembatan yang korosi dan kayunya sudah mulai rusak. Untuk itu perlu ada peran pemerintah dalam memperbaiki dan mengembangkan fasilitas desa sebaik mungkin. Karena selama ini pun, fasilitas desa dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

- **Iklm dan Musim**

Iklm dan musim merupakan dua faktor yang tidak bisa diprediksi dan diluar kendali. Kondisi perubahan iklim dan musim yang tidak menentu, akan mempengaruhi pola pengkondisian tambak sebelum budidaya dan pada saat budidaya. Bagaimana kondisi air tetap dalam keadaan yang sesuai untuk mendapatkan hasil panen yang bagus.

5.4 Teknis Pola Budidaya Udang Vaname di Bumi Dipasena

Di Bumi Dipasena terdapat 9.027 petambak udang vanamei, yang masing-masing petambak mengelola 1 lot tambak yang terdiri dari 2 petak tambak. Ukuran 1 petak tambak terdiri dari 45 x 55 m (bagian atas) dan 40x50 m (bagian bawah). Dalam 1 petak penebaran benur dilakukan sebanyak 30-100 ribu benur. Dengan kincir masing-masing 2-4 buah per petak. Jumlah kincir yang optimal adalah 4 buah per petak dengan penggunaan solar 10-15 liter untuk 2 kincir. Untuk teknologi kincir, terdapat kincir tombol yang menggunakan aliran listrik, ada pula kincir manual. Untuk 2 kincir tombol menghabiskan 10-15 liter solar, sedangkan kincir manual hanya menghabiskan 7 liter solar.



Gambar 5.8
Proses Budidaya Udang Vaname di Bumi Dipasena

Adapun proses budidaya udang vanamei dimulai dari penebaran benur. Rata-rata harga benur yaitu 38-45 rupiah per ekor. Sebelum dilakukan penebaran benur, tambak akan dikeringkan selama 7 hari. Kemudian per petak akan di isi kapur /kaptan sebanyak 2,5-3 kuintal. Selanjutnya tambak akan di isi air yang berasal dari saluran dari laut khusus dari belakang dam setinggi 50 cm. Dalam hal ini saluran air yang masuk dan yang keluar berbeda, jadi air tidak terkontaminasi. Setelah itu diberikan klorin 10 kg sambil dikincir selama 2 hari. Setelah dikincir, isi air sampai 80-100 cm, dan lakukan sterilisasi dengan saponin, yang merupakan pembunuh ikan/ hewan selain udang sebanyak 20 kg selama 2hari . Setelah 2 hari, air dinaikkan sebanyak 120- 150 cm tergantung jumlah benur yg akan disebar, sambil dikincir. Kebanyakan petambak mengisi air rata-rata 150 cm. Total waktu

pengisian air dilakukan selama seminggu. Sehingga total persiapan tambak dilakukan selama 2 minggu -20 hari.

Jumlah benur dihitung secara manual. Dalam 1 box styrofoam putih, terdiri dari 8 kantong dengan total benur 2000-3000 ekor. Cara menghitungnya dilakukan per-sample kantong.



Gambar 5.9

Kantong Benur dan Proses Penebaran Benur

Setelah benur disebar, biarkan dulu selama seminggu. Setelah seminggu benur diberikan pakan. Setelah udang berumur 3 minggu, mulai dilakukan kincir pertama. Sehingga proses pakan dilakukan selama 2,5 bulan. Sisa pakan, kotoran udang dan lumpur akan disedot dengan proses penyiponan (pembuangan lumpur).



Gambar 5.10

Proses Pemberian Pakan Udang dan Contoh Kincir Tambak Udang

Untuk memastikan udang berkembang sesuai waktunya, dan strategi apa yang harus dilakukan agar mendapatkan panen udang yang maksimal, maka petambak bisa melakukan pengecekan kondisi udang di dalam tambak dengan menggunakan alat berupa jaring yang digunakan untuk mengambil dan mengecek sampel udang.



Gambar 5.11

Pengecekan Ukuran Udang

Setelah rata-rata 2,5 bulan, dilakukan panen secara gotong royong. Panen juga tergantung dari kondisi alam. Sambil melakukan proses panen, air dikeringkan dan dilakukan proses berulang dari mulai pengeringan tambak.



Gambar 5.12
Proses Panen Tambak Udang

Hasil tambak udang dikumpulkan kepada Buyer dan Pengepul, dan kemudian hasil tambak udang tersebut dikirim ke pabrikan yang berada di beberapa Kota Besar Indonesia, seperti Lampung, Jakarta dan Palembang.



Gambar 5.13

Proses Pengumpulan Hasil Panen Udang di Pengepul

Sumber: KIARA²



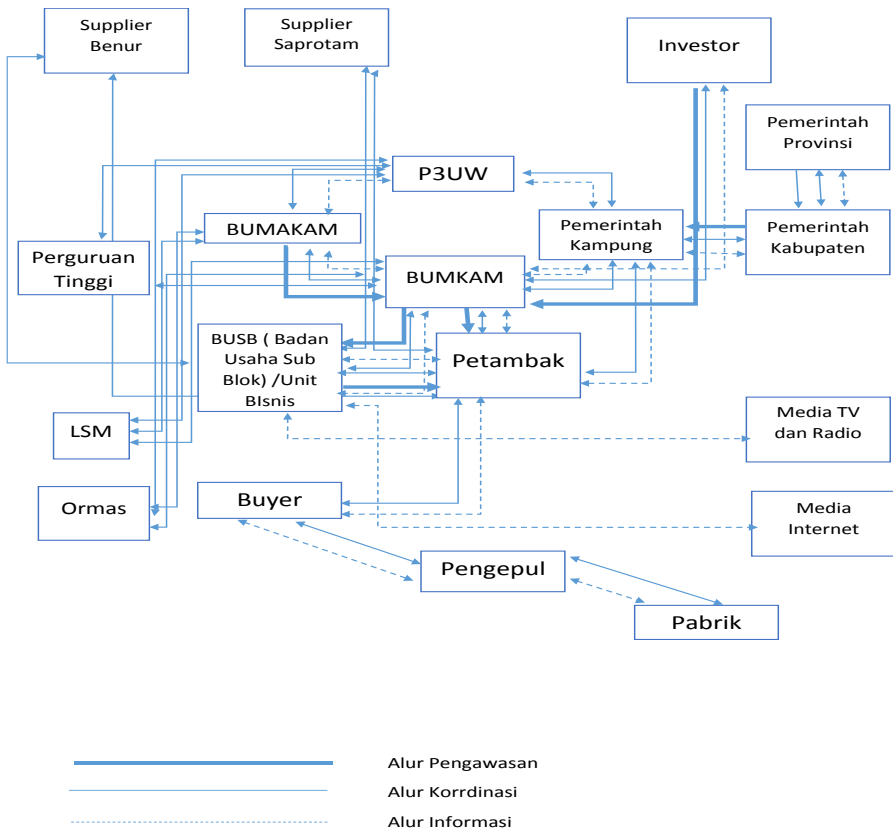
Gambar 5.14

Proses Pemasukkan Hasil Panen Udang ke dalam Truk pengangkut hasil panen

Sumber: KIARA²

5.5. Pengelolaan dan Risiko Usaha

Bagan Kelembagaan, keunikan Pengelolaan dan contohnya



Gambar 5.15

Bagan Kelembagaan Bumi Dipasena

Sumber: Hasil Penelitian

Di dalam model kelembagaan, Pola Kemitraan Usaha Bersama ini, terdapat alur penyampaian informasi, alur koordinasi dan alur pengawasan antar stakeholder yang terlibat. Jika dilihat, alur koordinasi berkaitan dengan hampir seluruh aktor yang terlibat. Mulai dari supplier, investor, pemerintahan, P3UW, BUMAKAM, BUMKAM, buyer, pengepul, pabrik, sampai dengan LSM dan ormas. Namun jika dilihat dari aktor utamanya yaitu petambak dan dibandingkan dengan kemitraan inti-plasma, maka petambak melakukan koordinasi dengan beberapa aktor seperti supplier, investor pemerintahan kampung,

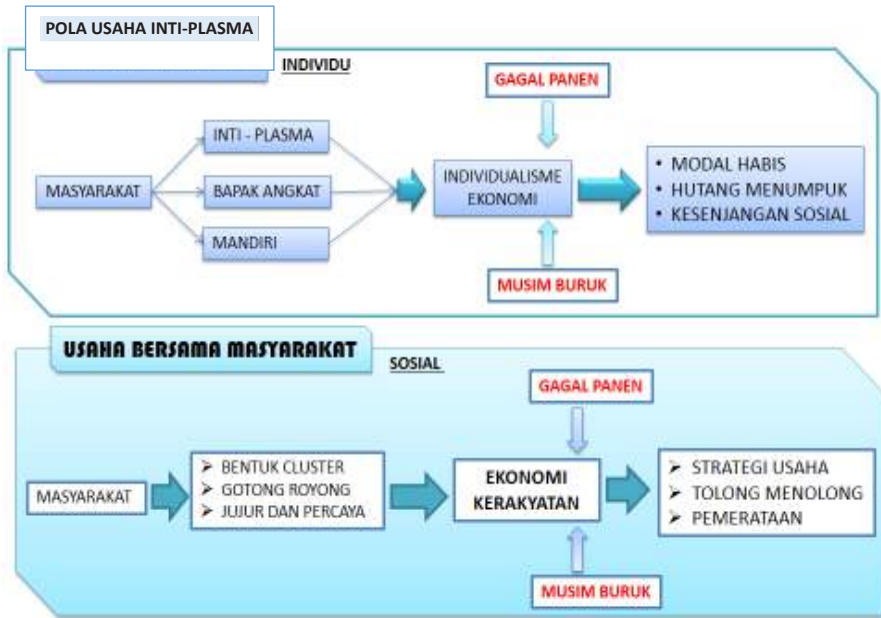
BUMKAM, BUSB, dan buyer. Kemudian dari sisi alur informasi, aktor utama yaitu petambak menerima informasi dan juga memberikan informasi kepada supplier, investor pemerintahan kampung, BUMKAM, BUSB, dan buyer. Yang terakhir, untuk alur pengawasan, petambak diawasi oleh BUSB langsung dan oleh pemerintah desa. Fungsinya adalah, untuk pemerintah desa, pemerintah bisa mengetahui sejauh apa perkembangan usaha di desanya. Sedangkan untuk BUSB, adalah pelaksanaan pengawasan proses bisnis secara keseluruhan. Karena walaupun petmbak memiliki banyak kebebasan, BUSB sebagai badan yang membantu pengelolaan administratif bisnis tambak udang, pasti melakukan pengawasan demi stabilnya usaha tambak udang di Bumi Dipasena ini.

Berdasarkan penjelasan tiga alur tersebut, maka menunjukkan bahwa perbedaan model pola kemitraan inti plasma dengan pola kemitraan usaha bersama ini ada pada kebebasan petambak dalam menentukan supplier budidaya udang dan penampung hasil panennya.

Namun tidak hanya dibebaskan begitu saja, Pola Kemitraan Usaha Bersama ini mengedepankan kebersamaan dan kedisiplinan yang terlihat dari beberapa batasan-batasan yang tidak hanya menguntungkan pihak unit bisnis (BUSB), tetapi juga menjadi pengawasan otomatis untuk petambak dalam pengelolaan bisnis tambak udangnya. Terdapat tiga keunikan yang menjadi batasan dalam Pola Kemitraan Usaha Bersama ini yaitu adalah pola bagi hasil, konsep cadangan risiko usaha dan konsep 1000 rupiah dan hutang darurat.

Adapun gambaran revolusi pola usaha tambak udang di Bumi Dipasena adalah sebagai berikut:

REVOLUSI POLA USAHA



Gambar 5.16
Revolusi Pola Usaha

Keterangan:

Perubahan pola usaha, dari masa inti-plasma menjadi usaha bersama

5.5.1 Bagi Hasil

Sistem bagi hasil dalam Pola Kemitraan Usaha Bersama dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.2
Pola Bagi Hasil Usaha

No	KOMPONEN	CODE	URAIAN
1	PENJUALAN	A	Hasil usaha Pembudidaya
2	BIAYA BUDIDAYA	B	Kumpulan dana dr pemodal
3	HASIL KOTOR	C	A dikurangi B
4	INFAQ	D	2,5% dari C
5	HASIL SUDAH INFAQ	E	C dikurangi D

6	CADANGAN RISIKO USAHA	F	10% dari E
7	HASIL PARA PIHAK	G	E dikurangi F
8	PEMBUDIDAYA	H	80% dari G
9	PEMODAL	I	15% dari G
10	MANAJEMEN BUMKAM	J	5% dari G

Sumber : Profil Bumi Dipasena⁴

Terdapat persentase yang langsung dipotong untuk infaq, cadangan risiko usaha (CRU), pembudidaya, pemodal dan manajemen BUMKAM/ koperasi. Infaq diambil 2,5% dari hasil kotor tambak udang. Kemudian hasil yang telah dikurangi infaq akan diambil sebanyak 10% untuk CRU. Hasil yang sudah dikurangi CRU akan diambil 80% untuk pembudidaya, 15% untuk pemodal dan 5% untuk manajemen BUMKAM/ koperasi.

Adapun contoh perhitungan bagi hasil sebagai berikut:

Tabel 5.3
Contoh Perhitungan Bagi Hasil

EX per person:

	URAIAN	%		NILAI
A	PENJUALAN		Rp	100.000.000,00
B	BIAYA BUDIDAYA		Rp	50.000.000,00
C	HASIL KOTOR		Rp	50.000.000,00
D	INFAQ	2,5	Rp	1.250.000,00
E	HASIL BERSIH SETELAH INFAQ		Rp	48.750.000,00
F	CADANGAN RESIKO USAHA	10	Rp	4.875.000,00
G	HASL BERSIH PARA PIHAK		Rp	43.875.000,00
H	PEMBUDIDAYA	80	Rp	35.100.000,00
I	PEMODAL	15	Rp	6.581.250,00
J	BUMDES	5	Rp	2.193.750,00

Sumber : Profil Bumi Dipasena⁴

Hasil 2,5% yang diambil untuk Infaq akan dibagi sebanyak 70 % untuk pembangunan di desa, 20% untuk rumah ibadah, baik masjid maupun rumah ibadah lainnya, dan 10 % untuk sumbangan kepada

warga yang sakit. 10 % yang merupakan sumbangan untuk warga yang sakit juga bisa disumbangkan antar Unit bisnis jika ada yang memerlukan. Pengelolaan infaq ini bekerjasama dengan Ketua RW setempat.

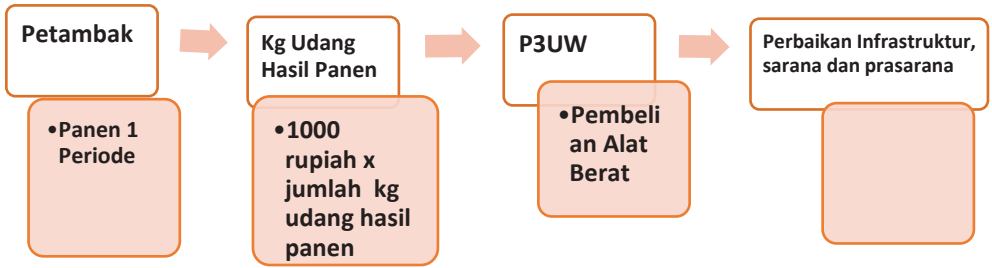
Kemudian terdapat presentase sebesar 10% dari pendapatan setelah dikurangi infaq yang diperuntukkan untuk CRU.

5.5.2 Konsep Cadangan Risiko Usaha (CRU)

Cadangan Risiko Usaha (CRU) juga bisa dikatakan sebagai jaminan / asuransi, yang berfungsi membantu petambak gagal dan mengamankan investasi pemodal dengan melakukan kesepakatan bersama. Jika ada salah satu petambak yang gagal panen, maka petambak tersebut akan menutupi kerugiannya dari dana CRU. Kontrol CRU dapat dilihat dari hasil pelaporan keuangan yang dishare dalam forum pelaporan perbulan. Petambak yang telah mengambil dana CRU akan melakukan usaha lebih untuk mengembalikan dana CRU (10% perbulan) karena merasa malu. Jika terjadi kegagalan panen yang terus menerus oleh petambak, maka akan dilakukan pendampingan oleh P3UW. Hal ini mengapa kerjasama, gotongroyong, kedisiplinan dan komitmen sangat penting dalam berlangsungnya bisnis tambak udang vaname ini.

5.5.3 Konsep dana 1000 rupiah dan Hutang Darurat

Selain konsep CRU, unit bisnis bekerjasama dengan petambak dengan dana 1000 rupiah, yaitu dalam 1 kg udang diberikan 1000 rupiah ke kas P3UW untuk membeli alat berat (eskavator). Eskavator digunakan untuk memperbaiki fasilitas dan sarana prasarana di desa. Kemudian ada juga yang disebut sebagai hutang darurat. Petambak yang mengalami kesulitan keuangan akan dibantu dengan hutang darurat dan akan dikembalikan ketika panen dan tanpa bunga.



Gambar 5.17

Alur Pelaksanaan Program dana 1000 rupiah

Sumber: data diolah

Konsep bagi hasil, CRU, dana 1000 rupiah dan hutang darurat merupakan konsep pengaturan keuangan bisnis tambak udang yang membebaskan petambak dari jeratan hutang secara perlahan tapi pasti.

Dari ketiga keunikan pola kemitraan usaha bersama ini, maka bisa dicontohkan perhitungan hasil usaha untuk satu periode panen udang adalah sebagai berikut:

CONTOH MODEL

HASIL USAHA

Nilai usaha

Kewajiban
usaha

Hak bagi hasil

Biaya bantuan

Penguatan modal

NAMA	TAUHIT	ALAMAT	7/35/02
TANGGAL PANEN	2-Feb-16	DOC	58 hari
> PERHITUNGAN 'RUGI/LABA'			
penen periode			Rp 12.178.500
pakan budidaya			Rp
> TOTAL HASIL PENJUALAN PANEN			Rp 52.178.500
> BIAYA BUDIDAYA			
1 BENUR			Rp 3.427.000
2 Pakan			Rp 13.072.000
3 Obat-obatan			Rp 2.597.500
4 Bahan bakar			Rp 2.196.400
5 lain-lain (rintisan terlampir)**			Rp 929.600
BIAYA BUDIDAYA			Rp 21.212.500
> RETUR BARANG			
retur			Rp 508.000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL BUDIDAYA			Rp 20.704.500
> TOTAL - RUGI/LABA KOTOR			Rp31.474.000
> KEWAJIBAN			
1 Infaq	2,5%		Rp 786.450
> HASIL LABA KOTOR SETELAH INFAQ			Rp30.687.150
2 CRU	10%		Rp 3.068.715
> TOTAL - RUGI-LABA BERSIH			Rp 27.618.435
> PERHITUNGAN 'BAGI-HASIL'			
1 PETAMBAK	80%	Rp	22.094.748
2 MITRA-I (PEMODAL)	15%	Rp	4.142.765
3 OPERASIONAL MANAJEMEN	5%	Rp	1.380.922
> PERHITUNGAN PENERIMAAN PETAMBAK			
PENGELUARAN PETAMBAK			
1 HUTANG , voucher pinjaman dan listrik		Rp	630.000
2 INVESTASI MESIN DLL (terlampir)		Rp	
TOTAL PENGELUARAN		Rp	630.000
TOTAL HASIL BERSIH PETAMBAK		Rp	21.464.748
PENAMBAHAN SAHAM DI RANAH USAHA		Rp	5.000.000
TOTAL PENERIMAAN TUNAI		Rp	16.464.748
RD PANEN	Rp	500.000	
FEE JALUR	Rp	158.600	

Gambar 5.18

Contoh Model Perhitungan Hasil Usaha

Sumber : Profil Bumi Dipasena ⁴

Referensi

1. Anonimous, 2016. Profil Usaha Bumi Dipasena. Rawa Jitu, Tulang Bawang. [4]
2. Asy'ari, Sapari Imam. 1993. Sosiologi Perkotaan dan Desa. Surabaya: Usaha Nasional.[1]
3. Bahrein,T Sugihen.1997.Sosiologi Pedesaan. jakarta : Balai Pustaka.[3]
4. KIARA. 2018.Dokumentasi KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) untuk Dipasena. [2]

BAB VI

Dampak Budaya Kebersamaan dan Perekonomian yang Meningkat

6.1 Sejarah Masa Lalu

Pada, tahun 1980-an, kawasan Bumi Dipasena merupakan kawasan yang sangat sepi dan gelap gulita di malam hari. Muara Way Mesuji di Kabupaten Tulang Bawang sama sekali belum dikenal. Kondisi dan struktur lahan di Tulang Bawang, daerah sekitar muara Way Mesuji, terdiri dari rawa-rawa yang membelukar, tumbuhan air dan pohon bakau. Banyak berkeliaran binatang melata seperti buaya muara, ular berbisa, biawak, kadal, dan kawan-an burung liar pemakan ikan. Bahkan sampai saat ini buaya-buaya masih banyak dan sering muncul pada sore dan malam hari.

Seharusnya daerah Bumi Dipasena merupakan surganya para pemancing dan pemburu. Namun mereka pun berpikir dua kali untuk memancing maupun berburu di rawa muara Way Mesuji. Karena alamnya masih sangat liar dan binatang disana termasuk banyak dan liar pula. Sehingga jika pergi kesana sulit bisa pulang ke rumah. Jika

tidak dipatok ular, dimangsa buaya, tercebur dalam rawa yang bergerak, atau bahkan bisa tersesat selama sehari-hari.

Namun, delapan tahun kemudian sekitar tahun 1988, tak ada yang bisa menyangka kalau muara Way Mesuji bisa berubah menjadi daerah produktif yang memberikan harapan bagi warga. Pada saat itu ribuan hektar lahan yang terbentang di sepanjang pesisir Lampung hingga Sumatera Selatan secara bertahap mulai dibangun. Lokasi yang dipilih di muara Way (sungai) Tulang Bawang dan Wai Mesuji, Lampung Utara. Kawasan di Pantai Timur Menggala yang mulanya merupakan lahan tidur yang tidak produktif diubah menjadi lahan produktif.

Kawasan Dipasena yang dulunya sunyi tanpa kehidupan, perlahan-lahan memunculkan daya tariknya tersendiri. Rawa muara Way Mesuji yang telantar mendadak jadi kawasan potensial bernilai ekonomis tinggi. DCD membangun tambak di areal konsesi seluas 16.250 hektar dari 30.000 hektar cadangan yang diberikan Pemda Provinsi Lampung dengan 16 blok.

Investasi DCD memang tidak tanggung-tanggung. Selain membangun tambak, rawa ini juga ditata menjadi tujuh areal infrastruktur seluas 753.28 hektar dan sebuah infrastruktur Tata Kota seluas 1.000 hektar. Pembangunan infrastruktur dilakukan sebaik mungkin. Bahkan fasilitas kelistrikan di Dipasena kekuatannya tiga kali lipat melebihi dari yang dimiliki pemerintah provinsi Lampung. Petambak dapat memanfaatkan aliran listrik yang disediakan Dipasena selain untuk memutar kincir tambak juga dapat digunakan bagi keperluan lain.

Tidak hanya infrastruktur tambak infrastruktur untuk aktivitas penunjang juga dibangun. Seperti, jalan, perumahan karyawan, pasar lokal, koperasi, lapangan olah raga, tempat ibadah dan fasilitas penting perusahaan seperti perkantoran, pabrik pakan dan gudang pakan, instalasi pendingin (cold storage), koperasi, dan lain-lain. Pasar tradisional disana sangat ramai dari siang sampai malam. Banyak rumah makan dan penginapan sederhana. Transportasi darat, bis-bis ukuran sedang khususnya dari Bandar Lampung atau Palembang ke

Rawa Jitu ada setiap hari, dan jumlahnya sangat banyak. Bahkan mobil-mobil mewah nan baru bisa dijumpai di sekitar sana.

Untuk jalan akses menuju areal tambak Dipasena dibangun dengan lebar sekitar 20 meteran, sehingga dapat dilalui truk-truk besar. Truk-truk itu adalah yang mengangkut udang-udang yang siap untuk diekspor. DCD juga membangun dermaga ekspor khusus untuk pengapalan udang segar ke mancanegara. Rawa yang status awalnya tanah negara tersebut, belakangan berubah menjadi kawasan berikat (bounded area). Kawasan yang belakangan populer dengan nama "Bumi Dipasena", berubah menjadi kota pantai yang megah, lengkap dengan berbagai prasarana dan sarana perkotaan. Tidak sembarang orang boleh keluar dan masuk.

Lengkapnya, Kompleks Dipasena yang terdiri dari 8 desa. Blok 00 dan blok 01 yang termasuk lokasi tambak baru yang dibangun paling akhir, termasuk desa Ekpansi, Blok 02 dan 03 desa Utama, Blok 04 dan 05 desa Agung, Blok 06 dan 07 desa Jaya, Blok 08 dan 09 desa Makmur, Blok 10 dan 11 desa Mulia, Blok 12 dan 13 desa Sejahtera , Blok 14 dan 15 desa Abadi.

Lokasi tambak Blok 00 dan 01 berbeda dengan tambak lain, lokasi ini hanya terdiri dari satu petak tambak dengan ukuran 70 x 70 meter. Di setiap dua blok terdapat blok yang khusus untuk infrastruktur seperti, sekolah dasar, pasar, mesjid, panggung hiburan, lapangan olah raga dan sarana penunjang lain untuk kepentingan petambak. Kecuali untuk blok 4 selain sarana untuk petambak juga dibangun perkantoran, koperasi, gedung pertemuan, cold storage, lapangan olah raga, pelabuhan/dermaga, perumahan karyawan, dan sarana penunjang lain.



Gambar 6.1

Salah Satu Sekolah SMA di Bumi Dipasena

Sumber: Kompas TV¹



Gambar 6.2

SDN 01 Bumi Dipasena

Sumber : <http://bumidipasenaagung.desa.id>

Untuk dapat memasuki lokasi tambak harus melalui gerbang depan, yang disebut Tanggul Penangkis. Lokasi tambak (blok) yang terdekat dengan daratan atau biasa disebut Tata Kota adalah blok 08 dan 09, untuk sampai ke sana perlu waktu sekitar 30 sampai 45 menit dengan memakai kapal speed boat. Tergantung kondisi pasang surut air.

Setelah sarana dan prasarananya dibangun, pihak DCD kemudian membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat untuk menjadi petambak. Banyak yang tertarik untuk jadi petambak. Tidak hanya dari

provinsi Lampung tapi juga dari provinsi lain. Para pelamar diseleksi dengan ketat. Selain pendidikan juga dilakukan tes fisik dan berenang, maksudnya agar petambak terpilih adalah mereka yang tangguh. Dan diharapkan petambak-petambak itu dapat bekerja mengelola tambaknya secara maksimal.

Dipasena menampung sekitar 9.033 orang petambak plasma, 10.000 anggota keluarga petambak, ditambah sekitar 11.000 orang karyawan. Jika dilihat dari masyarakat sekitarnya dan dampak langsung kepada kegiatan perekonomian, sebenarnya kawasan Dipasena bisa dijadikan sumber nafkah. Ada kurang lebih 300.000 penduduk tinggal di sana. Dan sesungguhnya, kawasan ini adalah penghasil devisa yang tidak kecil bagi negara.

Sejak adanya DCD di Provinsi Lampung, devisa yang diberikan dari tahun 1995 hingga 1998 selalu meningkat. Pada tahun 1991, mereka memproduksi 1.873 ton udang windu yang melonjak menjadi 11.068 ton pada 1994. Setahun kemudian naik menjadi 16.250 ton. Karena berorientasi ekspor mereka menyediakan dermaga dengan dua kapal, bersebelahan dengan cold storage. Ekspor udang yang sebagian besar dilempar ke pasaran Jepang, Amerika Serikat dan sebagian negara-negara Eropa.

Tercatat devisa yang disumbangkan DCD pada panen perdana tahun 1990 mencapai 3 juta dolar AS, tahun 1991 membukukan 10 juta dolar AS, tahun 1992 sekitar 30 juta dolar AS dan terus meningkat pada tahun berikut 63,8 juta dolar AS, dan puncaknya tahun 1995 hingga 1998 menghasilkan 167 juta dolar AS. Pada tahun berikutnya pendapatan DCD mulai berkurang, selain karena masalah eksternal juga masalah internal di DCD sendiri.

Selain sebagai usaha budi daya tambak udang terbesar di dunia, DCD juga sebagai perusahaan yang peduli terhadap masalah ketenagakerjaan. Ada sekitar 20.000 jiwa yang bekerja di DCD atau sekitar 300.000 yang terlibat dalam bisnis usaha udang DCD.

Dari udang tidak sedikit devisa yang dihasilkan. Produksi udang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dan puncaknya pada 1995 DCD mengekspor udang dengan nilai 167 juta dolar AS. Untuk itu Presiden

Soeharto pada 1995 memberi ke PT. Dipasena Citra Darmaja anugerah PRIMAYATA sebagai eksportir terbaik.

Pada 1996, DCD juga mendapat penghargaan sebagai perusahaan kemitraan teladan dari Presiden Soeharto dalam acara Pekan Nasional (PENAS) IX Prestasi Kencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan pada tahun yang sama juga memperoleh penghargaan sebagai eksportir terbaik di Lampung. Perusahaan udang ini tercatat sebagai badan usaha pembayar pajak penghasilan (PPh) tertinggi di Provinsi Lampung.

Bagi petambak, fasilitas juga sangat dicukupi. Setiap petani plasma mengelola satu tambak seluas 4.000 meter persegi, yang terdiri dari 2 petak yang masing-masing berukuran 40 meter x 50 meter dan menempati rumah ukuran 5 x 7 meter beserta isinya, seperti, satu set kursi tamu, kompor, satu lusin piring dan satu lusin gelas.

Selain itu petambak juga memperoleh suplai bahan kebutuhan hidup (sembako) seperti beras 25 kg, ikan asin, minyak tanah, minyak goreng, 1 dus super mie, sabun. Dan setiap bulannya petambak juga memperoleh uang Rp 175.000,- terus naik menjadi Rp 250.000,- naik lagi menjadi Rp 350.000,- dan terakhir naik lagi menjadi Rp 500.000,-.

Dengan pola Tambak Inti Rakyat (TIR) PT DCD dan masyarakat petambak mengambil perannya masing-masing. DCD sebagai inti dan petani tambak sebagai plasma. Istilah populer dari awal disebut, hubungan kemitraan atas asas kebersamaan kedudukan dan keselarasan. Guna memacu keterampilan kelompok mitra, inti menerapkan suatu sinergi kemitraan yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Sejak tambak DCD mulai operasional tahun 1989, Bumi Dipasena muncul jadi kawasan primadona. Hiruk-pikuk aktivitas tambak, mulai dari penebaran benur, panen udang, sampai kepada kesibukan bongkar muat dan ekspor, jadi pemandangan sehari-hari. Kawasan yang semula sangat terisolasi dan sepi manusia, berubah menjadi wilayah tersibuk. Bahkan tingginya mobilitas di Bumi

Dipasena sampai-sampai menghasilkan julukan: Bumi Dipasena identik dengan denyut nadi ekonomi Lampung.

Semua itu gambaran awal Dipasena. Geliat perusahaan tambak itu masih terasa selama 8-9 tahun. Namun memasuki usianya yang kesepuluh, tahun 1999, terjadi konflik antara inti dan plasma tambak. Dari sana muncul berbagai aksi, reaksi, yang tidak seluruhnya muncul karena faktor internal, tetapi datang dari faktor eksternal, yaitu krisis moneter kawasan Asia. Namun Baik suplai kebutuhan pokok, maupun tunjangan uang bulanan, yang seharusnya merupakan gaji, dihitung sebagai kredit bagi petambak dari Dipasena. Sehingga para petambak terlilit hutang.

Awal konfliknya dimulai ketika petambak merasa adanya ketidakadilan pada sistem kemitraan yang diberlakukan. Konflik berkepanjangan di Bumi Dipasena dimulai pada tahun 1996. Kala itu, para petambak plasma menuntut transparansi harga utang dan cicilan utang mereka. Pada pertengahan Oktober tahun 1999 kemarahan petambak kepada perusahaan kian membara. Sekitar 9.000 petambak plasma, ramai-ramai keluar areal budidaya utang di Rawajitu, Kabupaten Tulangbawang, Lampung itu. Mereka yang tergabung dalam P3UW, Perhimpunan Petambak Plasma Utang Windu, bergerak menuju gedung DPRD Lampung untuk menuntut keadilan. Mereka menginap 10 malam di gedung dewan. Inilah demonstrasi paling besar dan paling lama dalam sejarah perjuangan petambak plasma di Tanah Air melawan eksploitasi pemilik modal. Para petambak juga sudah menghadap Presiden Gus Dur untuk memohon keadilan. Secara kronologis, PT Dipasena Citra Darmaja masuk ke Rawajitu dan mendirikan kerajaan bisnis utang pada tahun 1988. Setahun kemudian, pertambakan utang terbesar di Asia Tenggara itu mulai beroperasi dengan pola Tambak Inti Rakyat. Petambak sebagai plasma dan PT Dipasena sebagai inti. Pola kemitraan yang dipromosikan mampu mengangkat kesejahteraan petambak rakyat. Setiap petambak diberi rumah sederhana dan dua petak tambak dengan luas masing-masing dua ribu meter persegi. Apa yang diperoleh petambak itu dicatat sebagai utang kepada

perusahaan, totalnya 135 juta rupiah per plasma. Petambak melunasi utang itu dengan pemotongan 20 persen hasil penjualan udang setiap panen. Dengan cara ini utang petambak diperkirakan lunas dalam delapan tahun dan setelah itu tambak menjadi milik plasma. Tetapi, sampai tahun 1997, utang petambak bukannya lunas malah membengkak menjadi 300 juta hingga 700 juta rupiah per orang. Menurut PT Dipasena, utang petambak membengkak karena kredit mereka dalam dolar. Ketika rupiah terpuruk pada pertengahan tahun 1997, otomatis utang petambak terdongkrak. Ini jelas alasan yang dibuat-buat. Sebab, krisis ekonomi terjadi sejak Juli 1997, sedangkan petambak plasma mencicil utang itu mulai tahun 1989. Seharusnya utang seluruh petambak sudah lunas, bukan justru bertambah. Selama itu, akses informasi untuk petambak memang ditutup rapat. Sehingga petambak tidak tahu apa yang terjadi di luar Bumi Dipasena. Termasuk soal berapa harga udang di pasaran. Akibatnya, perusahaan bisa membeli udang dari plasma dengan harga semauanya.

Misalkan, ketika harga udang mencapai 120 ribu per kilo, hasil panen petambak hanya dibeli 37 ribu rupiah per kilo. Ketika petambak mengetahui berbagai aksi penipuan dan pemerasan itu, mereka melawan. Tetap, Syamsul Nursalim, pemilik PT Dipasena menganggap angin lalu tuntutan petambak. Pada tahun 2000 Syamsul Nursalim terbelit kasus BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dia dipaksa mengembalikan uang negara yang ditilapnya dengan menyerahkan aset-aset, termasuk PT Dipasena Citra Darmaja. Sejak itu, konflik petambak mereda dan Bumi Dipasena dalam status-quo. Petambak plasma terus berbudidaya udang dengan sistem tebar mandiri. Dengan cara ini mereka justru lebih sejahtera. Masalah muncul lagi ketika pada tahun 2007 pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset menunjuk PT Aruna Wijaya Sakti mengambil-alih Dipasena. Anak perusahaan Central Proteina Prima ini diberi tugas merevitalisasi tambak udang tersebut. Pertambakan bekas milik Syamsul Nursalim itu akan dimodernkan lagi seperti pada awal didirikan. Termasuk kembali menerapkan pola inti-plasma. Pada April 2008, PT Aruna Wijaya Sakti berjanji menyelesaikan program revitalisasi dalam 18

bulan. Akan tetapi, hingga Januari 2011, setelah lebih dari 30 bulan, baru 5 blok bisa direvitalisasi dari 16 blok yang diprogramkan. Perusahaan ini tidak punya cukup modal untuk merevitalisasi pertambakan udang itu dengan cepat. Kegagalan PT Aruna Wijaya Sakti menunaikan janjinya itu terang saja merugikan plasma. Sebab, utang petambak kepada perbankan terus menumpuk lantaran areal tambak tidak segera berproduksi. Padahal, saat ini ada 40 ribu jiwa keluarga petambak menggantungkan hidup dengan menjadi mitra PT Aruna Wijaya Sakti. Perusahaan itupun dianggap gagal memulihkan Dipasena guna menyejahterakan petambak. Inilah yang melatari aksi unjuk rasa petambak dan pendudukan kantor PT Aruna Wijaya Sakti. Para petambak didukung kalangan aktivis lingkungan hidup mendesak Presiden SBY turun-tangan mengatasi masalah tersebut. Kasus ini sekaligus mesti menjadi jalan bagi pemerintah untuk mengevaluasi pola tambak inti rakyat di seluruh Indonesia. Bahwa kemitraan itu selalu merugikan petambak rakyat. Sebab, kerjasama dibangun secara tidak seimbang. Melulu menguntungkan perusahaan karena bisa berbisnis tanpa keluar modal pembebasan lahan. Sementara risiko bisnis dibagi ke seluruh petambak.

Sampai pada akhirnya aktivitas pertambakan nyaris tak terlihat lagi. Kanal utama buatan dekat muara Way Mesuji, Tulangbawang, yang tak pernah sepi dari lalu lalang speed boat jadi senyap. Armada ekspor peti kemas, kapal ponton dan kapal pengangkut material kebutuhan perusahaan, tak ada lagi

Pada masa Dipasena berjaya, udang yang dihasilkan setiap kali panen dengan masa 40 – 45 hari dari setiap petak tambak bisa mencapai 1 ton lebih. Tapi saat ini dapat 1 sampai 3 kwintal sudah termasuk lumayan. Imbasnya kian kompleks. Lebih dari 30.000 jiwa dari keluarga petambak plasma dan 800 kepala keluarga karyawan Dipasena yang terlibat dalam budi daya udang vaname itu kini menganggur. Padahal, sebelumnya, kota ini merupakan pusat produksi udang yang menjadi sumber penghasilan banyak orang. Sebelumnya ekspor udang kawasan ini mencapai 19 ribu ton (senilai 167 juta dolar AS), awal 2001 hanya 2,9 ton (29 juta dolar AS).

Tidak hanya berubah dari kawasan produktif menjadi kawasan yang tidak produktif, di kawasan ini mulai muncul berbagai penyakit sosial. Perjudian, tempat pelacuran, dan gubuk-gubuk untuk peredaran narkoba kian merebak. Masyarakat kota itu tampaknya frustrasi meratapi nasibnya. "Banyak sekali anak muda yang gemar minum pil ekstasi. Sedangkan gadis-gadisnya menjajakan diri. Kerugian petani bertumpuk-tumpuk. Selain faktor teknis, permintaan ekspor pun jadi sepi.

6.2 Risiko yang Terjadi Dulu dan Saat Ini

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997/1998 telah memporak-porandakan sendi perekonomian nasional. Jatuhnya nilai tukar rupiah yang disertai tingginya tingkat inflasi menyebabkan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Kemerosotan ekonomi akibat krisis juga dirasakan oleh ribuan petambak Plasma udang yang bemitra dengan PT Dipasena Citra Darmaja di Bumi Dipasena Lampung.

Sementara itu, "Biaya Operasional Bulanan" yang diberikan pihak perusahaan dalam bentuk **Hutang** kepada petambak (termasuk dalam sekema kredit perbankan kepada Plasma) tidak pernah bertambah. Hal inipun tak urung menimbulkan beban besar dan menambah kesusahan hidup para keluarga petambak Plasma. Puncak akumulasi keprihatinan ini adalah terjadinya aksi protes massa yang dilakukan oleh para petambak

Plasma kepada pihak perusahaan, pertama kali terjadi sejak berdirinya industri pertambakan terbesar di Asia Tenggara ini pada tahun 1989. Tuntutan aksi massa pada saat itu cukup sederhana, yaitu disesuaikan "Biaya Operasional Bulanan" petambak Plasma akibat dari beban krisis ekonomi yang semakin besar. Di saat bersamaan, keadaan ini justru mendorong lahirnya kesadaran kolektif akan pentingnya kebersamaan petambak Plasma dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai mitra kerja dengan pihak Inti saat itu yakni PT Dipasena Citra Darmaja.

Dalam rangka menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan hak-hak petambak, maka dibentuk organisasi petambak Plasma pertama dan satu-satunya di Bumi Dipasena. Organisasi ini kemudian diberi nama “Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW)”. P3UW berdiri secara resmi pada 30 September 1998 yang terdaftar di notaris dan mendapat legalisasi dari Direktorat Sosial Politik Provinsi Lampung. P3UW merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang menaungi para petambak pembudidaya udang di Bumi Dipasena.

Seiring waktu dan setelah melalui beberapa masa-masa pahit yang merupakan dampak dari kegagalan-kegagalan sistem kemitraan yang buruk, P3UW menginisiasi untuk mewujudkan sistem ekonomi baru di tengah masyarakat petambak bumi dipasena dengan landasan semangat gotong royong dan keadilan.

Risiko bisnis yang dulunya ditanggung petambak, saat ini di atur sedemikian rupa menjadi ditanggung bersama dengan berbagai pola pengaturan keuangan yang mengedepankan kepentingan bersama. Yaitu pola bagi hasil, model cadangan risiko usaha, serta dana 1000 rupiah dan hutang darurat yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Referensi

1. DIPASENA_TO_AWS.2002. MASA LALU - BUMI DIPASENA NASIBMU KINI...
2. . <http://dipasenatoaws.blogspot.com/2008/10/masa-lalu-bumi-dipasena-nasibmu-kini> [3]
3. Joanes. 2009. Bumi Dipasena. <http://jo4n3z.blogspot.com/2009/10/bumi-dipasena> [4]
4. Kompas Indonesia. Dokumentasi Kompas TV. [1]
5. Redaksi Kompasiana. 2015. Bumi Dipasena yang Terus Membara. https://www.kompasiana.com/firman_seponada/550068938133119c19fa775a/bumi-dipasena-yang-terus-membara [5]
6. Situs Resmi Kampung Bumi Dipasena Agung. <http://bumidipasenaagung.desa.id/>[2]

BAB VII

Kelembagaan Sistem CRU

7.1 CRU Sebagai pengelolaan risiko usaha

Tabel 7.1

Cadangan Risiko Usaha



CRU atau cadangan risiko usaha merupakan suatu model manajemen risiko yang diterapkan dalam bisnis tambak udang di Bumi Dipasena dalam menangani permasalahan gagal panen. Gagal panen dalam bisnis budidaya udang biasanya dikarenakan alam dan masalah teknis. Kondisi cuaca yang buruk dan adanya wabah penyakit udang merupakan contoh dari kegagalan budidaya udang yang disebabkan oleh alam. Sedangkan jika kualitas benur dan saprotam yang kurang baik sehingga menyebabkan gagal panen pada budidaya udang, berarti terjadi permasalahan teknis.

Dana cadangan risiko usaha diperuntukkan untuk mengganti modal kerja yang hilang akibat adanya kegagalan budidaya udang. Dana yang masuk dalam CRU dihimpun dari hasil keuntungan petambak yang berhasil dalam melakukan proses budidaya udang, per periode, sebesar 10%.



Gambar 7.1

Strategi Pengelolaan Risiko sebesar 10%, sehingga tingkat risiko menurun

Penghimpunan CRU tidak digabungkan dengan permodalan, melainkan ada di rekening yang terpisah. Hal ini karena CRU menjadi lumbung usaha para petambak jika dibutuhkan. Sistem pelaporan CRU

dilakukan pada rapat rutin bulanan petambak per BUSB. Karena CRU merupakan model strategi usaha tambak udang Bumi Dipasena.

Adapun manfaat yang didapatkan dari CRU adalah, bahwa petambak terbebas dari risiko gagal budidaya. Karena kegagalan budidaya sementara dapat ditutupi dengan dana CRU. Sehingga jika terjadi kegagalan pun modal dari investor tidak akan diganggu gugat. Selanjutnya, karena CRU dikelola secara bersama, sehingga menimbulkan rasa kebersamaan dan gotong royong antar petambak yang ada. Jika terjadi gagal budidaya, tim budidaya otomatis akan terlibat dalam mengelola tambak yang gagal. Petambak yang mengalami gagal budidaya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi mendapatkan tuntunan intensif dari tim budidaya.

Berikut ini adalah contoh laporan saldo CRU dalam satu bulan:

Tabel 7.2

Saldo Cadangan Risiko Usaha (CRU) Desa Bumi Dipasena Jaya

NO	WILAYAH	SALDO CADANGAN RISIKO USAHA (CRU)				SALDO AKHIR
		SALDO AWAL	TERKUMPUL	TERPAKAI		
1	6 ALPA	-Rp 200.543.848	Rp 4.801.214	Rp 14.246.300	-Rp	209.988.935
2	6 BRAVO	-Rp 126.530.387	Rp 6.289.028	Rp 7.686.900	-Rp	127.928.259
3	6 CHERLY	-Rp 2.892.553	Rp 7.886.124	Rp 3.000.200	Rp	1.993.371
4	6 DELTA	Rp 84.183.808	Rp 5.787.639	Rp 9.844.372	Rp	80.127.074
5	6 ECHO	Rp 58.478.823	Rp 7.943.781	Rp 18.266.150	Rp	48.156.454
6	6 FOXROT	Rp 1.622.201	Rp -	Rp 16.780.160	-Rp	15.157.959
7	7 ALPA	Rp 32.902.700	Rp 2.905.934	Rp 8.529.563	Rp	27.279.071
8	7 BRAVO	Rp 62.596.066	Rp 5.235.972	Rp 8.116.105	Rp	59.715.933
9	7 CHERLY	Rp 41.863.235	Rp 2.325.446	Rp -	Rp	44.188.681
10	7 DELTA	Rp 123.210.202	Rp 9.183.934	Rp 12.366.674	Rp	120.027.462
11	7 FOXROT	Rp 116.215.805	Rp 8.160.350	Rp 87.026.000	Rp	37.350.156
12					Rp	-

TOTAL SALDO DALAM MANFAAT CRU Rp. 65.763.049

Sumber : Laporan BUMKAM Bumi Dipasena Jaya Juni 2018

Dari tabel tersebut, terlihat saldo awal, tambahan saldo yang dikumpulkan, saldo yang terpakai dan saldo akhir CRU per Unit Bisnis. Pengelolaan CRU ada pada Badan Usaha Sub Blok (BUSB). Di dalam satu desa terdiri dari beberapa BUSB. Dan masing-masing BUSB mengelola CRU nya masing-masing. Namun pengelolaan ini tetap dilakukan pengawasan dan koordinasi dengan BUMDes, P3UW dan pemerintah desa.

Referensi

1. Anonnonymous, 2016. Profil Usaha Bumi Dipasena. Rawa Jitu, Tulang Bawang. [1]
2. Laporan BUMKam Bumi Dipasena Jaya Juni 2018 [2]

BAB VIII

Pengembangan Pengelolaan Tambak Udang Bumi Dipasena

8.1 Kondisi Budidaya (Optimalisasi Produksi)

Budidaya udang vaname di Bumi Dipasena, saat ini sudah berjalan normal, tanpa adanya konflik yang berkepanjangan lagi. Namun, pengelolaan tambak udang vaname per periode dari setiap petambak di setiap desa belum menghasilkan panen udang yang optimal. Masih terjadi gagal panen baik yang bisa diprediksi maupun tidak bisa diprediksi. Gagal panen bisa terjadi karena faktor alam, maupun faktor teknis. Gagal panen yang disebabkan karena alam, biasanya terjadi di periode ketiga setiap tahunnya. Yaitu sekitar bulan Juli sampai dengan September. Hal ini terjadi karena adanya perubahan cuaca yang mempengaruhi kondisi air tambak.

Gagal panen karena faktor teknis bisa terjadi karena beberapa hal seperti penggunaan input produksi seperti benur, saprotam dan sebagainya juga belum memiliki standar yang jelas untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jenis pakan dan obat apa saja yang bagus untuk menghasilkan produksi udang yang paling optimal.

Teknis pengelolaan kincir seperti apa dan berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk mendapatkan oksigen yang pas untuk setiap tambak.

Selain itu pembagian lahan tambak juga dibagi secara merata, yaitu 2 petak untuk setiap petambak. Apakah pembagian lahan tersebut sudah optimal. Atau mungkin saja jika pengelolaan tambak udang dilakukan berkelompok atau lebih dari 2 petak bisa lebih optimal.

Berikut ini adalah contoh data penggunaan benur, pakan, obat dan bahan bakar, dalam satu Sub Blok yaitu 7 FOXTROT yang ada di Desa Bumi Dipasena Jaya Tahun 2017.

Tabel 8.1
Data Penggunaan Saprotam Sub Blok 7 Foxtrot Tahun 2017

Tahun 2017	Nama Petani	Luas Tambak	Benur (Buah)	Pakan (Karung)						Obat (Karung)						BEM (Liter)		Total Produksi (Kg)	
				Bungkil	SI-01	SI-02	SI-2P	Pakan Ayam	Ikam Asin	KH-3M	Kapitan	Saponin	Lodan	Dedak	Pupuk NPK	Bio Bost	Solar		Bensin/Pertalite
JANUARI	01. SURANTO	1Lot/2 Petak	100.000	2	7	13	7	5				6	2	4			424		561
	02. AMAN M NUR	1Lot/2 Petak	93.000	2	6	6	23		3			15	2	9	28		433	5	531
	03. MERIYADI	1Lot/2 Petak	92.400	4	5	27	22		2			10	2	110	2		466		527
	04. SUNARSO	1Lot/2 Petak	95.000	5	23	15		3	8			15	4				566		682
	05. MUJONO	1Lot/2 Petak	100.000	4	9	19							2	12			366		745
	06. ADANG EFENDI	1Lot/2 Petak	93.100	2	4	13	18	1	238			15	2	2	78		766		703
	07. KASNO	1Lot/2 Petak	130.600	6	1	3	19	7	5			13	3		32		426	10	764
	08. KAPIDIN	1Lot/2 Petak	105.600	1	7	8	23					6					533		502
	09. SLAMET WIDODO	1Lot/2 Petak	92.400	1	5	14	10	15				15	1	10	27	2	533		700
	10. RIDWAN	1Lot/2 Petak	100.000	5	4	12	19	2				10					433		586
	11. SLAMET 53	1Lot/2 Petak	94.528	15		7	25	5	201			20	1				633		953
Tahun 2017	Nama Petani	Luas Tambak	Benur (Buah)	Pakan (Karung)						Obat (Karung)						BEM (Liter)		Total Produksi (Kg)	
FEBRUARI DAN MARET	01. MARHUSIN	1Lot/2 Petak	107.100	3	2	17	33					10	2				466		963
	02. NDAHA	1Lot/2 Petak	113.400	1	6	12	7	27	3			22	2	10	1	10	833		553
	03. IRUL	1Lot/2 Petak		5	5	7	24	7	1			15	2		40		500		644

YADI	Petak	100.400	Pakan (Karung)										Benur (Buah)	Luas Tambak	Total Produksi (Kg)					
			Bungkil	SI-01	SI-02	SI-2P	SI-3P	Pakan Ayam	Ikkan	KH-3M	Kapitan	Saponin				Lodan	Dedak	Pupuk NPK	Bio Bost	BBM (Liter) Bensin/ Pertalite
04. DIAN	1Lot/2 Petak	100.800		1	14	8	6						10	1	23		3		566	665
05. SURANTA	1Lot/2 Petak	90.650		5	4	7	6	12	1				14	4	18		28	1	666	646
06. MAIMUSLIH	1Lot/2 Petak	96.000			2	8	51	1						2		35			999	678
07. FARIZET	1Lot/2 Petak	100.800			2	7	36	14	4				15	1					666	1.048
08. PARJO	1Lot/2 Petak	100.800		7	4	10	20	1	2				10	2					500	605
09. MULYANTO	1Lot/2 Petak	90.650		6	1	3	18	10	4				15	2	8	70			599	441
10. AINDI	1Lot/2 Petak																			
11. NANA MUL	1Lot/2 Petak																			
12. TAUFIQ 52	1Lot/2 Petak																			
Tahun 2017																				
01. KASDI WINATA	1Lot/2 Petak	126.000		10	8	30	13	309					20				6		666	828
02. TAUFIQ	1Lot/2 Petak	121.800		10	13	35	13	252					20	2	4		8		566	1.052
03. SUYONO	1Lot/2 Petak	126.000		3	8	11	2	20	2				10	4	28	0	6	66	633	392
04. ERIANTO	1Lot/2 Petak	126.000		7	28	24		98					15	2			4		932	842
05. MUSLIMIN	1Lot/2 Petak	126.000			9	45	12		2				10	4	4	40	4		966	955
06. KASNO	1Lot/2 Petak	120.400		7	7	5	9	302					20	1	22	34	8		566	740
07. SURANTO	1Lot/2 Petak	113.400		7	6	23	25						12	2	10	30	14		766	774
APRIL																				

Tahun 2017	Nama Petani	Luas Tambak	Benur (Buah)	Pakan (Karung)						Obat (Karung)						BBM (Liter)		Total Produksi (Kg)
				Bungkil	SI-01	SI-02	SI-2P	Pakan Ayam	Ikan Asin	KH-3M	Kaptan	Saponin	Lodan	Dedak	Pupuk NPK	Bio Bost	Solar	
MEI	08. MARYADI	1 Lot/2 Petak	126.000	4	5	22	22	99	10	2	110	2	666	640				
	09. KAFIDIN	1 Lot/2 Petak	126.000	2	12	49	1	10	2	15	899	632						
	10. MUJONO	1 Lot/2 Petak	108.800	9	9	2	1	8	2	433	417							
	11. SUNARSO	1 Lot/2 Petak	126.000	5	9	21	8	204	16	10	2	833	694					
	12. ADANG	1 Lot/2 Petak	107.100	12	10	45	7	241	10	21	3	1.066	775					
	13. AMAN M NUR	1 Lot/2 Petak	91.800	1	5	16	18	3	5	11	2	500	557					
	14. SLAMET KEMEK	1 Lot/2 Petak	98.600	5	18	28	8	572	20	2	20	699	792					
	15. RIDWAN	1 Lot/2 Petak	120.000	7	38	13	2	10	4	18	32	6	8	470				
	16. MISBAH	1 Lot/2 Petak	110.000	5	26	22	4	10	4	18	733	683						
	17. SLAMET WIDODO	1 Lot/2 Petak	110.000	12	13	17	17	24	2	55	833	631						
	01. MARHUSIN	1 Lot/2 Petak	144.000	3	20	50	8	1	10	4	3	666	948					
	02. IRUL YADI	1 Lot/2 Petak	116.000	6	16	26	13	364	10	1	1	833	768					
	03. SAMINGIN	1 Lot/2 Petak	120.000	1	30	102	10	10	20	4	398	104	545					
	04. PARJO	1 Lot/2 Petak	132.300	8	18	7	4	88	6	2	1	466	575					
05. MAYMUSLIH	1 Lot/2 Petak	134.400	8	30	3	3	30	766	488									
06. SURANTA	1 Lot/2 Petak	118.800	4	356	442													
07. NDAHA	1 Lot/2 Petak	138.600	6	5	10	404	32	21	2	34	18	899	799					

Tahun 2017	Nama Petani	Luas Tambak	Benur (Buah)	Pakan (Karung)						Obat (Karung)						BBM (Liter)		Total Produksi (Kg)		
				Bungkil	SI-01	SI-02	SI-2P	Pakan Ayam	Ikam Asin	KH-3M	Kapitan	Saponin	Lodan	Dedak	Pupuk NPK	Bio Bost	Solar		Pertalite	
	08. HERU	1Lot/2 Petak	132.000		3	24	1					8	10	2				300		837
	09. MULYANTO	1Lot/2 Petak	75.600		2	6	5	8	174					2				233	9	359
	10. AINDI	1Lot/2 Petak	145.600		7	24	9	1	363				10	2				533	3	655
	11. DIAN	1Lot/2 Petak	132.000		8	12	39				4	10	10			12		699	12	880
	12. FARIZET	1Lot/2 Petak	132.000		13	10	19	13	137			15	2	2				599		1.024
	13. NANA MUL	1Lot/2 Petak	129.600	7	4	24	18	5	191	1	8	2	2					533	8	775
	14. SUYONO	1Lot/2 Petak	97.500		10	8		2	97		15	3	3					266	2	344
	15. MUSLIMIN	1Lot/2 Petak	110.000		6	11			98		15	3	3					466	10	191
	01. TAUFIQ 52	1Lot/2 Petak	117.600		2	2	9	19	5	91	2	10	1					300	2	740
	02. JUANDA	1Lot/2 Petak	100.030	7	4	12	8		85	5	15	2						400		588
	03. KASDI	1Lot/2 Petak	140.920	3	9	11	19	4	239	4		2						500	2	806
	04. SURANTO	1Lot/2 Petak	125.944	3	3	32		1			15	4	3					433	2	713
	05. SLAMET WIDODO	1Lot/2 Petak	83.200	5	2	1					14					20		100		268
	06. NDAHA	1Lot/2 Petak	108.000					4			15		2					133		92
	07. KASNO	1Lot/2 Petak	121.638	12	6	17	7	4	128		17	3	4					133	18	961
	08. MERYADI	1Lot/2 Petak	125.944	6	21	17			133	5	10	1						433	11	929
JUNI																				

Tahun 2017	Nama Petani	Luas Tambak	Benur (Buah)	Pakan (Karung)						Obat (Karung)						BBM (Liter)		Total Produksi (Kg)						
				SI-01		SI-02		SI-2P		Pakan Ayam		Ikan Asin		KH-3M		Kaptan	Saponin		Lodan	Dedak	Pupuk NPK	Bio Bost	Solar	Pertalite
				Bungkil																				
09. TAUFIQ KASDI	1 Lot/2 Petak	140.042		3	6	9	46	4	91	6	20	2									2	1.012	20	1.207
10. KAFIDIN	1 Lot/2 Petak	81.700			3	7	18			4	10	1										400		562
11. MUHASIS	1 Lot/2 Petak	100.800			3	43	9	4			10	3										765		652
12. ERIANTO	1 Lot/2 Petak	110.000			3	32	4		32		25	1			22	50						599		443
00. LORENG	1 Lot/2 Petak	97.200			12	5									21							400		424
01. MAY MUSLIH	1 Lot/2 Petak	106.400			11	14					15	2										400		153
02. MARHUSIN	1 Lot/2 Petak	94.400			4	12	2				10	2	1									266		138
03. IRUL YADI	1 Lot/2 Petak	126.000			13	10	2	3			15	1										400		531
04. SLAMET	1 Lot/2 Petak	118.500			10	9	25	7			25											666		662
05. HASBI	1 Lot/2 Petak	100.800			7	11	22	3			10	2	10									566		539
06. SAMINGIN	1 Lot/2 Petak	112.000			10		4	8			10				20							369		669
07. NARSO	1 Lot/2 Petak	123.840			3	3	34	5							3							633		696
08. ASHARI	1 Lot/2 Petak	148.600									15	3										433		725
09. ADANG EFENDI	1 Lot/2 Petak	123.840			22	4	5	23	6	413	17	1										966		953
10. RIDWAN	1 Lot/2 Petak	92.800			5	28	5				10				2							333		411
11. SURYADI	1 Lot/2 Petak	100.000									10	2										266		372
12. DIAN	1 Lot/2 Petak				14	3					15	1										266		279

JULI

Tahun 2017	Nama Petani	Luas Tambak	Benur (Buah)	Pakan (Karung)				Obat (Karung)				BBM (Liter)		Total Produksi (Kg)					
				SI- Bungkil	SI- 01	SI- 02	SI- 2P	Pakan Ayam	IKAN Asin	KH- 3M	Kaptan	Saponin	Lodan		Dedak	Pupuk NPK	Bio Bost	Solar	Pertalite
15. SLAMET WIDODO		1 Lot/2 Petak	89.600														300		300
16. JUANDA		1 Lot/2 Petak	72.800	3	1	11											233		233
17. KASNO		1 Lot/2 Petak	89.600				3	5	4	10				2	20		433		433
		1 Lot/2 Petak	72.800	2	8	9						15	1			10	566		359
		1 Lot/2 Petak	72.800	7		3	5				10						233		247
		1 Lot/2 Petak	81.600	1	5	6					10	2	2				133		381
		1 Lot/2 Petak	91.200	11									20	2		2	400		239
		1 Lot/2 Petak	90.048	4	10	13	60				15	2	8				233		502
		1 Lot/2 Petak	89.600	2	5	4	2				12		2				266		170
		1 Lot/2 Petak	98.300				5				15	2	6		4	2	233		84
		1 Lot/2 Petak	99.000			3					10	2					133		215
		1 Lot/2 Petak	93.600	1	1	2					15	1					433		794
Tahun 2017		1 Lot/2 Petak	89.600	6			1				10	2				5	219	47	461
		1 Lot/2 Petak	92.400	3	2	31	3				10		26			4	364	32	578
		1 Lot/2 Petak		17	15						20	2					433		850

No.	Nama Petani	Luas Tambak	Benur (Buah)	Pakan (Karung)						Obat (Karung)				BBM (Liter)		Total Produksi (Kg)	
				SI- Bungkil	SI- 01	SI- 02	SI- 2P	Pakan Ayam	Ikan Asin	KH- 3M	Kaptan	Saponin	Lodan	Dedak	Pupuk NPK		Bio Bost
03.	MULYANTO	1 Lot/2 Petak	129.600	10	1	28	2	4	10	3	24				400		828
04.	FARIZET	1 Lot/2 Petak	77.560				3	98	1	10	2				300		444
05.	NANA MUL	1 Lot/2 Petak	81.600	6	4	4		3	15	2	18				433		457
06.	HERU	1 Lot/2 Petak	82.600		2	17		13	10						206	60	459
07.	KASNO	1 Lot/2 Petak	84.000				1		10	2					500		453
08.	SURANTA	1 Lot/2 Petak	84.000	4	4	4	3		10	3	19		7	1	733		452
09.	SUYONO	1 Lot/2 Petak	79.900			5	1	2	9	2				6	500		574
Tahun 2017				Pakan (Karung)						Obat (Karung)				BBM (Liter)		Total Produksi (Kg)	
01.	ARI	1 Lot/2 Petak	84.000	3	2	10	1	7	12	2	2				533		466
02.	SURANTO	1 Lot/2 Petak	74.840				9	3	10	2			4		300		565
03.	JUANDA	1 Lot/2 Petak	79.392	6			11	5	10	1					533		644
04.	ADIANA SAPUTRA	1 Lot/2 Petak	89.600		4	13	10	4	15	2	12		12		400		776
05.	PARJO	1 Lot/2 Petak	82.500		2		3	6	10						366		495
06.	MUHASIS	1 Lot/2 Petak	89.600	2	8	23	21	3	15	2	8		3	3	699		778
52	TAUFIQ KASDI	1 Lot/2 Petak	84.000	17	2	5		3	10	1	7				366		656
08.	TAUFIQ KASDI	1 Lot/2 Petak	79.289	8	2	2		11	10	2	4		4		889	10	684
09.	KAFIDIN	1 Lot/2 Petak	84.000	1			1		10	1			4		599		375
10.		1 Lot/2 Petak		4	2		1	20	10						500		877

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa, terdapat beberapa ketidakseragaman yang berdampak pada perbedaan produksi udang. Seperti penebaran benur, penggunaan jenis pakan, penggunaan banyak pakan, penggunaan jenis obat, penggunaan banyak obat, penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu periode budidaya yang berbeda dalam satu tahun, juga berpengaruh terhadap keragaman hasil produksi udang. Selain periode dan imput, kondisi air juga berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya tambak udang dan produksi udangnya. Kondisi air biasanya dilihat dari beberapa hal seperti PH, kandungan amoniak dan kecerahan.

Untuk itu perlu dibuatkan suatu standarisasi penggunaan input produksi yang sesuai untuk menghasilkan produksi udang yang paling optimal. Misalnya dari jumlah benur yang ditebar, jenis pakan dan obat yang digunakan serta berapa banyak jumlahnya, pengoperasian kincir dengan jumlah penggunaan BBMnya. Kemudian dari sisi kondisi air, perlu diberikan perlakuan khusus untuk mengkondisikan air agar tetap sesuai standar budidaya udang. Untuk periode budidaya udang, perlu dibuat strategi tertentu agar mengurangi kerugian pada periode transisi musim.

8.2 Fasilitas Budidaya

Fasilitas budidaya tambak udang yang paling utama adalah mengenai teknologi, kelistrikan dan air bersih. Yang pertama yaitu teknologi. Teknologi berkaitan dengan akses internet dan juga teknologi pengelolaan tambak udang. Untuk akses internet, yang dibutuhkan warga Bumi Dipasena dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan budidaya udang sudah bisa dilakukan di Bumi Dipasena. Namun sinyal dari operator seluler belum stabil. Dan bahkan di perjalanan banyak sekali daerah yang blank spot atau tidak ada akses internet.

Selain teknologi internet, teknologi pengelolaan tambak udang berkaitan dengan teknologi kincir dan bula tutup katup pengairan. Kincir berhubungan dengan kadar oksigen di dalam air. Saat ini di Bumi Dipasena terdapat dua jenis kincir yaitu kincir tombol

yang menggunakan tenaga listrik dan kincir manual. Sedangkan teknologi pengairan di Bumi Dipasena, berkaitan dengan kanal air masuk dan air keluar. Tidak semua daerah pertambakan memiliki katup dan kanal air masuk dan keluar yang terpisah. Namun hal ini, tidak menjadikan air tambak di setiap petak di Bumi Dipasena sudah sesuai untuk budidaya udang dan tidak ada hambatan dalam pendistribusian hasil produksi udang. Hasil produksi udang biasanya diangkut menggunakan kapal yang melalui kanal air keluar. Namun jika air sedang surut, maka harus menunggu air pasang baru bisa mendistribusikan produksi udang tersebut. Hal ini mempengaruhi waktu pendistribusian dan kualitas produksi udang.

Kemudian mengenai listrik dari PT. PLN yang belum masuk di Bumi Dipasena, menyebabkan belum optimalnya budidaya udang yang dilakukan. Dulu ketika sebelum terjadi konflik di Bumi Dipasena, dan tambak udang Bumi Dipasena yang masih dikelola oleh satu perusahaan, PT PLN memang pernah menyediakan listrik disana. Namun karena berbagai konflik yang terjadi yang berhubungan dengan konflik lahan, PT PLN tidak lagi bisa menyalurkan listrik disana.



Gambar 8.1

Pelajar Bumi Dipasena yang belajar menggunakan Petromak
Sumber: Kompas TV¹

Penggunaan listrik selain untuk keseharian warga desa Bumi Dipasena, listrik juga berhubungan dengan pengoperasian kincir yang membutuhkan tenaga listrik. Penggunaan tenaga diesel dengan suplai solar yang saat ini digunakan masih bisa menampung kegiatan pertambakan di bumi dipasena, namun masih sangat kurang, karena biayanya yang mahal. Sedangkan warga lainnya di bumi dipasena menggunakan listrik tenaga surya yang juga masih terbatas. Untuk itu perlu dilakukan terobosan mengenai tenaga listrik yang ada.

Sedangkan, mengenai air bersih, sampai saat ini masyarakat Bumi Dipasena mengumpulkan air bersih dengan menampung air hujan di diendapkan. Belum ada teknologi lain dalam upaya mendapatkan air bersih di kawasan tambak Bumi Dipasena. Sehingga warga masih mengambil air bersih dari luar kawasan Bumi Dipasena



Gambar 8.3

Pengangkutan Air Bersih dari Luar Kawasan Bumi Dipasena

Sumber: KIARA¹

8.2.1 Perbaikan

Untuk fasilitas budidaya di Bumi Dipasena yang berkaitan dengan teknologi, kelistrikan dan pengadaan air bersih, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang bekerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi. Yang pertama dari sisi teknologi. Bisa dibuat suatu inovasi teknologi kincir yang menggunakan bahan bakar yang lebih ekonomis atau bahkan alami. Selanjutnya dari sisi teknologi kanal yang berhubungan pasang surut air. Diperlukan suatu teknologi yang bisa memungkinkan air pada kondisi yang stabil sebagai akses kapal dalam mengirimkan hasil produksi udang. Kemudian dari sisi kelistrikan, PT PLN sebaiknya kembali mengadakan listrik di sana. Karena Bumi Dipasena merupakan penghasil udang vaname skala nasional. Selain itu diperlukan teknologi kelistrikan tenaga selain dari PLN yang bisa dibangun warga sendiri. Misalnya teknologi listrik tenaga surya, yang sebagian sudah digunakan disana. Yang terakhir dari sisi pengadaan air bersih, diperlukan teknologi penyulingan air yang cukup besar, yang bisa digunakan untuk menyaring air hujan, sehingga bisa dikonsumsi sebagai air bersih oleh masyarakat.

8.2.2 Peran Stakeholder

Dalam berbagai upaya perbaikan fasilitas budidaya tambak udang di Bumi Dipasena tersebut, diperlukan adanya kerjasama dengan instansi dan perguruan tinggi. Kerjasama instansi bisa berkaitan dengan instansi secara umum maupun program CSR (Corporate Social Responsibility)nya. Sedangkan kerjasama dengan perguruan tinggi, bisa berkaitan dengan program penelitian dan pengabdian masyarakatnya.

Selain instansi dan perguruan tinggi, pemerintah juga harus mengambil bagian dalam perbaikan dan pengembangan pada tambak udang skala nasional ini, terutama mengenai kelistrikan dan pengadaan air bersih.

8.3 Akses dan Infrastruktur

Selanjutnya mengenai sarana prasarana, yaitu mengenai akses dan infrastruktur internal dan eksternal Bumi Dipasena. Infrastruktur jalan, jembatan dan berbagai infrastruktur penunjang budidaya udang.

Akses dan infrastruktur internal atau yang ada di dalam wilayah Bumi Dipasena, berkaitan dengan kondisi jembatan, jalan dan fasilitas lainnya. Jalan di Bumi Dipasena hanya bisa diakses untuk pejalan kaki maupun sepeda motor. Namun jembatan-jembatan yang ada disana sudah banyak yang rusak dan berkarat terkena korosi. Selama ini pemeliharaan dan perbaikan insrastruktur di desa, dilakukan secara swadaya dengan berbagai cara. Seperti diberlakukannyapungutan keluar masuk jembatan yang mejadi pintu utama masuk bumi dipasena. Selain itu terdapat dana infaq dari bagi hasil yang sering disumbangkan untuk memperbaiki fasilitas desa. Dan adanya program 1000 rupiah untuk setiap kilo panen udang vaname yang dipergunakan untuk pengoperasian alat berat yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas dan infrastruktur desa.

Untuk akses eksternal atau jalan menuju daerah tambak Bumi Dipasena masih sangat parah. Kondisi jalan yang rusak akan menghambat berbagai hal yaitu, akses pendistribusian panen udang yang terkendala jalan yang rusak. Pengiriman hasil produksi udang akan semakin lama dan kemungkinan terjadi kecelakaan lebih tinggi. Selain itu, kondisi jalan yang rusak, menghambat pembeli yang ingin untuk datang dan bertransaksi, sehingga mempengaruhi penjualan udang.



Gambar 8.3

Kondisi Jalan yang Rusak sebagai akses dari dan keluar Bumi Dipasena

8.3.1 Perbaikan

Untuk akses atau infrastruktur internal Desa Bumi Dipasena, diperlukan adanya banyak perbaikan jembatan yang ada yang menghubungkan antar blok di Bumi Dipasena. Selain itu perlu ada perbaikan infrastruktur jalan dan bangunan di dalam Desa Bumi Dipasena.

Sedangkan akses atau infrastruktur eksternal, perlu dilakukan perbaikan infrastruktur jalan yang masih tanah merah berbatu. Pengaspalan bahkan pembetonan bisa dilakukan, karena terkait dengan pendistribusian produksi udang yang menjadi komoditas utama desa Bumi Dipasena.

8.3.2 Peran Stakeholder

Selama ini perbaikan dan pembangunan infrastruktur Desa, terutama internal desa, dilakukan secara swadaya dengan berbagai program seperti pungutan dana infaq dan program 1000 rupiah. Sama halnya dengan perbaikan fasilitas budidaya udang, akses dan infrastruktur Bumi Dipasena juga perlu peran instansi dan perguruan tinggi. Instansi dalam hal ini adalah perusahaan sekitar Bumi Dipasena yang wilayah usahanya dilewati ketika melakukan pendistribusian udang. Seperti perusahaan kebun tebu dan kelapa sawit. Perlu dibuat perjanjian kerjasama antara instansi untuk pelaksanaan pembangunan jalan yang bagus.

Selain itu perguruan tinggi juga perlu melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan akses dan infrastruktur jalan dan jembatan baik internal maupun eksternal.

Sama dengan perbaikan fasilitas budidaya udang. Selain instansi dan perguruan tinggi, pemerintah juga harus mengambil bagian dalam perbaikan dan pembangunan akses dan infrastruktur pada tambak udang skala nasional ini, terutama mengenai perbaikan jalan dan jembatan.

Referensi

1. Anonimous, 2016. Profil Usaha Bumi Dipasena. Rawa Jitu, Tulang Bawang. [1]
2. KIARA. 2018. Dokumentasi KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) untuk Dipasena. [2]